

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Jambi Tahun 2021 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (3) dimana Bupati/Walikota Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana maksud Pasal 69 Ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Jambi Tahun 2022 merupakan laporan berkala setiap tahunnya yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Penyusunan LPPD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Jambi berdasarkan (RPJMD) Tahun 2022 dalam pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui capaian Pemerinta Kota Jambi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Jambi Tahun 2022. Semoga materi LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan Pemerintahan Daerah serta bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk tahun-tahun berikutnya.

Jambi,       Maret 2023

  
**WALIKOTA JAMBI**  
  
**DR. H. SYARIF FASHA, ME**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	LATAR BELAKANG	
1.1.1	PENJELASAN UMUM	
a.	Undang-undang Pembentukan Daerah.....	1
b.	Geografsi Wilayah.....	1
c.	Jumlah Penduduk .....	3
d.	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan .....	4
e.	Jumlah Perangkat Daerah ,unit Kerja Perangkat Daerah .....	6
f.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	10
1.1.2	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
a.	Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah .....	26
b.	Visi dan Misi Kepala Daerah .....	48
c.	Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah .....	58
d.	Kegiatan Pembangunan Daerah.....	64
1.1.3	PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....	71

### **BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH**

2.1	Capaian Kinerja Makro .....	73
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan .....	73
2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran .....	73
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	103
2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	110
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
a.	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja .....	112
b.	Pengukuran Capaian Kinerja di bandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.....	112
c.	Pengukuran Capaian Kinerja di bandingkan dengan Tahun Sebelumnya...114	
d.	Pengukuran Capaian Kinerja di bandingkan dengan Target dalam Menengah .....	115
e.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan hasil kinerja yang di capai .....	116
f.	Analisi Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja .....	117

### **BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN**

### **BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

4.1	URUSAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN	
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	128
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	128
4.1.3	Realisasi .....	129
4.1.4	Alokasi Anggaran .....	140
4.1.5	Dukungan Personil .....	141
4.1.6	Permasalahan dan Solusi.....	142
4.1.7	Program dan Kegiatan .....	143
4.2	URUSAN KESEHATAN	
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	145
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	145
4.2.3	Realisasi .....	146

4.2.4	Alokasi Anggaran .....	148
4.2.5	Dukungan Personil.....	148
4.2.6	Permasalahan dan Solusi .....	149
4.2.7	Program dan Kegiatan .....	154
<b>4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>		
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	155
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	155
4.3.3	Realisasi .....	156
4.3.4	Alokasi Anggaran .....	161
4.3.5	Dukungan Personil.....	162
4.3.6	Permasalahan dan Solusi .....	163
4.3.7	Program dan Kegiatan .....	164
<b>4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>		
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	168
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	168
4.4.3	Realisasi .....	169
4.4.4	Alokasi Anggaran .....	170
4.4.5	Dukungan Personil.....	170
4.4.6	Permasalahan dan Solusi .....	171
4.4.7	Program dan Kegiatan .....	171
<b>4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
(a) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	172
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	175
4.5.3	Realisasi .....	176
4.5.4	Alokasi Anggaran .....	179
4.5.5	Dukungan Personil.....	183
4.5.6	Permasalahan dan Solusi .....	185
4.5.7	Program dan Kegiatan .....	186
(b) Satuan Polisi Pamong Praja		
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	191
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	192
4.5.3	Realisasi .....	193
4.5.4	Alokasi Anggaran .....	193
4.5.5	Dukungan Personil.....	194
4.5.6	Permasalahan dan Solusi .....	195
4.5.7	Program dan Kegiatan .....	195
<b>4.6 URUSAN SOSIAL</b>		
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	197
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	197
4.6.3	Realisasi.....	199
4.6.4	Alokasi Anggaran .....	201
4.6.5	Dukungan Personil .....	204
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	204
4.6.7	Program dan Kegiatan .....	204
<b>BAB V P E N U T U P.....</b>		<b>205</b>

## **1.1 LATAR BELAKANG**

### **1.1.1 PENJELASAN UMUM**

#### **A. Undang – Undang Pembentukan Daerah**

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah keresidenan Jambi;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
4. UU No. 18 tahun 2022 tentang Provinsi Jambi

#### **B. Data Geografis Wilayah**

Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan “Tanah Pilih Pusako Batuah”. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 - 2033, Luas Kota Jambi 17.552,71 Ha. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 88 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Luas indikatif Kota Jambi adalah 169.887 Ha yang terdiri dari:

a. Kecamatan Alam Barajo	36.909	Ha	21,73%
b. Kecamatan Danau Sipin	7.278	Ha	4,28%
c. Kecamatan Danau Teluk	13.444	Ha	7,91%
d. Kecamatan Jambi Selatan	12.267	Ha	7,22%
e. Kecamatan Jambi Timur	13.684	Ha	8,05%
f. Kecamatan Jelutung	7.617	Ha	4,48%
g. Kecamatan Kotabaru	29.937	Ha	17,62%
h. Kecamatan Paal Merah	19.571	Ha	11,52%
i. Kecamatan Pasar Jambi	1.670	Ha	0,98%
j. Kecamatan Pelayangan	10.689	Ha	6,29%
k. Kecamatan Telanaipura	16.822	Ha	9,90%
	<b>169.887</b>	<b>Ha</b>	<b>100%</b>

Sumber: DPUPR Kota Jambi

Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 103°31'27,19" BT sampai 103°40'51,80" BT dan 01°32'48" LS sampai 01°41'46,07" LS. Berdasarkan data DEM Nasional, wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 5 – 60 meter dari permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Danau Sipin, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur, Paal Merah, Alam Barajo dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut. Secara umum, kondisi topografi Kota Jambi disajikan sebagai berikut:

Topografi	Kemiringan (%)	Persentase
Datar	0-8	61.529%
Landai	8-15	28.570%
Agak Curam	15-25	8.599%
Curam	25-45	1.302%

*Sumber: DPUPR Kota Jambi*

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan Agustus dipengaruhi oleh anomali suhu muka laut positif (lebih hangat daripada normalnya) di Samudera Hindia bagian Timur dan musim kemarau pada bulan Juni dipengaruhi oleh Musim Barat Monsun Timuran.

Selama tahun 2022, keadaan suhu di Kota Jambi antara 23,8°C - 31,9°C, dengan suhu rata-rata 27,2°C. Adapun kelembaban antara 54% - 98%, dengan kelembaban rata-rata 82%. Kecepatan angin antara 1,4m/detik – 10,3m/detik, dengan kecepatan rata-rata 2,1m/detik. Tekanan udara antara 1005mb – 1009,5mb, dengan tekanan udara rata-rata 1007,4mb. Selama tahun 2021, jumlah curah hujan di Kota Jambi 2680,8mm, dengan jumlah hari hujan 244 hari dalam setahun dan penyinaran matahari 50%.

### C. Jumlah Penduduk

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, pada Tahun 2022 jumlah penduduk Kota Jambi berdasarkan data dari BPS Kota Jambi tercatat sebanyak 619.553 jiwa, dengan kepadatan penduduk 3.539 orang/km<sup>2</sup>. Berdasarkan data dari BPS Kota Jambi, jumlah penduduk Kota Jambi berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan dengan *sex ratio* : 101,19.

Adapun jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2022 sebesar 3.631.136 jiwa, dengan persentase penduduk Kota Jambi sebesar 17,06%. Untuk melihat persentase penduduk masing-masing Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi seperti pada tabel di bawah ini :

Jumlah dan Persentase Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Kabupaten	Penduduk (Ribu)	Persentase Penduduk
1	Kerinci	253.863	7,03
2	Merangin	357.577	9,92
3	Sarolangun	298.091	8,19
4	Batang Hari	313.209	8,56
5	Muaro Jambi	412.830	11,35
6	Tanjung Jabung Timur	234,164	6,46
7	Tanjung Jabung Barat	324.456	8,94
8	Tebo	344.816	9,51
9	Bungo	373.344	10,24
10	Kota Jambi	619.553	17,08
11	Kota Sungai Penuh	92.233	2,73

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik. Metode geometri menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometri dengan menggunakan dasar perhitungan majemuk. Laju pertumbuhan penduduk (*rate of growth*) dianggap sama untuk setiap tahun. Pada Tahun 2021 jumlah penduduk Kota Jambi tercatat sebanyak 612.162 jiwa, sementara pada tahun 2022 naik menjadi 619.553 jiwa (BPS Kota Jambi), dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,21 persen.

#### D. Jumlah Kecamatan dan desa/ kelurahan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Kecamatan Kota Baru	a) Kelurahan Suka Karya b) Kelurahan Simpang III Sipin c) Kelurahan Paal V (Lima) d) Kelurahan Kenali Asam Bawah e) Kelurahan Kenali Asam Atas
2	Kecamatan Telanaipura	a) Kelurahan Simpang IV (Empat) Sipin b) Kelurahan Buluran Kenali c) Kelurahan Teluk Kenali d) Kelurahan Penyengat Rendah e) Kelurahan Pematang Sulur
3	Kecamatan Jelutung	a) Kelurahan Jelutung b) Kelurahan Kebun Handil c) Kelurahan Cempaka Putih d) Kelurahan Talang Jauh e) Kelurahan Lebak Bandung f) Kelurahan Payo Lebar g) Kelurahan Handil Jaya
4	Kecamatan Pasar Jambi	a) Kelurahan Pasar Jambi b) Kelurahan Beringin c) Kelurahan Sungai Asam d) Kelurahan Orang Kayo Hitam
5.	Kecamatan Jambi Selatan	a) Kelurahan Pasir Putih b) Kelurahan Tambak Sari c) Kelurahan The Hok d) Kelurahan Wijaya Pura e) Kelurahan Pakuan Baru
6.	Kecamatan Danau Teluk	a) Kelurahan Pasir Panjang b) Kelurahan Tanjung Raden c) Kelurahan Olak Kemang d) Kelurahan Tanjung Pasir e) Kelurahan Ulu Gedong
7.	Kecamatan Jambi Timur	a) Kelurahan Sijenjang b) Kelurahan Kasang Jaya

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Kelurahan Talang Banjar</li> <li>d) Kelurahan Budiman</li> <li>e) Kelurahan Sulanjana</li> <li>f) Kelurahan Kasang</li> <li>g) Kelurahan Tanjung Sari</li> <li>h) Kelurahan Rajawali</li> <li>i) Kelurahan Tanjung Pinang</li> </ul>
8.	<b>Kecamatan Pelayangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kelurahan Arab Melayu</li> <li>b) Kelurahan Mudung Laut</li> <li>c) Kelurahan Tengah</li> <li>d) Kelurahan Tahtul Yaman</li> <li>e) Kelurahan Jelmu</li> <li>f) Kelurahan Tanjung Johor</li> </ul>
9.	<b>Kecamatan Alam Barajo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kelurahan Bagan Pete</li> <li>b) Kelurahan Kenali Besar</li> <li>c) Kelurahan Rawasari</li> <li>d) Kelurahan Beliang</li> <li>e) Kelurahan Mayang Mangurai</li> </ul>
10.	<b>Kecamatan Danau Sipin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kelurahan Legok</li> <li>b) Kelurahan Sungai Putri</li> <li>c) Kelurahan Murni</li> <li>d) Kelurahan Solok Sipin</li> <li>e) Kelurahan Selamat</li> </ul>
11.	<b>Kecamatan Paal Merah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kelurahan Talang Bakung</li> <li>b) Kelurahan Payo Selincah</li> <li>c) Kelurahan Eka Jaya</li> <li>d) Kelurahan Lingkar Selatan</li> <li>e) Kelurahan Paal Merah</li> </ul>

## E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah :

No	NAMA PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretariat Daerah Kota Jambi
2.	Sekretariat DPRD Kota Jambi
3.	Inspektorat Kota Jambi
4.	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kota Jambi
5.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
6.	Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi
7.	Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi
8.	Dinas Pendidikan Kota Jambi
9.	Dinas Kesehatan Kota Jambi
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
11.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi
12.	Dinas Sosial Kota Jambi
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kota Jambi
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
15.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
17.	Dinas Perhubungan Kota Jambi
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi
19.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
22.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi
23.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi
24.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
25.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi
26.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi
27.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi
28.	Kecamatan Kota Baru
29.	Kecamatan Telanaipura
30.	Kecamatan Jelutung
31.	Kecamatan Pasar Jambi
32.	Kecamatan Jambi Selatan
33.	Kecamatan Danau Teluk

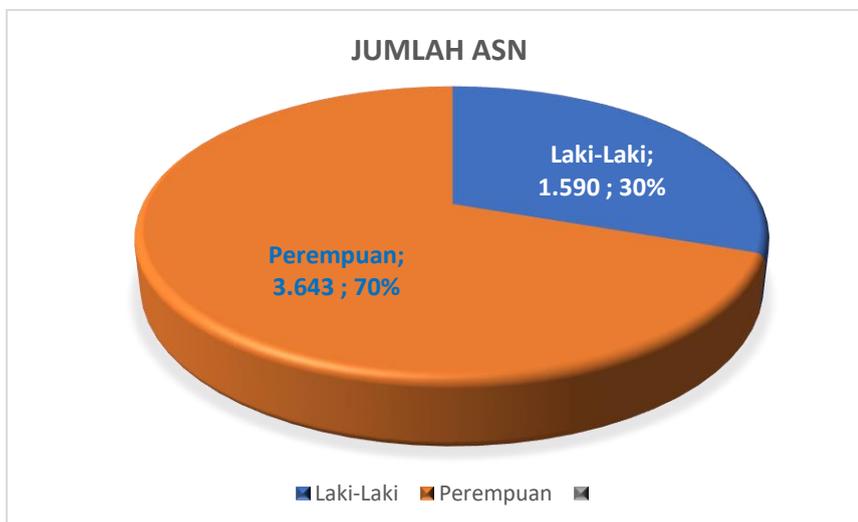
34.	Kecamatan Jambi Timur
35.	Kecamatan Pelayangan
36.	Kecamatan Alam Barajo
37.	Kecamatan Danau Sipin
38.	Kecamatan Paal Merah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jambi berdasarkan data yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi per Desember 2022 adalah sebanyak 5.233 orang. Jumlah ASN sejak tahun 2018 cenderung menurun dikarenakan banyak ASN yang pensiun dan rekrutmen ASN baru tidak lebih banyak dari ASN yang pensiun. Berikut ditampilkan gambar jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2018-2022.



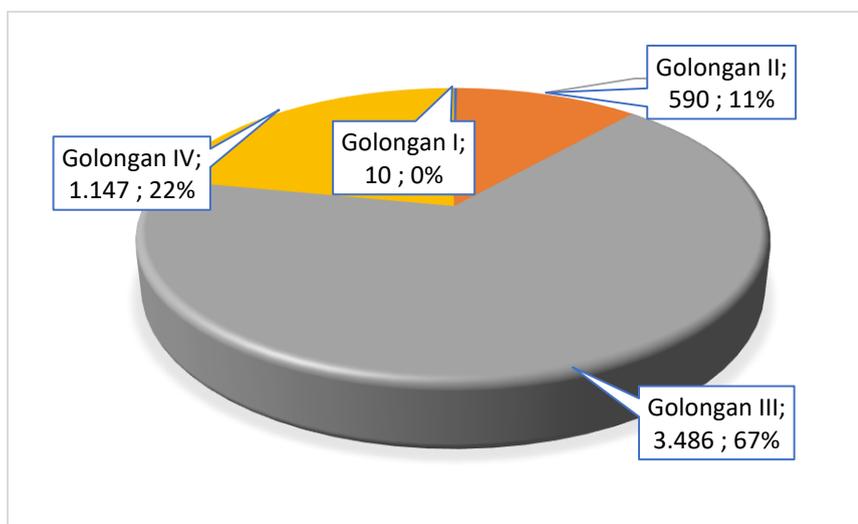
*Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2018-2022*

Untuk melihat komposisi ASN laki-laki dan perempuan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



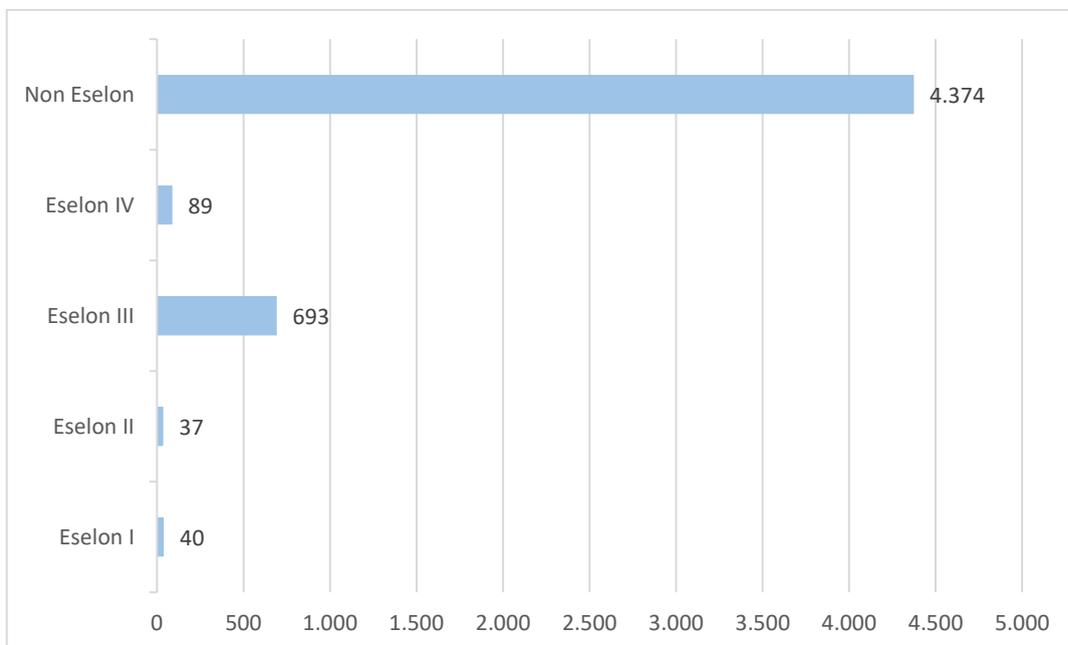
*Komposisi ASN Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2022*

Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2022 berdasarkan golongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



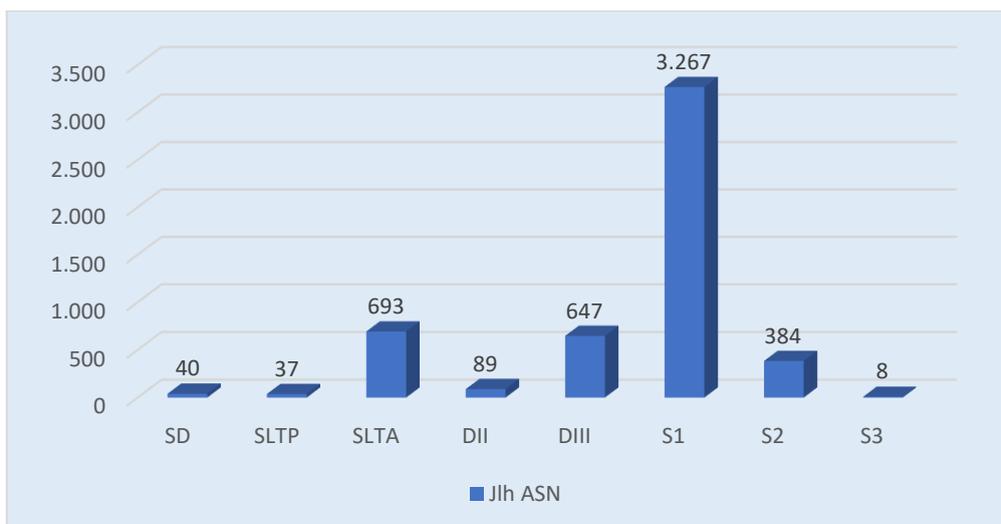
*Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2022 berdasarkan Golongan.*

Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2022 berdasarkan eselon dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



*Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2022 berdasarkan Eselon*

Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



*Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2022 berdasarkan Tingkat Pendidikan*

## F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran berdasarkan Urusan, Program dan Jenis Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.670.844.905.471,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.668.657.255.118,80 (99,87%).

### (a) Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampai dengan tahun 2022 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/ pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

#### Peraturan Daerah Kota Jambi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	DASAR PEMUNGUTAN (Perda Kota Jambi)
1.	Retribusi Tertentu	Perda No.13 Tahun 2017
2.	BPHTB	Perda No. 5 Tahun 2019
3.	Pajak Daerah	Perda No. 6 Tahun 2019
4.	PBB	Perda No. 4 Tahun 2019
5.	Retribusi Jasa Usaha	Perda No. 7 Tahun 2020
6.	Retribusi Jasa Umum	Perda No. 6 Tahun 2020

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi berupa optimalisasi penerimaan, dengan memperkuat pelayanan dan proses pemungutan, meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi, efisiensi administrasi dan menekan biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya sebagai berikut :

- Meningkatkan Pelayanan Perpajakan;
- Meningkatkan Sosialisasi Pajak Daerah;
- Terus Melakukan proses pendataan objek pajak daerah;
- Pemutakhiran Data Wajib Pajak;
- Mengoptimalkan Penagihan Piutang Pajak Daerah;
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah;
- Melaksanakan tertib administrasi Pengelolaan Pajak Daerah dan administrasi tunggakan Pajak Daerah;
- Mengevaluasi Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku;
- Melaksanakan Pendampingan oleh KPK dalam rangka upaya penagihan Pajak Daerah;
- Koordinasi lintas Organisasi Perangkat daerah;
- Peningkatan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah.

Adapun Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari:

- Hasil Pajak Daerah;
- Hasil Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2022 mencapai Rp. 436.885.456.388,00 atau 91,18% dari target sebesar Rp.479.170.812.838,00 dan memberikan kontribusi sebesar 26,18% terhadap total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2021, yakni sebesar Rp.384.730.643.791,46, maka PAD Tahun 2022 meningkat 13,56% atau naik sebesar Rp.52.154.812.596,54.

Tabel berikut menunjukkan target dan realisasi PAD Tahun 2022.

**Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2022 (Sebelum audit BPK RI)**

No	Uraian	Realisasi 2021 (000)	Target 2022 (000)	Realisasi 2022 (000)	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	244.726.978,0	320.380.000,0	301.796.809,1	94,20%
2.	Retribusi Daerah	51.844.265,4	50.544.550,0	40.216.623,3	79,57%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.638.772,8	9.602.267,4	10.528.936,3	109,65%
4.	Lain-lain PAD yang sah	78.520.627,5	98.643.995,5	84.343.087,6	85,50%
<b>TOTAL</b>		<b>384.730.643,8</b>	<b>479.170.812,8</b>	<b>436.792.825,4</b>	<b>91,18%</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023 (Sebelum audit BPK RI)

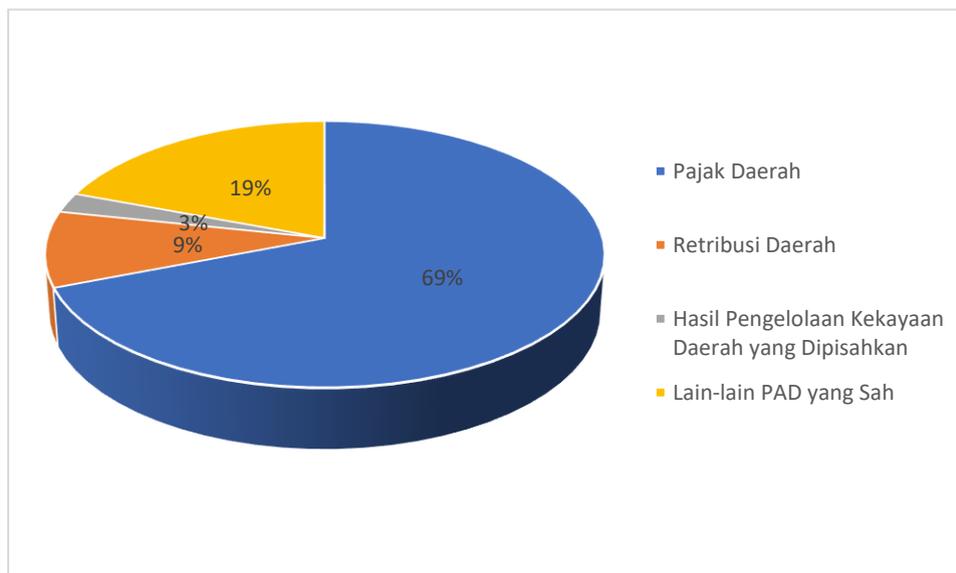
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 320.380.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 301.796.809.124,00 atau 94,20%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp. 50.544.550.000,00 terealisasi sebesar Rp. 40.216.623.270,14 atau 79,57%. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 9.602.267.383,00 terealisasi sebesar Rp. 10.528.936.340,30 atau 109,65%. Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 98.643.995.455,00 terealisasi sebesar Rp. 84.343.087.653,56 atau 85,50%

Gambar berikut menunjukkan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2022.



*Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2022*

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi TA 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



*Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2022*

#### b. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer

Sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer terdiri dari:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pada Tahun 2022 target penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp. 1.191.674.092.633,00 dan realisasinya mencapai Rp. 1.230.873.892.188,00 atau 103,29%. Tabel berikut menunjukkan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2022.

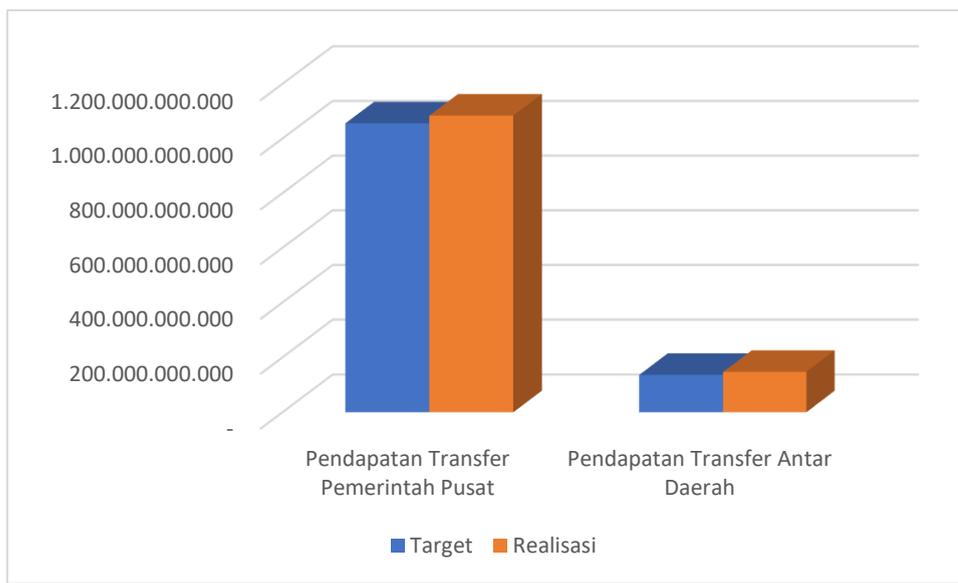
#### Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 (Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian	Realisasi 2021 (000)	Target 2022 (000)	Realisasi 2022 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.070.421.415,8	1.055.509.404,7	1.083.896.725,0	102,69
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	135.605.386,9	136.164.687,9	146.977.167,1	107,94
<b>TOTAL</b>		<b>1.191.458.974,8</b>	<b>1.191.674.092,6</b>	<b>1.230.873.392,2</b>	<b>103,29</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022 (Sebelum audit BPK RI)

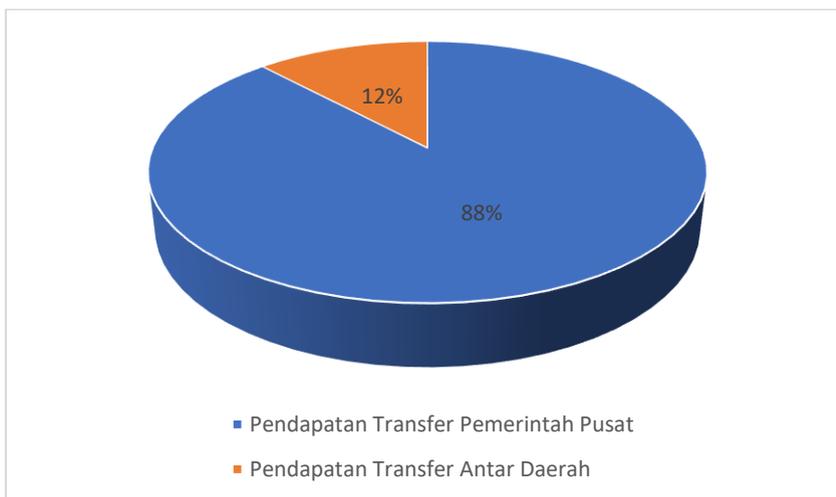
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 target pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebesar Rp.1.055.509.404.731,00 realisasinya mencapai Rp.1.083.896.725.044,00 atau 102,69%. Target pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.136.164.687.902,00 terealisasi sebesar Rp.146.977.167.144,00 atau 107,94%

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2022.



*Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2022*

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



*Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2022*

### c. Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah;
- Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0 terealisasi sebesar Rp. 897.906.542,80. Tabel berikut menunjukkan Target dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022.

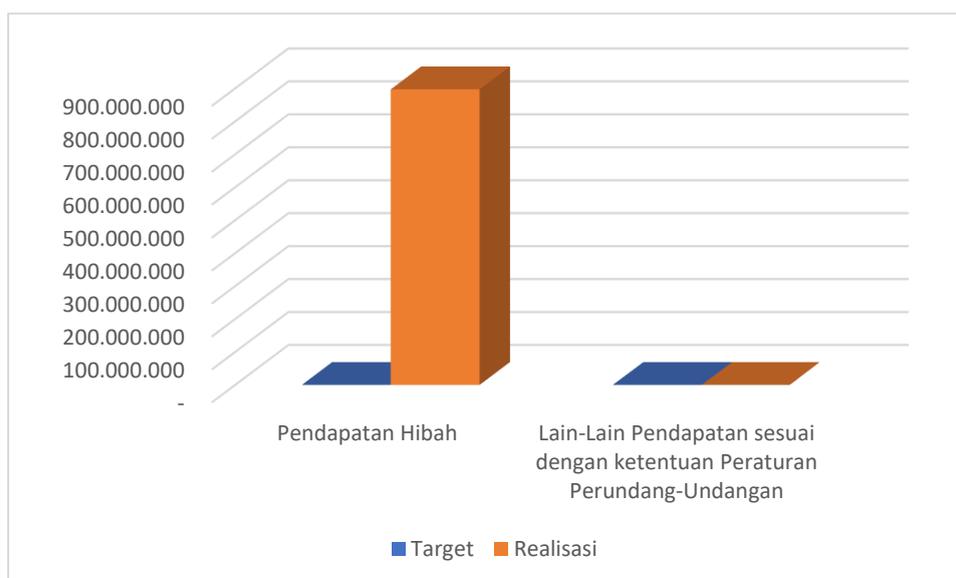
**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022  
(Sebelum audit BPK-RI)**

No	Uraian	Realisasi 2021 (000)	Target 2022 (000)	Realisasi 2022 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	702.908.280	0	897.906.542,80	-
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	61.488.094.937	0	0	-
<b>TOTAL</b>		<b>62.191.003,217</b>	<b>0</b>	<b>897.906.542,80</b>	<b>-</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023 (Sebelum audit BPK RI)

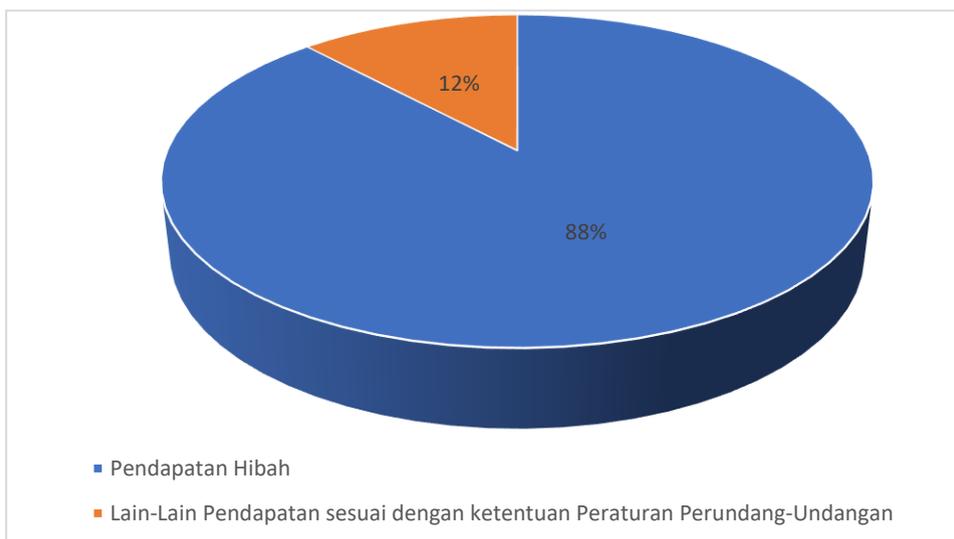
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 target penerimaan Pendapatan Hibah adalah sebesar Rp. - terealisasi sebesar Rp.897.000.000,00. Target penerimaan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. - terealisasi sebesar Rp. -

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2022.



Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2022

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2022 disajikan pada gambar di bawah ini.



*Persentase Distribusi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2022*

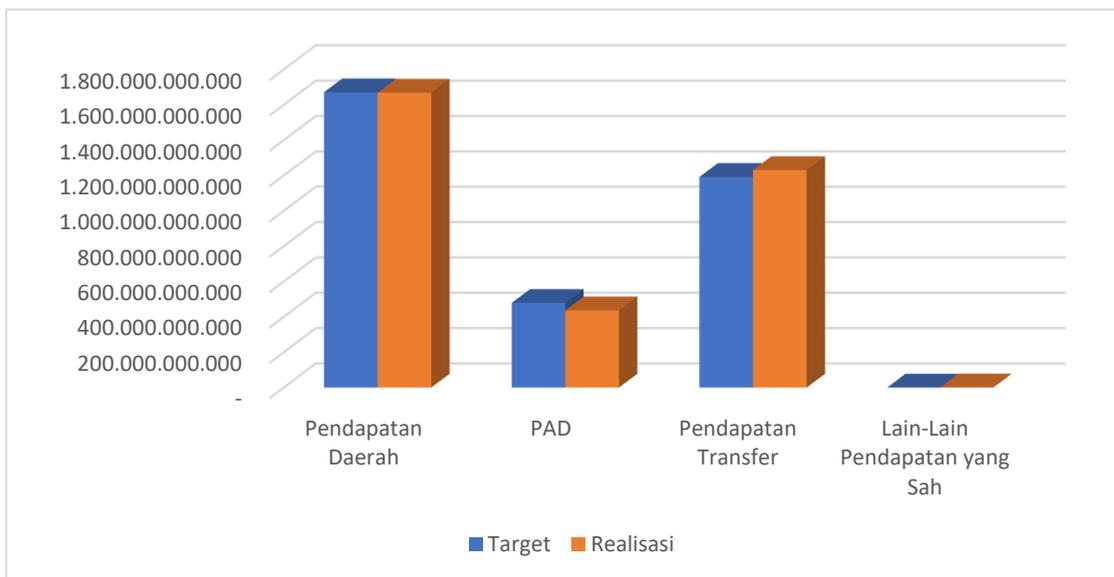
Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2022 adalah Rp. 1.668.657.255.118,80 atau terealisasi 99,87% dari target sebesar Rp. 1.670.844.905.471,00. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2022 (Sebelum audit BPK-RI)**

No	Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	PAD	479.170.812.838,00	436.885.456.388,00	91,16
2	Pendapatan Transfer	1.191.674.092.633,00	1.230.873.892.188,00	103,29
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	897.906.542,80	-
	<b>Total</b>	<b>1.670.844.905.471,00</b>	<b>1.668.657.255.118,80</b>	<b>99,87</b>

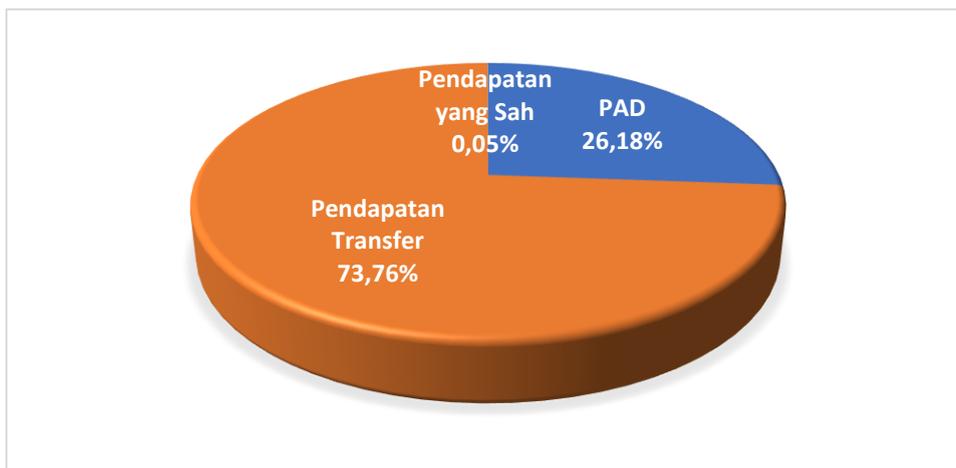
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023 (Sebelum audit BPK RI)

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2022.



*Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2022*

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



*Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2022*

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 26,18% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022. Adapun Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar, yaitu 73,76%, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menyumbang 0,05%.

## Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

3.119,00 atau 48,61%.

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.812.932.658.629,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.622.847.432.178,57 (89,52%) yang terdiri dari:

- Belanja Operasi
- Belanja Modal; dan
- Belanja Tidak Terduga.
- Belanja Transfer

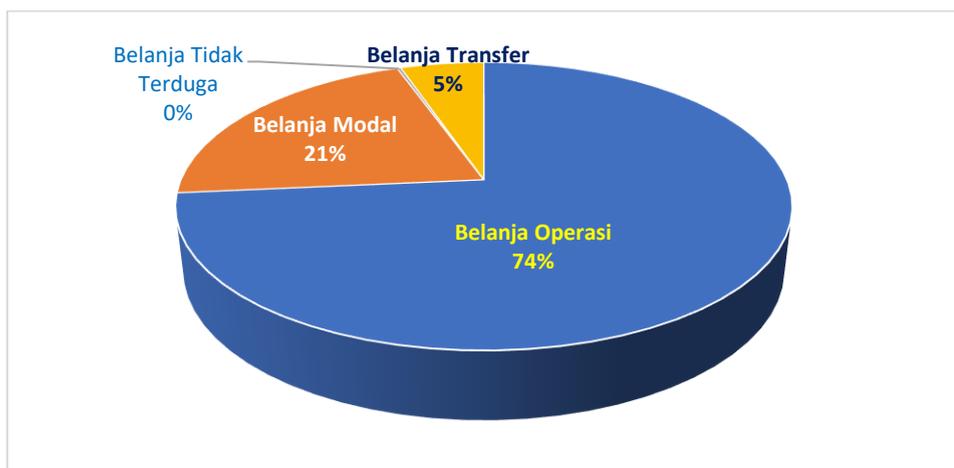
Tabel berikut menunjukkan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022.

**Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022 (Sebelum audit BPK RI)**

No	Uraian	Realisasi 2021 (000)	Target 2022 (000)	Realisasi 2022 (000)	% Realisasi
1.	Belanja Operasi	1.238.942.121,7	1.406.586.331,3	1.250.909.815,8	88,93
2.	Belanja Modal	495.805.792,0	401.829.682,3	368.629.083,2	91,74
3	Belanja Tidak Terduga	5.062.503,1	4.416.645,0	3.208.533,1	72,65
4	Belanja Transfer	-	100.000.000,0	100.000.000,0	100
<b>Total Belanja Daerah</b>		<b>1.740.357.878,0</b>	<b>1.812.932.658,6</b>	<b>1.622.847.432,1</b>	<b>89,52</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 target Belanja operasi adalah sebesar Rp. 1.406.586.331.342,00 terealisasi sebesar Rp. 1.250.910.205.843,08 atau 88,93%. Target Belanja Modal pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 401.829.682.271,00 terealisasi sebesar Rp. 368.629.083.248,49 atau 91,74%. Target Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.4.416.645.016,00 terealisasi sebesar Rp.3.208.533.087,00 atau 72,651%. Target Belanja Transfer pada Tahun 2022 adalah Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,00

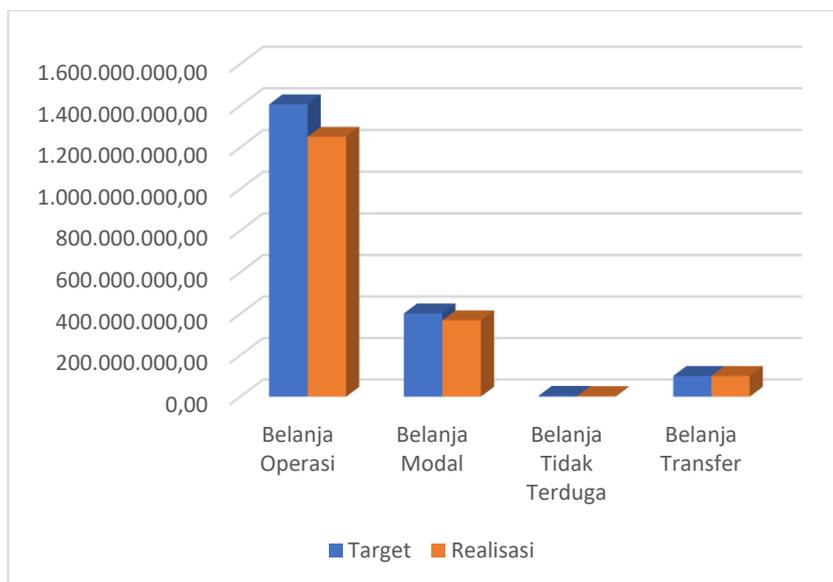
Untuk melihat komposisi besaran belanja daerah Kota Jambi TA 2022, seperti pada gambar di bawah ini.



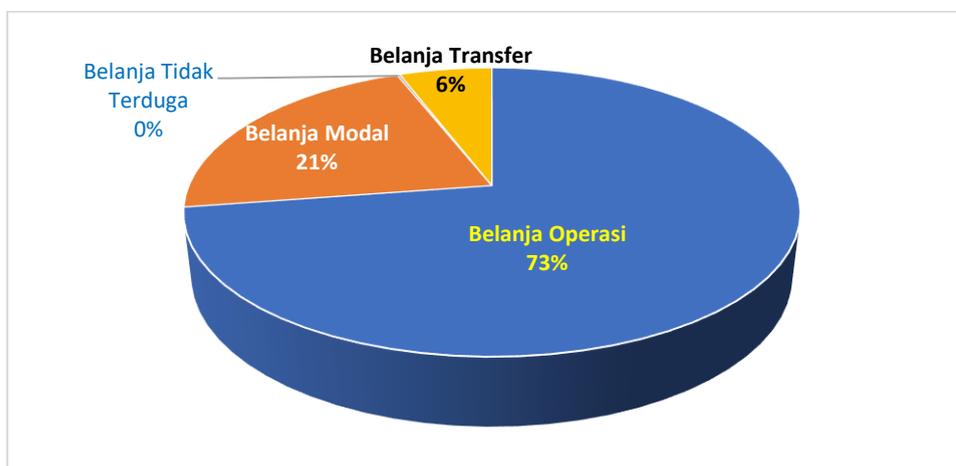
*Komposisi Besar Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2022*

Dari gambar di atas terlihat bahwa komposisi persentase besaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar 74%. Sedangkan Belanja modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar 21% dan belanja transfer sebesar 5%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2022.



Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



*Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2022*

**a. Belanja Operasi**

Belanja Operasi pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.406.586.331.342,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.250.910.305.843,08 atau 88,93% dengan rincian pada tabel berikut.

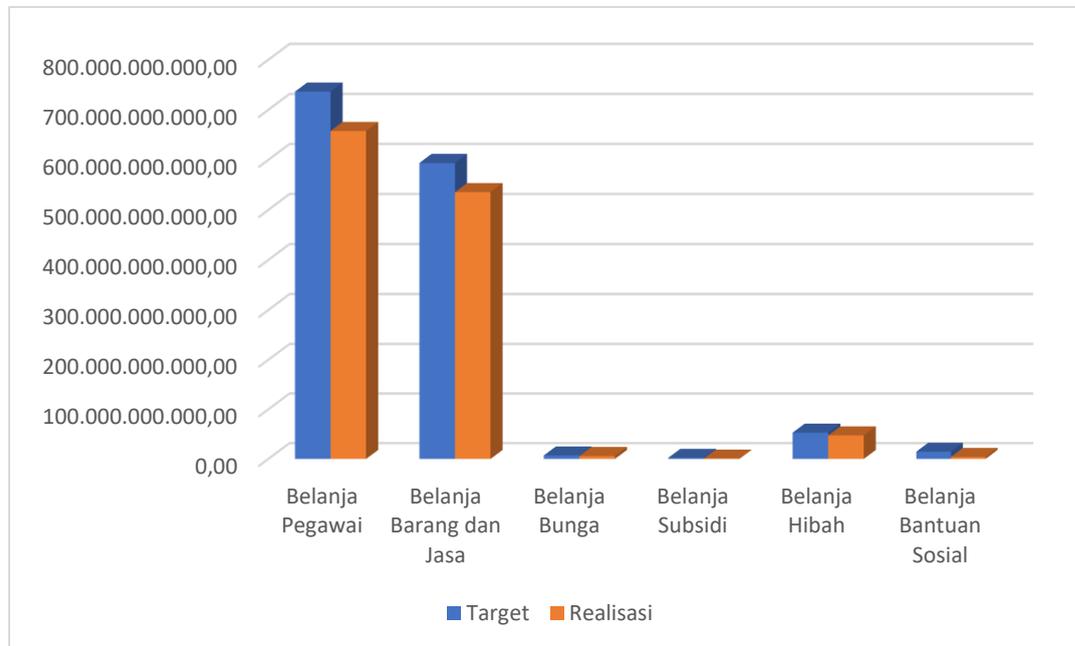
**Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi  
Tahun Anggaran 2022 (Sebelum audit BPK RI)**

No	Uraian Belanja	Belanja Operasi		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	736.429.689.205,00	657.648.319.579,50	89,30
2.	Belanja Barang dan Jasa	593.746.544.387,00	535.487.916.812,58	90,19
3.	Belanja Bunga	6.901.104.160,00	5.866.774.340,00	85,01
4.	Belanja Subsidi	2.100.000.000,00	614.964.000,00	29,28
5.	Belanja Hibah	52.968.676.490,00	47.357.346.311,00	89,41
6.	Belanja Bantuan Sosial	14.440.317.100,00	3.934.494.800,00	27,25
<b>Total Belanja Operasi</b>		<b>1.406.586.331.342,00</b>	<b>1.250.909.815.843,08</b>	<b>88,93</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.736.429.689.205,00 terealisasi sebesar Rp. 657.648.319.579,50 atau 89,30%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.593.746.544.387,00 terealisasi sebesar Rp.535.487.916.812,58 atau 90,19%. Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp.6.901.104.160,00 terealisasi sebesar Rp.5.866.774.340,00 atau 85,01%. Anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp.2.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 614.964.000,00 atau 29,28%. Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp.52.968.676.490,00 terealisasi sebesar Rp.47.357.346.311,00 atau 89,41%. Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.14.440.317.100,00 terealisasi sebesar Rp.3.934.494.800,00 atau 27,25%

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2022.



*Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2022*

#### b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.401.829.682.271,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.368.629.083.248,49 atau 91,74%. Adapun perincian Belanja modal pada T.A. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

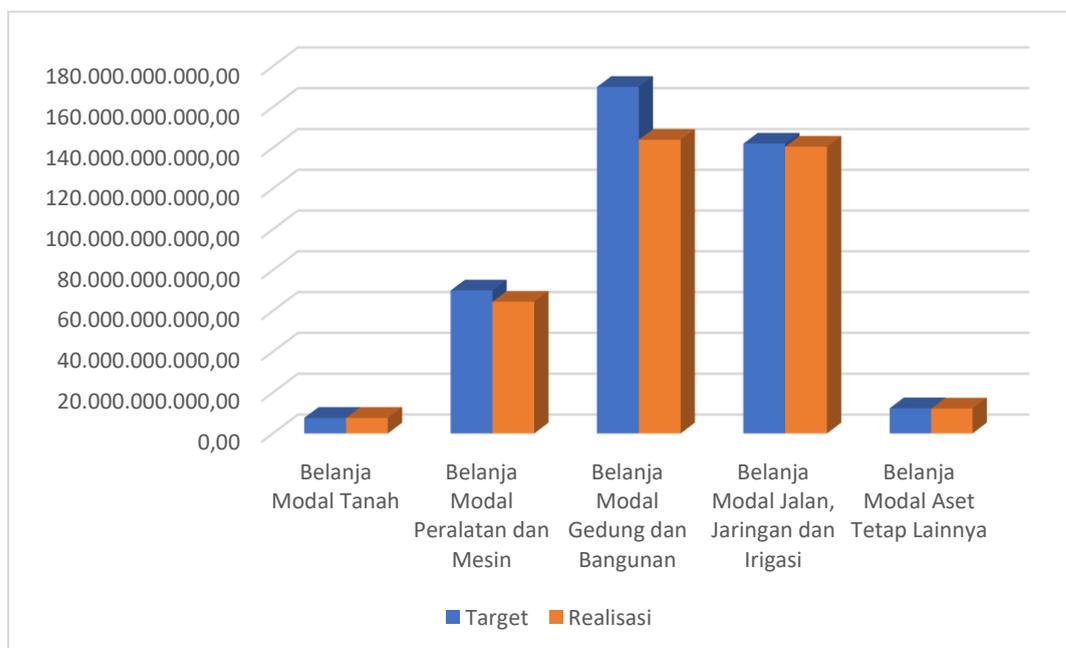
**Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi  
Tahun Anggaran 2022 (Sebelum audit BPK RI)**

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Tanah	7.600.000.000,00	7.565.000.000,00	99,54
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.009.502.815,00	64.474.137.348,49	92,09
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	169.850.261.130,00	143.907.007.228,00	84,73
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	142.063.825.839,00	140.522.841.590,00	98,92
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.306.092.487,00	12.160.097.082,00	98,81
<b>Total Belanja Modal</b>		<b>401.829.682.271,00</b>	<b>368.629.083.248,49</b>	<b>91,74</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023 (Sebelum audit BPK RI)

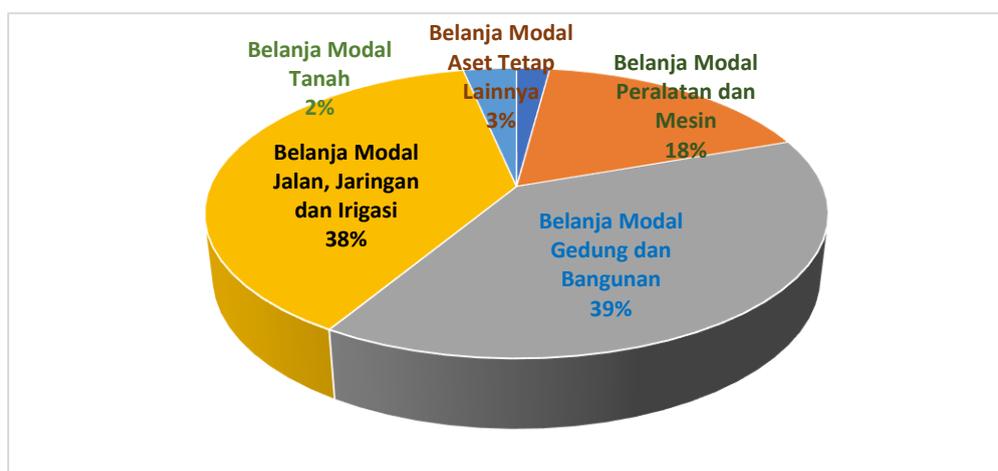
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp.7.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.565.000.000,00 atau 99,54%. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.70.009.502.815,00 terealisasi sebesar Rp.64.474.137.348,49 atau 92,09%. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.169.850.261.130,00 terealisasi sebesar Rp.143.907.007.228,00 atau 84,73%. Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.142.063.825.839,00 terealisasi sebesar Rp.140.522.841.590,00 atau 98,92%. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.12.306.092.487,00 terealisasi sebesar Rp. 12.160.097.082,00 atau 98,81%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022.



*Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022*

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



*Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal  
Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022*

**c. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

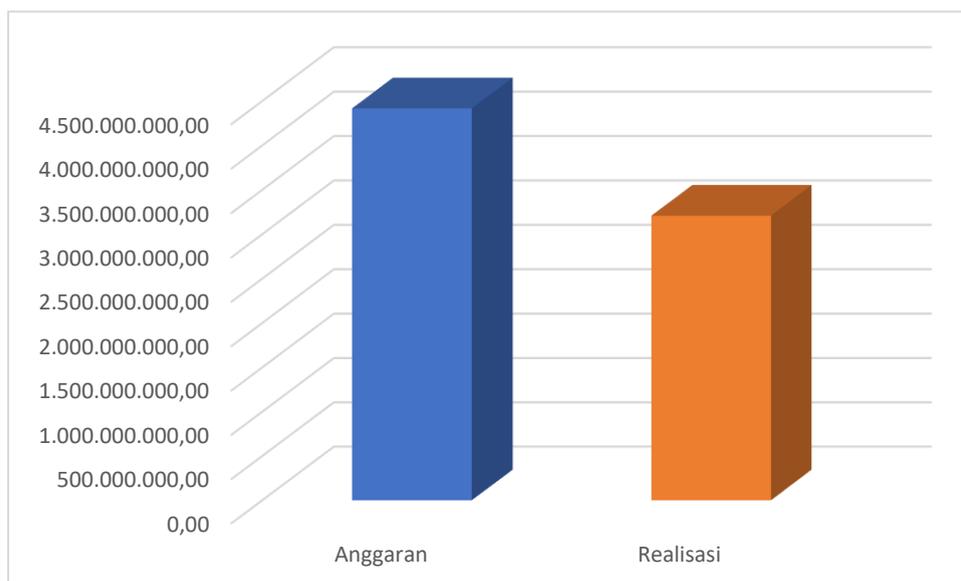
Belanja tidak terduga pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.4.416.645.016,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.3.208.533.087,00 atau 72,65%. Adapun perincian Belanja Tidak Terduga pada T.A. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi  
Tahun Anggaran 2022 (Sebelum audit BPK RI)**

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Terduga	4.416.645.016,00	3.208.533.087,00	72,65
	<b>Total Belanja Tidak Terduga</b>	<b>4.416.645.016,00</b>	<b>3.208.533.087,00</b>	<b>72,65</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.4.416.645.016,00 terealisasi sebesar Rp.3.208.533.087,00 atau 72,65%. Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Jambi T.A 2022.



*Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi T.A 2022*

## Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah disebut dengan Pembiayaan Netto.

Pada tahun 2022, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp.159.678.657.158,00. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.73.000.000.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

### Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 (Sebelum audit BPK RI)

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
Penerimaan Pembiayaan	215.087.753.158,00	215.092.419.627,49
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	159.678.657.158,00	159.683.323.627,49
Penerimaan Pinjaman Daerah	55.409.096.000,00	55.409.096.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	73.000.000.000,00	73.000.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	142.087.753.158,00	142.092.419.627,49
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(142.087.753.158,00)	45.809.822.940,23
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	-	<b>187.902.242.567,72</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023 (Sebelum audit BPK RI)

## 1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apayang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan *pembangunan* daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidakdimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalankinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan *stakeholder* lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya sesuai dengan Undang- Undangnomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

#### 1. *Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Upaya mengukur profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. IP ASN ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatiftingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian danevaluasi dalam rangka pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indikatorpengukuran profesionalitas ASN meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: a) Kualifikasi 25%, b) Kompetensi 40%, c) Kinerja 30% dan d) Disiplin 5%. Posisi IP ASN Kota

Jambi pada tahun 2018 sebesar 68, yang berarti berada pada kategori ‘Rendah’. Rendahnya profesionalitas ASN ini secara umum disebabkan oleh belum optimalnya dimensi kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN. Upaya Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan indeks tersebut adalah meningkatkankualifikasi ASN (pendidikan formal/tugas belajar bagi ASN) dan kompetensi (kompetensi tekhnis, manajerial maupun sosial kultural).

## **2. Masih Tingginya Jumlah Pelanggaran Terhadap PERDA**

Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota pada tahun awal RPJMD sebesar 82%. Tingginya angka tersebut dikarenakan belum optimalnya sosialisasi terkait perda tersebut dan ketidakpahaman serta kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat terkait perda-perda yang berlaku. Namun dalam hal tersebut pemerintah kota jambi melalui dinas-dinas terkait telah melakukan upaya yang maksimal dalam penegakan perda tersebut.

## **3. Belum Tercapainya respon time penanganan bencana dan penyelamatan**

Respon time penanganan bencana dan penyelamatan merupakan salahsatu permasalahan dikota jambi. Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Permasalahan ini terjadi dikarenakan kurangnya armada, posko-posko kendali kebakaran yang belum maksimal, serta masih banyak permukiman yang tidak mampu dilewati oleh armada kebakaran.

## **4. Adanya Potensi Konflik**

Konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh pluralitas disumbang dari berbagai wilayah, termasuk Kota Jambi. Kota Jambi berpotensi mendapatkan konflik sosial secara horizontal. Potensi konflik tersebut disumbang dari perbedaan yang ada dalam masyarakat, terutama sengketa pendirian rumah ibadah.

## **5. Masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas**

Dengan perkembangan yang terjadi khususnya di Kota Jambi salah satunya adalah perkembangan lalu lintas. Kita tahu bahwa dengan terjadinya perkembangan lalu lintas maka pasti ada yang namanya masalah yang perlu diatasi oleh pihak siapapun yang ingin bersimpatik termasuk masyarakat dan mahasiswa secara khususnya dan secara luasnya adalah pemerintah yang terkait. Masalah yang benar-benar diperhatikan dikota besar adalah salahsatunya masalah lalu lintas termasuk pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan manusia sendiri. Hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan dilingkungan masyarakat apalagididaerah yang sudah maju dan berkembang. Setiap tahunnya juga jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak hal seperti : pengemudi kendaraan yang buruk, bus besar atau kecil yang sembarangan parkir, ketidakteratur antara transportasi yang besar

dan yang kecil atau tidak sesuai dengan luas jalan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, jalanan yang tidak layak seperti jalan yang berlubang, kerusakan kendaraan, kendaraan yang sudah tidak layak lagi pakai, pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan masih banyak lagi yang menimbulkan masalah pelanggaran lalu lintas yang telah ditentukan pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Pelanggaran lalu lintas termasuk masalah transportasi yang sangat berpengaruh terhadap pelanggaran sosial, karena dapat merugikan beberapa pihak dan kalangan yang berkaitan.

#### **6. Minimnya kecepatan tempuh rata - rata (pada saat tertentu)**

Permasalahan Minimnya kecepatan tempuh rata-rata (pada saat tertentu) disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan populasi, pesatnya tingkat pertumbuhan jumlah dan kepemilikan kendaraan pribadi, urbanisasi dan sistem angkutan umum yang kurang memadai. Pesatnya jumlah kendaraan pribadi yang berada di Kota Jambi terlihat dalam lima tahun terakhir pertumbuhan kendaraan roda dua berdasarkan data pada BPS Kota Jambi mencapai 28,68 persen pertahun dan roda empat 26,42 persen, sehingga menyebabkan meningkatnya volume lalu lintas. Adapun penyebab lainnya yakni dikarenakan

#### **7. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman**

Persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Misalnya yaitu, pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan jalanan kota. Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa kemiskinan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterakan.

Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan. Terbentuknya permukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slum area* sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan.

## **8. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni**

Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan prioritas kebutuhan manusia/masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman

serasi, dan teratur. Pemerintah beranggapan bahwa masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggung jawab individual dalam hal ini dilaksanakan secara swadaya oleh masing-masing rumah tangga. Oleh karenanya berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan Rumah Layak Huni.

Pengentasan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan Nasional. Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan telah dirancang dan dilaksanakan. Salah satu program adalah program Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah

Pemenuhan layanan air bersih dan air limbah pada masyarakat perkotaan merupakan kebutuhan dasar yang akan berkaitan langsung kepada derajat kesehatan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong terwujudnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kompetitif. Saat ini cakupan layanan air minum Jambi baru mencapai 77% atau masih ada 23% masyarakat yang masih memanfaatkan air tanah atau sumber lainnya, sedangkan untuk layanan air limbah saat ini baru mencapai 0,39% yang mencapai akses sanitasi layak berdasarkan SNI. Hal ini tercermin dari masih banyaknya tanki septic yang digunakan masyarakat Kota Jambi tidak kedap air dan relative jarang disedot secara berkala. Sedangkan untuk air minum perluasan jaringan masih terkendala dengan usia pipa asbes yang tidak mampu dialiri dengan tekanan relative tinggi untuk daerah yang jauh dan relative tinggi secara topografi (bagian selatan Kota Jambi). Untuk itu kedepan Pemerintah Kota Jambi merencanakan akselerasi perluasan layanan air limbah melalui pembangunan IPAL terpusat dan peningkatan sistem pengangkutan dan pengolahan setempat. Sedangkan untuk memperluas cakupan dan peningkatan kualitas layanan air minum pemerintah kota jambi akan berupaya melakukan peremajaan jaringan dan penguatan sistem produksi maupun distribusi.

### **9. Rendahnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Infrastruktur Jalan**

Penanganan jalan di Kota Jambi di bagi atas dua fokus, yaitu jalan status kota dan jalan non status atau yang dikenal sebagai jalan lingkungan. Untuk kondisi jalan status kota relative dalam kondisi cukup baik yaitu mencapai 86,32%,

namun demikian kondisi ini masih memerlukan peningkatan kapasitas, disampingmeningkatkan kualitas jalan dalam kondisi baik, jalan perkotaan masih memerlukan pelebaran- pelebaran untuk mengantisipasi jumlah kendaraan yang bertambah seiring kemajuan kota. Sedangkan untuk penanganan jalan lingkunganjuga diperlukan mengingat perkembangan pesat beberapa pusat-pusat pemukiman dan kegiatan di Kota Jambi sebagai *trigger* sebaran pengembangan kawasan.

### **10. Banyaknya titik genangan/banjir di Kota Jambi**

Pesatnya pembangunan Kota Jambi dalam beberapa tahun terakhir tentunya tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga berdampak langsung pada menurunnya kemampuan drainase perkotaan menerima debit air yang masuk ke drainase yang tidak lagi terserap alami kedalam tanah akibat ruanyang terbangun. Hal ini diperparah dengan kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan curah hujan lebih tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya 19 titik genangan di Kota Jambi. Untuk itu kedepan Kota Jambi akan melakukan langkah-langkah penangan yang komprehensif untuk mengatasi persoalan tersebut dimulai dari peningkatan kerjasama penanganan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholder lainnya hingga kedalam rekayasa teknis untuk mengendalikan debit air yang ditampung dalam drainase perkotaan hingga peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang kota.

### **11. Belum terwujudnya harmonisasi ruang kota**

Ruang Kota yang harmonis tentunya merupakan harapan dari setiap masyarakat perkotaan. Sebuah kota yang nyaman untuk ditempati, mendukung aktifitas ekonomi serta mampu menginspirasi setiap orang yang datang merupakan impian dari banyak kota di dunia. Sebelum menuju titik tersebut, tentunya kota tersebut harus terbebas dari segala macam persoalan seperti banjir, titik kemacetan, kualitas udara hingga ke persolaan batas-batas wilayah administrative yang memang merupakan persoalan yang berkaitan erat dengan penataan dan pemanfaatan ruang kota. Untuk itu diperlukan penguatan komitmenPemerintah Kota Jambi dalam peningkatan kualitas perencanaan tata ruangmelalui regulasi, control pemanfaatan ruang serta pengawasan terhadappelanggaran- pelanggaran tata ruang yang melibatkan setiap lapisan aparatur Pemerintahan .

## 12. Rendahnya rasio RTH publik

Uraian	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Kota Jambi	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533
Luas RTH (Ha)	1.175,40	1.193,72	1.212,05	1.272,14	1.290,47	1.609,53	1.844,47
Ratio RTH (%)	6.70	6.81	6.91	7.26	7.36	9.18	10.52

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2018.

Tingginya harga dan terbatasnya lahan merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target perluasan, pengembangan dan perlindungan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sebagaimana tergambar pada tabel di atas rasio RTH di Kota Jambi pada Tahun 2018 baru mencapai 10,52% atau seluas 1.844,47 ha. Hal ini tentunya masih jauh dari arahan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu RTH publik 20% dan Privat 10% dari luasan wilayah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi adalah melakukan pendataan RTH publik dan privat yang terdigitasi dengan baik untuk mendapatkandata yang lebih valid dan terkini. Perluasan RTH publik direncanakan dengan terus melaksanakan “*land banking*” setiap tahunnya, untuk kepentingan prasarana dan sarana umum. Pemanfaatan lahan pekarangan, ruang terbuka pada bangunan dan lingkungan, serta lahan-lahan publik yang masih tersedia untuk meningkatkanutupan lahan, dengan penanaman vegetasi tanaman dan pohon yang berdaun lebat dan berimplikasi pada volume tutupan lahan.

Indeks kinerja tutupan lahan sangat mempengaruhi indeks kualitas udaradan air pada kinerja lingkungan hidup Kota Jambi. Oleh karenanya, mewujudkan rasio ruang terbuka hijau dan indeks kinerja tutupan lahan akan menjadi tantangandan permasalahan pembangunan perkotaan Kota Jambi yang berkelanjutan.

## 13. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah

Penanganan sampah selama 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan dengan asumsi volume timbulan sampah sebesar 2,5 lt/orang/hari. Volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo sama dengan volume sampah terangkut, rata-rata pada Tahun 2017 sebesar 163 Ton/har

### Persentase Penanganan Sampah Kota Jambi

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Sampah yang ditangani	410.260	438.520	454.148	459.891	571,222
2.	Volume Produksi Sampah	560.037	566.594	574.072	581.326	587,254
3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	73,26	77,35	79,11	79,11	75,27
4.	Jumlah TPS	455	445	445	445	445
5.	Jumlah Daya Tampung TPS (m <sup>3</sup> /hari)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
6.	Jumlah Penduduk	591.134	597.043	604.923	611.353	618,814
7.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2022

Di dalam manajemen pengelolaan persampahan, terdapat pola perlakuan terhadap sampah yaitu dari pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan mobilisasi, pengolahan dan pemrosesan akhir. Saat ini, cakupan penanganan persampahan di Kota Jambi telah mencapai penanganan 75,27% dari keseluruhan cakupan pelayanan. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan tidak saja ditekankan pada penanganan, akan tetapi juga pada pengurangan sampah di titik sumber atau rumah tangga. Hingga akhir tahun 2021, perlakuan pengurangan sampah di titik sumber atau rumah tangga, dengan mendorong berfungsi secara aktif sebanyak 445 jumlah TPS.

Pemerintah Kota Jambi telah merumuskan Kebijakan Strategis Daerah Pengelolaan Persampahan, dengan meningkatkan target pengurangan sampah di tingkat rumah tangga hingga 30% pada akhir tahun 2030, serta mengoptimalkan penanganan sampah yang terpilah, modern dan berkelanjutan. Hal ini adalah pekerjaan rumah yang besar dalam mengoptimalkan pelayanan dan utilitas perkotaan di bidang persampahan. Tekanan pembangunan yang berdampak pada peningkatan luasan kawasan terbangun dan timbulan sampah, membutuhkan pengelolaan persampahan yang efektif.

Tidak saja pada pengelolaan terhadap limbah atau sampah yang bersumber dari rumah tangga, Pemerintah Kota Jambi juga mempunyai potensi permasalahan yang timbul dari timbulan limbah B3 di Kota Jambi yang terus meningkat, seiring pertumbuhan aktifitas ekonomi dan industri.

#### **14. Menurunnya kualitas Lingkungan Hidup**

Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup di Kota Jambi ditunjukkan oleh Indeks Kinerja Lingkungan Hidup yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Cukup signifikan penurunan IKLH Kota Jambi rata-rata selama 5 Tahun terakhir yaitu 0,64 poin tiap tahunnya. Penurunan kualitas air dan udara di Kota Jambi menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan kota, serta tekanannya terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Jambi. Tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup oleh pembangunan perkotaan dapat diantisipasi dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sesuai kaidah tata ruang, serta komitmen penuh dari seluruh stakeholder untuk tetap melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Jambi dalam setiap aktifitas sosial, budaya dan ekonominya.

Pemerintah Kota Jambi telah berupaya merumuskan kebijakan dan implementasinya untuk tetap menjaga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Jambi. Peningkatan IKTL melalui penanaman vegetasi hijau pada median jalan, pedestrian, fasilitas publik yang telah diserahkan kepada pemerintah, dan bahkan pada ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Kota Jambi. Akan tetapi, tekanan terhadap kualitas air dan udara tetap mendorong IKLH Kota Jambi mengalami penurunan hingga pada titik 50,31 poin, jauh di bawah batas ambang bawah (threshold index) skala nasional 66,46 poin, dalam kategori cukup.

#### **15. Lemahnya tata niaga perdagangan**

Permasalahan lemahnya tata niaga perdagangan disebabkan antara lain kurangnya koordinasi antar Instansi Pemerintah terkait distribusi perdagangan, pembangunan atau revitalisasi Sarana dan prasarana perdagangan sebaiknya berdasarkan SNI, kondisi saat ini Kota Jambi memiliki pasar daerah sebanyak 21 unit yang terdiri dari 7 unit pasar tradisional/rakyat dan 14 unit pasar tematik, idealnya untuk Kecamatan terdapat 1 pasar rakyat, juga belum meratanya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam hal tera/tera ulang.

#### **16. Belum optimalnya pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan**

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian, situasi kemandirian pangan di Kota Jambi Tahun 2017 adalah: dari segi ketersediaan Energi Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.459 kkal/kap/hari (103,9% AKE) dari angka kecukupan energi yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari; dari segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 63,57 gr/kap/hari (109% AKP) dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 63 gr/kap/hari; dari segi ketersediaan

Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 59,12 gr/kap/hari (124% AKL) dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 47,34 gr/kap/hari, dan skor PPH 89,70.

Kendati demikian, perubahan masa tanam dan panen yang disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca, saat ini sangat berdampak pada kelangkaan bahan pangan pada bulan-bulan tertentu. Demikian pula perlunya kesiapan Pemerintah Kota Jambi untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan ini agar tidak terjadi lonjakan harga pangan (Volatile Food), yang akan berdampak pada inflasi bahan pangan.

#### **17. Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan**

Komponen pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen besar, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. APBD Kota Jambi beberapa tahun terakhir selalu berada di atasangka 1,6 Triliun. Dari total APBD Kota Jambi, sebagian besar masih didominasi oleh Dana Perimbangan, baik itu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika dilihat dari proporsi secara persentase, dana Perimbangan menempati persentase tertinggi diikuti oleh PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kemandirian daerah dapat dilihat dari seberapa besar daerah tersebut bisa membiayai APBD dari PAD. Beberapa tahun terakhir, rata-rata PAD Kota Jambi berkisar antara angka 18%-26% dari total APBD Kota Jambi. Namun demikian, Pemerintah Kota Jambi selalu berkomitmen untuk meningkatkan PAD dari tahun ke tahun dengan mengupayakan intensifikasi maupun ekstensifikasi dan juga bekerjasama dengan berbagai pihak dan memanfaatkan teknologi, hal ini dapat dilihat dari target dan realiasi PAD yang selalu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

#### **18. Rendahnya daya saing tenaga kerja**

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Hal ini secara umum disebabkan oleh beberapa hal seperti terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja dan rendahnya skill tenaga kerja, kondisi ini dapat menjadi beban bagi pemerintah Kota Jambi. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di mana TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi pada tahun 2021 sebesar 10,66 persen. Oleh karena itu perlu dikembangkan jenis pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan tenaga kerja, pelaksanaan *job fair* dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja.

### **19. Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular dan tidak menular**

Secara umum derajat kesehatan masyarakat Kota Jambi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semuapemangku kepentingan antara lain: masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih ditemukannya balita gizi kurang serta baduta *stunting*. Penyelenggaraan kesehatan di Kota Jambi dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Jambi khususnya keluarga kurang mampu, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat daruratan, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.

### **20. Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan**

Perempuan adalah sumber daya manusia yang jumlahnya besar dan memiliki potensi yang tinggi dalam kaitannya sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sebagai bagian terbesar dari sumber daya manusia, perempuan memiliki peran strategis dalam kehidupan. Peran penting tersebut tercermin dalam segala aspek kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat bahwa negara. Dalam berbagai kajian telah banyak dipaparkan bahwa perempuan adalah *agent of development* sebagai aset bangsa yang potensial, dan perannya sebagai kontributor sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Meskipun saat ini upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan telah banyak dikembangkan, akan tetapi kesenjangan gender masih terjadi diberbagai lini bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas

hidup perempuan adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada kesetaraan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan dan penilaian atas perempuan dan laki-laki dalam kehidupan maupun di tempat kerja. Berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2013- 2016 jumlah angkatan kerja perempuan sebesar 46,69% atau 89.061 jiwa dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 213.694 jiwa. Jika ditinjau dari jumlah angkatan kerja perempuan menunjukkan belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan di Kota Jambi

sehingga perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam mendukung pembangunan.

### **21. Tingginya kasus kejahatan anak**

Masa depan anak adalah harapan dan impian yang harus diwujudkan yaitu mewujudkan impian anak Indonesia khususnya anak-anak dikota jambi agar menjadi anak yang cerdas, berahlak mulia, aktif berpartisipasi serta memiliki jiwa nasionalisme dan semangat patriotisme yang kuat. Anak juga merupakan karuniatuhan yang maha kuasa, ini merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa dimasa depan, anak adalah investasi dan anak juga generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi agar hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang layak dan pewaris masa depan. Akan tetapi tindak kekerasan atau kasus kejahatan terhadap anak setiap tahunnya meningkat, baik itu dilakukan dilingkungan kelurga maupun dluar dari keluarga. Dimana berdasarkan data yang masuk dinas pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak dari tahun 2015 hingga 2017 terdapat 124 kasus kekerasan terhadap anak-anak. Darikasus tersebut tidak hanya kekerasan terhadap fisik maupun psikis tapi juga kekerasan seksual dan penelantaran. Faktor dari pemicu dari kekerasan anak diantaranya faktor ekonomi, teknologi informasi dan pergaulan lingkungan yang baik. Melihat dari kasus tersebut perlu dilakukan langkah-langkah percepatan dalam upaya sosialisasi yang efektif guna dapat menurunkan kasus kejahatan terhadap anak-anak.

### **22. Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan**

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, hal ini lebih menegaskan perhatian pemerintah terhadap pemuda, inti dari undang-undang tersebut adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah disegala bidang. Namun minat pemuda dikota jambi masih rendah terhadap pengembangan bidang kewirausahaan, Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi pemuda untuk berpartisipasi dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga ataupun belum optimalnya fasilitas untuk pemuda

### **23. Tingginya Angka Penyandang PMKS**

Sesuai dengan amanat UU nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Didalam PMKS sendiri terdapat 26 indikator yang harus ditangani, namun dapat disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Untuk kota jambi sendiri terdapat 23 indikator dari 26 indikator yang ada, dilihat

secara trend selama 3 (tiga) tahun PMKS kota jambi menunjukkan peningkatan diantaranya: anak terlantar meningkat sebesar 25,4%, anak nakal yang berhadapan dengan hukum meningkat sebesar 200%, tuna susila juga meningkat dari tahun 2015 hingga 2017 sebesar 131,4%. Jika ditinjau dari aspek penyelenggaraan pemerintah bahwasanya program dan kegiatan terutama pada PMKS belum optimal sehingga ini menjadi tugas dari pemerintah Kota Jambi untuk dapat menyusun langkah-langkah dan strategi dalam upaya menurunkan anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

#### **24. Optimalisasi Penanganan dan pencegahan penularan Pandemi Covid-19**

Dalam 2 tahun terakhir ini Pemerintah Kota Jambi telah melakukan secara maksimal dalam penanganan dan pencegahan Pandemi covid-19 namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat beberapa masalah yang ditemui, masalah tersebut antara lain: masih kurangnya ruang pelayanan khusus untuk pasien Covid 19, terbatasnya tenaga kesehatan dan sarana parasana dalam penanganan pasien. Covid 19, terbatasnya tenaga kesehatan dan sarana parasana dalam penanganan pasien.

#### **25. Pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19**

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2020 dan 2021 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang kemudian mempunyai dampak *multiplier* terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif. Berbasis pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2015-2019), bahkan tahun 2019 mampu tumbuh 7,79 persen, sehingga diperkirakan ekonomi Kota Jambi akan tumbuh sekitar 8,8 persen tahun 2020 dan 2021 di proyeksi menjadi 9,02 persen, kan tetapi persoalan Pandemi Covid 19 telah membuat perubahan dalam perekonomian Kota Jambi, sehingga beberapa sektor unggulan di Kota Jambi tidak bergerak dengan baik terutama sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pengadaan listrik dan gas dan industri pengolahan, kemudian sektor informal yang masih menjadi motor penggerak perekonomian menjadi tidak berjalan, karena semakin diperketatnya kebijakan social dan physical distancing. Apalagi jika Kota Jambi ditetapkan sebagai wilayah PSBB dan zona merah; dan semakin menurunnya permintaan konsumen luar wilayah Jambi.

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas daya saing siswa;</li> <li>2. Rendahnya daya tampung sekolah;</li> <li>3. Rendahnya kualitas lulusan yang dapat diterima di SMA favorit;</li> <li>4. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan;</li> <li>5. Rendahnya kompetensi tenaga pendidik;</li> <li>6. Tidak optimalnya penerapan Kurikulum K13;</li> <li>7. Distribusi tenaga pendidik tidak merata.</li> </ol>	Belum optimalnya daya saing pendidikan	DISDIK
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat;</li> <li>2. Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular;</li> <li>3. Rendahnya sapsras pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>4. Rendahnya kualitas tenaga kesehatan;</li> <li>5. Masih kurangnya Alat kesehatan;</li> <li>6. Tingginya Masyarakat dengan pola hidup tidak sehat.</li> </ol>	Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular dan tidak menular	DINKES
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya titik genangan dan banjir di Kota Jambi;</li> <li>2. Tingginya alih fungsi retensi alami;</li> <li>3. Belum terintegrasinya sistem jaringan drainase;</li> <li>4. Rendahnya pengawasan dan perlindungan sumber daya air;</li> <li>5. Masih tingginya sedimentasi pada saluran;</li> <li>6. Banyaknya timbulan sampah yang menyumbat drainase;</li> <li>7. Banyaknya timbunan sampah di pinggir jalan dan lingkungan;</li> <li>8. Pengolahan sampah yang tidak terpadu</li> <li>9. Belum meratanya pembangunan saluran drainase;</li> <li>10. Ketidaksesuaian dimensi drainase dengan debit air;</li> <li>11. Belum adanya regulasi yang mengatur secara mendetail (RDTR);</li> <li>12. Lemahnya pengawasan pembangunan bangunan;</li> <li>13. Masih banyaknya bangunan liar dan tidak sesuai spesifikasi;</li> <li>14. Terjadinya degradasi kawasan strategis;</li> <li>15. Kurangnya penataan dan perlindungan bangunan dan kawasan cagar budaya;</li> <li>16. Kurang representatifnya estetika kota;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah;</li> <li>2. Rendahnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Infrastruktur Jalan;</li> <li>3. Banyaknya titik genangan/banjir di Kota Jambi;</li> <li>4. Belum terwujudnya harmonisasi ruang kota;</li> <li>5. Rendahnya rasio RTH public;</li> <li>6. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah;</li> <li>7. Masih banyaknya bangunan liar dan tidak sesuai spesifikasi.</li> </ol>	DPUPR

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		17. Banyaknya bangunan yang tidak memiliki Serti?kat Layak Fungsi (SLF); 18. masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih; 19. Rendahnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Infrastruktur dan Keselamatan Jalan.		
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman; 2. Tingginya luasan kawasan kumuh; 3. Tingginya backlog perumahan; 4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan permukiman; 5. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap rumah layak huni; 6. Aksesibilitas Permukiman; 7. Banyaknya masyarakat yang tidak terlayani Fasum dan Fasos; 8. Masih banyak Fasum dan Fasos perumahan yang belum diserahkan; 9. Tingginya biaya pemakaman; 10. Masih banyaknya wilayah yang belum terlayani LPJU.	1. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman; 2. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni.	DPRKP
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Rendahnya kenyamanan serta perlindungan masyarakat; 2. Lemahnya penegakan PERDA; 3. Rendahnya respon time penanganan bencana; 4. Kurangnya Jumlah Pejabat PPNS; 5. Masih minimnya sarana dan prasarana Satpol PP; 6. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam Mematuhi Perda; 7. Kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya kebakaran; 8. Minimnya sarana dan prasarana kebakaran di kecamatan.	1. Lemahnya penegakan PERDA; 2. Rendahnya <i>respon time</i> penanganan bencana; 3. Masih banyaknya kasus pelanggaran PERDA yang tidak memiliki ketetapan hukum (INKRACHT); 4. Tingginya potensi konflik.	SATPOL PP, DISDAMKAR DAN KESBANGPOL
6.	Sosial	1. Tingginya Angka Penyandang PMKS; 2. Rendahnya keterampilan penduduk miskin; 3. Masih ditemuinya pengemis di jalan-jalan protokol; 4. Minimnya fasilitas bagi kaum lansia; 5. Tingginya penyalahgunaan Napza;	Tingginya Angka Penyandang PMKS	DINSOS

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		6. Tingginya penduduk dibawah garis kemiskinan; 7. Tingginya kasus human trafficking.		
7.	Tenaga Kerja	1. Rendahnya daya saing tenaga kerja; 2. Rendahnya kualitas tenaga kerja; 3. Tingginya angka pengangguran; 4. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja; 5. Belum optimalnya penyelesaian Konflik terhadap ketenagakerjaan; 6. Kurangnya tenaga pengawasan ketenagakerjaan; 7. Rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal.	Rendahnya daya saing tenaga kerja	DTKK
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan; 2. Tingginya angka ketimpangan gender; 3. Tingginya kasus kejahatan anak; 4. Rendahnya rasio pada tenaga kerja perempuan pada lapangan kerja; 5. Tingginya jumlah kejahatan perempuan; 6. Tingginya angka perceraian; 7. Tingginya kekerasan dalam rumah tangga; 8. Tingginya jumlah kejahatan anak; 9. Tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak.	1. Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan; 2. Tingginya kasus kejahatan anak.	DPMPA
9.	Pangan	1. Belum optimalnya ketahanan dan keamanan pangan; 2. Minimnya ketahanan pangan; 3. Rendahnya keamanan pangan; 4. Rendahnya diversifikasi pangan; 5. Banyaknya bahan pangan dalam kategori berbahaya; 6. Tidak adanya data bahan pangan layak dan aman dikonsumsi; 7. Rendahnya sarana dan prasarana keamanan pangan.	Belum optimal pola pangan harapan di Kota Jambi	DPKP
10.	Pertanahan	Banyaknya aset memiliki sertifikat pemda yang belum	Banyaknya aset pemda yang belum memiliki sertifikat	SETDA BAGIAN PEMERINTAHAN
11.	Lingkungan Hidup	1. Menurunnya kualitas Lingkungan Hidup; 2. Pembangunan tidak berwawasan lingkungan;	1. Menurunnya kualitas Lingkungan Hidup	DLH

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tingginya pencemaran air;</li> <li>4. Tingginya angka pencemaran limbah B3;</li> <li>5. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah;</li> <li>6. Belum optimalnya dokumen perencanaan lingkungan hidup;</li> <li>7. Kebijakan strategis dan kebijakan spasial tidak disertai dukungan KLHS;</li> <li>8. Tingginya tingkat polusi (tanah, air dan udara);</li> <li>9. Banyaknya limbah rumah tangga dan pelaku usaha dibuang ke saluran drainase;</li> <li>10. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah;</li> <li>11. Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat;</li> <li>12. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup;</li> <li>13. Kurangnya sapras untuk pengurangan dan pengelolaan sampah;</li> <li>14. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah;</li> <li>15. Rendahnya pengelolaan sampah ditingkat sumber.</li> </ol>	2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah	
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya jumlah penduduk diluar Kota Jambi yang tidak tercatat;</li> <li>2. Belum adanya informasi kependudukan secara terbuka.</li> </ol>	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	DKPS
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan;</li> <li>2. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan swadaya masyarakat;</li> <li>3. Belum optimalnya pengumpulan dan analisis data &amp; informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan.</li> </ol>	Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan	DPMPPA DAN KECAMATAN
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk;</li> <li>2. Tingginya TFR.</li> </ol>	Tingginya laju pertumbuhan penduduk	DPPKB

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
15.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas;</li> <li>Banyaknya kendaraan parkir dibadan jalan;</li> <li>Kurangnya lahan parkir;</li> <li>Belum adanya angkutan moda massal yang representatif;</li> <li>Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berkendara;</li> <li>Masih kurangnya sarana dan prasarana keselamatan jalan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas;</li> <li>Minimnya kecepatan tempuh rata - rata (pada saat tertentu).</li> </ol>	DISHUB
16.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lemahnya implementasi <i>smart city</i> dan <i>e-government</i>;</li> <li>Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan jaringan kerjasama komunikasi dan informasi untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat;</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data elektronik;</li> <li>Minimnya Sarana dan Prasarana TIK;</li> <li>Rendahnya jaringan internet di kantor pemerintahan;</li> <li>Rendahnya integrasi aplikasi pemerintahan;</li> <li>Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>Belum adanya peraturan pendukung <i>smart city</i>.</li> </ol>	Belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	DISKOMINFO
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya manajemen koperasi;</li> <li>Rendahnya pengembangan koperasi;</li> <li>Rendahnya akses Koperasi terhadap sumber- sumber permodalan;</li> <li>Rendahnya kualitas SDM Koperasi;</li> <li>Rendahnya minat terhadap produk lokal;</li> <li>Rendahnya akses UMKM terhadap sumber- sumber permodalan;</li> <li>Rendahnya ketersediaan produk lokal di pasaran;</li> <li>Rendahnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM;</li> <li>Rendahnya Kualitas Produk UMKM;</li> <li>Minimnya UMKM yang berdaya saing.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya manajemen koperasi;</li> <li>Rendahnya daya saing lokal</li> </ol>	DTKK DAN DPP
18.	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya iklim investasi;</li> <li>Rendahnya minat investor untuk menanamkan modal;</li> </ol>	Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan	DPMPTSP

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Belum optimalnya pelaksanaan promosi dan kerjasama penanaman modal;</li> <li>4. Rendahnya kepastian hukum dalam berinvestasi;</li> <li>5. Belum optimalnya pengawasan terhadap penanaman modal;</li> <li>6. Belum optimalnya kerjasama pemerintah dan badan usaha;</li> <li>7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan;</li> <li>8. Belum tersedianya data dan sistem informasi;</li> </ul>		
19.	Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan;</li> <li>2. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;</li> <li>3. Minimnya prestasi olahraga dikancah nasional;</li> <li>4. rendahnya kepedulian pemuda dalam pembangunan;</li> <li>5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan;</li> <li>6. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan;</li> <li>7. Masih rendahnya minat generasi muda ikut dalam kepramukaan.</li> </ul>	Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan	DISPORA
20.	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data dalam pembangunan;</li> <li>2. Rendahnya ketersediaan dan validitas data;</li> <li>3. Kurangnya ketersediaan data pendukung ;</li> <li>4. Belum tersedianya basis data yang valid dan <i>update</i>.</li> </ul>	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data dalam pembangunan	DISKOMINFO
21.	Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya pengamanan data dan informasi daerah;</li> <li>2. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian;</li> <li>3. Masih banyaknya aplikasi informasi yang belum tersandikan.</li> </ul>	Lemahnya pengamanan data dan informasi daerah	DISKOMINFO
22.	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya degradasi terhadap nilai - nilai seni dan budaya;</li> <li>2. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana bidang kebudayaan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan kebudayaan;</li> <li>3. Belum optimalnya pelestarian terhadap seni dan budaya daerah;</li> </ul>	Tingginya degradasi terhadap nilai-nilai seni dan budaya	DPK

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Belum optimalnya pelestarian terhadap sejarah daerah;</li> <li>5. Rendahnya pemahaman siswa terhadap kearifan lokal;</li> <li>6. Semakin tergerus kearifan lokal dan nilai- nilai sejarah;</li> <li>7. Minimnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Sejarah Jambi;</li> <li>8. Rendahnya Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan;</li> <li>9. Rendahnya minat masyarakat terhadap museum daerah.</li> </ol>		
23.	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya literasi masyarakat;</li> <li>2. Rendahnya minat baca masyarakat;</li> <li>3. Rendahnya budaya dan minat baca (pendidikan karakter);</li> <li>4. Pergeseran paradigma dan budaya baca kearah digital;</li> <li>5. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah.</li> </ol>	Belum optimalnya daya saing pendidikan	DPK
24.	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengelolaan arsip pemerintah;</li> <li>2. Belum optimalnya pembinaan kearsipan terhadap SDM kearsipan;</li> <li>3. Belum memadainya sarana prasarana kearsipan pada setiap Perangkat Daerah ditunjukkan persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif.</li> </ol>	Belum optimalnya pengelolaan arsip	DKP
25.	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya daya saing produk perikanan;</li> <li>2. Rendahnya produktivitas perikanan;</li> <li>3. Rendahnya kualitas lingkungan perairan;</li> <li>4. Menurunnya biodiversitas spesies perikanan;</li> <li>5. Belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan.</li> </ol>	Belum optimalnya pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan	DKPP
26.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kunjungan wisata melalui dan ke Kota Jambi;</li> <li>2. Rendahnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholders kepariwisataan;</li> <li>3. Rendahnya aktivitas kepariwisataan;</li> <li>4. Rendahnya kreativitas dalam pengelolaan kepariwisataan;</li> <li>5. Belum adanya pemanfaatan HAKI dalam pengembangan ekonomi kreatif;</li> <li>6. Belum terpetanya potensi sumber daya pariwisata;</li> <li>7. Minimnya sarana dan prasarana kepariwisataan.</li> </ol>	Rendahnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholders kepariwisataan	DPK
27.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengelolaan hewan peliharaan;</li> </ol>	Belum optimalnya pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan	DKPP

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Minimnya keamanan daging konsumsi secara Aman, Sehat, Unggul dan Halal;</li> <li>3. Minimnya sarana dan prasarana RPH sesuai SNI;</li> <li>4. Rendahnya pemeriksaan terhadap kesmavet.</li> </ol>		
28.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas pengelolaan sarana prasarana perdagangan;</li> <li>2. Tingginya Biaya Logistik;</li> <li>3. Tingginya fluktuasi harga;</li> <li>4. Tidak adanya data surplus dan defisit;</li> <li>5. Tingginya oligopoli komoditi;</li> <li>6. Belum optimalnya informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah;</li> <li>7. Rendahnya transaksi di pasar induk dan rakyat;</li> <li>8. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap pedagang;</li> <li>9. Minimnya pasar rakyat sesuai SNI;</li> <li>10. Tingginya tingkat kecurangan transaksi pasar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya tata niaga perdagangan;</li> <li>2. Masih lemahnya manajemen perpasaran.</li> </ol>	DPP
29.	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pembinaan pemerintah terhadap industri kecil dan menengah;</li> <li>2. Rendahnya ketersediaan bahan baku di pasaran;</li> <li>3. Rendahnya Kualitas Produk Industri yang dihasilkan;</li> <li>4. Rendahnya daya saing produk industri IKM;</li> <li>5. Rendahnya kemampuan IKM dalam manajemen, akses permodalan dan penggunaan IT.</li> </ol>	Rendahnya daya saing produk industri IKM	DPP
30.	Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal, disebabkan kurangnya kapasitas SDM perencana;</li> <li>2. Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;</li> <li>3. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;</li> </ol>	Belum optimalnya perumusan kebijakan dalam proses pembangunan	BAPPEDA

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;</li> <li>5. Belum maksimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan;</li> <li>6. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem keuangan.</li> </ol>		
31.	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terlihat dari persentase besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD;</li> <li>2. Belum optimalnya Tertib dan akuntabilitas keuangan daerah;</li> <li>3. Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan;</li> <li>4. Belum optimalnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual;</li> <li>5. Belum optimalnya pendapatan daerah;</li> <li>6. Belum terintegrasinya sistem keuangan dengan perencanaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan;</li> <li>2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah.</li> </ol>	BPKAD DAN BPPRD
32.	Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih minimnya produk penelitian yang mendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;</li> <li>2. Masih minimnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan;</li> <li>3. Masih minimnya kegiatan pengembangan yang mendukung inovasi produk-produk kreatif dalam rangka pengembangan perekonomian.</li> </ol>	Belum optimalnya produk penelitian didalam perumusan kebijakan	BAPPEDA
33.	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya reformasi birokrasi;</li> <li>2. Masih belum optimalnya pembinaan disiplin dan terdapat ASN yang tidak disiplin di setiap unit kerja PD;</li> <li>3. Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah;</li> <li>4. Jumlah ASN yang pensiun lebih besar daripada pengangkatan ASN baru, terutama memenuhi kebutuhan</li> </ol>	Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah	BKPSDMD

NO	URUSAN	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK	OPD
		tenaga teknis, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga fungsional tertentu.		
34.	Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya PD yang mampu menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;</li> <li>Masih rendahnya produk hukum daerah yang tersosialisasikan;</li> <li>Masih belum optimalnya capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik.</li> </ol>	Belum Optimalnya Akuntabilitas Pemerintahan	SETDA
35.	Sekretariat Dewan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>Belum optimalnya kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.</li> </ol>	Belum optimalnya	SEKRETARIAT DEWAN
36.	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya pengawasan dan pengendalian tata kelola pemerintahan;</li> <li>Masih rendahnya capaian penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi;</li> <li>Masih rendahnya level kapabilitas APiP.</li> </ol>	Belum optimalnya Sinergitas penyelenggaraan pemerintah daerah	INSPEKTORAT

## B. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi periode 2018-2023, telah ditetapkan Visi Kota Jambi, yaitu:

**“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”**

Visi tersebut mengandung makna :

- **Pusat Perdagangan dan Jasa:** berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda;
- **Berbasis Masyarakat:** berbasis masyarakat merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menela'ah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dilingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
- **Berakhlak:** Akhlak berarti prilaku, sikap, perbuatan, adat dan sopan santun. Berakhlak berarti seluruh prilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- **Berbudaya:** Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan. Oleh karena itu masyarakat Kota Jambi harus memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- **Pelayanan Prima:** upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
3. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
4. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

**Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi**

Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

**Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat**

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan dan

mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan Daerah (PERDA). Sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam melakukan aktivitas. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam upaya kewaspadaan dini.

**Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan**

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

**Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan**

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sektor perdagangan dan jasa, khususnya penguatan UMKM dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan serta peluang kerja.

**Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan**

Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Visi Misi dan Perubahan Tujuan, Sasaran serta Indikator Jangka Menengah Kota  
Jambi (Sebelum Perubahan)

**VISI : MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA  
BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN  
BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN  
PELAYANAN PRIMA**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir			
						2018	2019	2020	2021	2022	2023				
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	2,44	2,55	2,66	2,77	2,33	2,44			
					Indeks Profesionalitas ASN	55	56	57,5	59	60,5	62	62			
					Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	A	A			
					Indeks survey persepsi Korupsi		3,65	3,69	3,73	3,75	3,8	3,8			
					Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28	85,5%	86%	87%	87,5%	88,5%	88,5%			
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82%	82%	80%	75%	66%	60%	60%			
					Penurunan Jumlah kasus atau pelanggaran per tahun	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
							Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan layanan infrastruktur dan Utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	50.59%	53,07%	60,77%	70,61%	78,25%	85,79%	85,79%			

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	32,11	37,75	38,30	38,50	38,65	38,75	38,75
					Indeks Kualitas Udara	80,68	80,70	80,72	80,74	80,76	80,78	80,78
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,33	41,30	41,70	42,00	42,30	42,50	42,50
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	20	36	52	68	84	100	100
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	90,2	90,5	91	91,5	92	92,5	9,25
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%	2,38%	2,39%	2,40%	2,41%	2,41%
			Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	8%	9%	9%	9%	9%	9%	
			Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	410 M	430,5 M	430,5 M	474,62 M	498,35 M	523,37 M	523,37 M	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	65%	65,25%	65,50%	65,75%	66%	66%
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	8,08%	8,54%	9,01%	9,47%	9,94%	10,00%
					Persentase Daya Saing Produk IKM	4,3	4,3	5,35	6,5	7,5	8,3	8,3
					Persentase koperasi berkualitas	13%	16,06%	19,27%	23,85%	29,82%	36,70%	36,70%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34	72,35	72,35	72,36	72,36	72,37	72,37
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25	14,60	14,61	14,62	14,63	14,64	14,64
					Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	21,32	21,32	17,32	12,32	8,32	4,32	4,32
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68	10,69	10,70	10,71	10,72	10,72
				Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	1,05	1,03	1,01	1,01	1,01
					Persentase Jumlah Keluarga Sejahter	N/A	96,23%	96,46%	96,69%	96,92%	97,15%	97,15%
			Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,89	94,90	94,91	94,93	94,94	94,95	94,95
					Indeks Pemberdayaan Gender	68,07	68,10	68,20	68,30	68,40	68,50	68,50
			Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%	80%	80%	80%	80%	80%
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23	60,23	61,43	63	64	66	66
					Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	50,5	51	51,5	52
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	60	65	70	75	80	85	85

**VISI : MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA  
BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN  
BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN  
PELAYANAN PRIMA**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	2019		2020		2021		Target 2022	Target 2023
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	BB	B	BB	BB
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	75%	75%	79%	81%
		Penanganan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	5.1	7.22	5.67	7.44	7.47	7.58	7.5	7.7
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52.06	52.46	52.39	55.16	52.57	58.67	55.2	55.5
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.28	5.33	5.39	-3.28	2.75-3.25	3.94	3.25-4.25	4.25-5.25
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	77.14	78.26	77.54	78.37	78.39	79.12	79.15	79.20
		Indeks Pembangunan Gender	94.90	94.14	94.91	94.03	94.40	94.42	94.45	95.0
		Kriteria Kota Layak Anak	Madya	Madya	Nindya	-	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
		Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.23%	70.96%	61.43%	59.15%	63.00%	87%	88%	89%
		Persentase Penduduk Miskin	8.49	8.12	7.89	8.27	7.29	9.02	9.0	8.9

Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi (Setelah Perubahan)

## VISI : MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		Target 2022	Target 2023
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.44	2.85	2.55	2.85	2.9	1.69	3.0	3.1
				Indeks Profesionalitas ASN	56	56.2	57.5	62.95	63.08	64.24	64.08	64.88
				Nilai SAKIP	B	B	BB	B	BB	B	BB	BB
				Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	-	-	-	-	2.352	2.352	2.648	2.972
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	-	-	-	-	3.97 (B)	3.97 (B)	3.99 (B)	4.02 (B)
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	-	-	-	-	81%	81%	84%	86%
			Penanganan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%	40%	40%	60%	60%	80%	100%

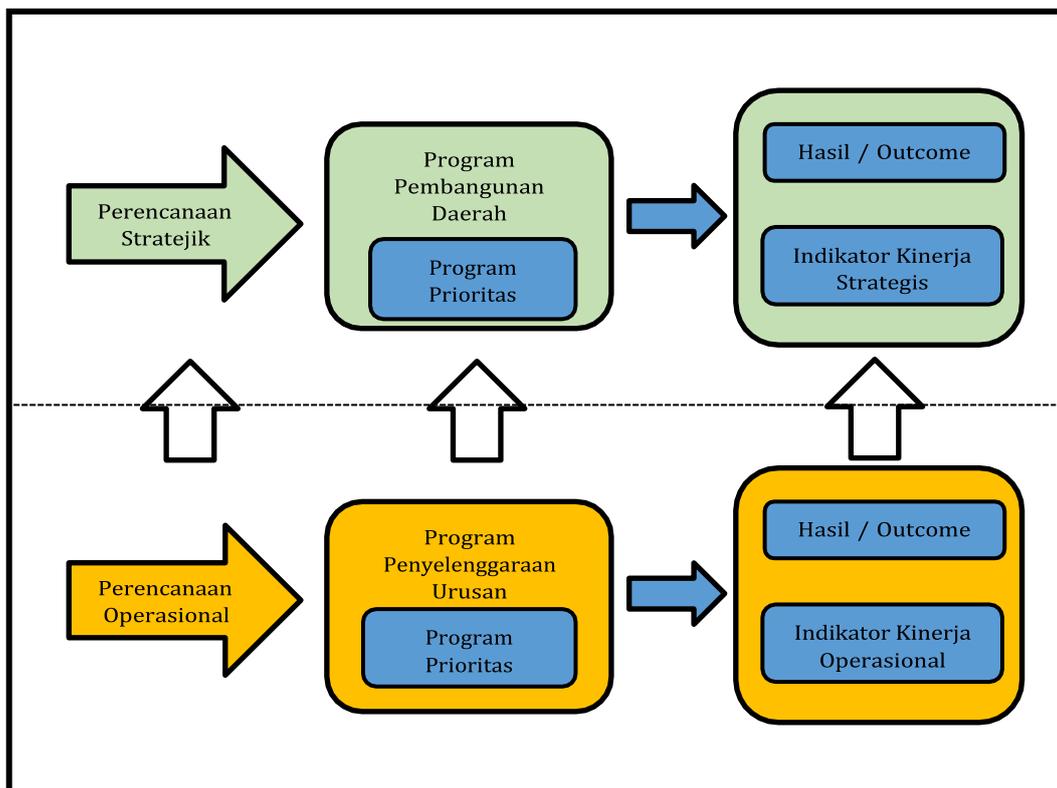
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		Target 2022	Target 2023
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
			Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	40%	48.71%	60%	60%	80%	100%
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	-	-	-	-	0.48	0.48	0.47	0.46
			Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditangani	-	-	-	-	48.06%	48.06%	49.11%	54.71%
			Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	-	-	-	-	56.38%	74.76%	63.31%	67.09%
			Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Luasan Kawasan Genangan	-	-	1314 Ha	-	1013 Ha	1013 Ha	860 Ha	711 Ha
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	37.75	38.27	38.3	39.6	39.75	43.99	39.9	40.05
				Indeks Kualitas Udara	80.7	76.84	80.72	84.51	80.74	85.02	80.76	80.78
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41.3	44.81	41.7	44.81	44.85	49.91	44.87	44.9
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Laju Inflasi					3.50-5.00	1.67	3.50-5.00	3.50-5.00
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan					78	78	79	80
			Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2.36%	2.37%	2.38%	2.38%	2.39%	2.22%	2.40%	2.41%
			Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8%	16.13%	9%	-9.64%	9%	7.97%	9%	9%
			Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	430.5 M	1.055T	430.5 M	249.4M	474.62 M	653,18 M	498.35 M	523.37 M
			Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.56	6.72	6.42	10.49	10.22	10.66	9.60	9.10

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2019		2020		2021		Target 2022	Target 2023
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
			Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7.61%	8.08%	8.08%	8.54%	9.01%	9.01%	9.47%	9.94%
				Persentase Daya Saing Produk IKM	4.30%	19.30%	5.35%	2.80%	6.50%	1.64%	7.50%	8.30%
				Persentase koperasi berkualitas	16.06%	16.50%	19.27%	19.73%	23.85%	26.36%	32.72%	44.09%
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	72.35	72.57	72.35	72.65	72.73	72.71	72.81	72.89
			Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.6	14,62	14.61	15.10	15.11	15.37	15.38	15.39
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.68	10.68	10.69	10.92	10.93	11.20	11.21	11.22
			Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.05	1.05	1.05	1.10	1.03	1.31	1.03	1.01
		Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera		96.23%	96.00%	96.46%	96.00%	96.69%	96.83%	96.92%	97.15%	
		Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	68.10	69,83	68.20	69.83	68.30	67.88	68.40	68.50
		Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	70%	70%	80%	80%	70%	80%	80%	80%
		Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60.2%	71.0%	61.43%	59.15%	87.0%	87%	88.0%	89.0%
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	50	-	50.5	-	57.9	57.91	57.95
		Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	65%	62%	70%	67%	70%	80%	75%	80%

### C. Program Pembangunan Daerah, Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

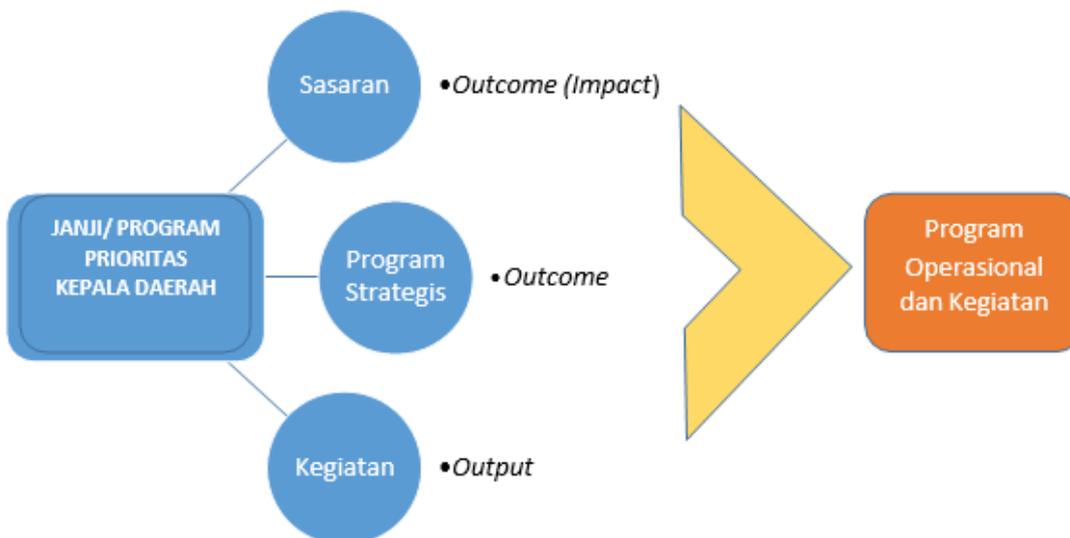
Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti diagram kinerja pembangunan sebagaimana gambar berikut



Arsitektur Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah

Sesuai arsitektur perencanaan dan kinerja tersebut di atas, perencanaan dipisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian,

dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional, yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan *urgent*. Program strategis selanjutnya disebut dengan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah pada intinya merupakan implementasi dari janji-janji dan program prioritas serta agenda politik kepala daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program prioritas kepala daerah terpilih diimplementasi dalam tataran sasaran, program dan kegiatan yang mempunyai tingkatan indikator sasaran (*outcome/impact*), program (*outcome*) atau kegiatan (*output*) yang dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana ilustrasi gambar berikut ini :



Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

## 1. Program Prioritas Pembangunan

### 1. ***Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan***

Infrastruktur merupakan aspek penting dalam upaya penyediaan ruang kota yang harmonis, baik dalam meningkatkan kenyamanan bagi kehidupan sosial masyarakat, mendorong kemajuan kegiatan perekonomian daerah serta dapat memberikan perlindungan maupun perbaikan/recovery terhadap degradasi lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan melalui perluasan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar, penataan Kawasan strategis guna mendorong potensi ekonomi, penyediaan ruang publik serta penyediaan/penataan fungsi-fungsi konservasi lingkungan yang di dukung penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Termasuk di dalamnya penyediaan transportasi publik yang didukung jaringan transportasi dalam kota maupun daerah *hinterland* dalam suatu keterpaduan pembangunan dalam perspektif pembangunan regional.

## **2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kota Jambi ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi yang paling penting adalah keberhasilan pembangunan manusianya, sehingga nantinya dapat terwujud manusiayang kompeten dan mandiri.

Prioritas Pengembangan SDM ini akan menjadi perhatian dari setiap Perangkat Daerah baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan yang dilakukan antara lain Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah maupun pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja/pelaku UMKM melalui pelatihan kerja yang terencana agar peningkatan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap kerja (*attitude*) dapat dilakukan. Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas dasar penduduk akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan

## **3. Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan**

Permasalahan kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan masalah sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, implikasi permasalahan kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan menentukan kelangsungan pembangunan kualitas manusia itu sendiri yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam kaitan proses perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, maka masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang sangat dinamis, sehingga membutuhkan peran institusi, program serta metode pendekatan yang mampu menjawab permasalahan kemiskinan.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam implementasi penanggulangan kemiskinan yaitu:

- a) Masih lemahnya koordinasi terutama dalam hal: pendataan, pendanaan, dan kelembagaan;
- b) Lemahnya koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan antara instansi pemerintah pusat dan daerah;
- c) Lemahnya integrasi program pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani);
- d) Belum optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.

Dengan dimensinya yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara komprehensif dan sistemik. Pemecahan masalah kemiskinan juga tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan yang terpusat dan berjangka pendek, melainkan memerlukan pendekatan yang terpadu, terencana, berkesinambungan, dan menuntut keterlibatan berbagai pihak.

#### **4. Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah**

Apabila melihat tren dan menganalisis berbagai sektor ekonomi, maka sektor pariwisata menjadi sektor yang paling memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun performa pariwisata Indonesia terus menanjak, sektor ini terus tumbuh dan bergerak lincah dalam peningkatan ekonomi Indonesia.

Potensi pengembangan pariwisata di Kota Jambi juga telah dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Berbagai pembangunan fisik maupun non fisik dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Jambi seperti pengembangan Danau Sipin sebagai kawasan wisata terpadu, perbaikan infrastruktur publik, pembangunan berbagai fasilitas umum dan juga perbaikan sistem pelayanan publik yang pada akhirnya akan mengakselerasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Konsep pengembangan pariwisata di Kota Jambi kedepannya adalah pengembangan pariwisata berbasis penataan kawasan, diantaranya adalah penataan kawasan Pasar Kota Jambi, pembangunan kawasan wisata JambiKota Seberang yang memiliki potensi wisata alam dan juga wisata budaya.

Selain sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi juga merupakan daerah strategis sebagai pintu masuk dan perlintasan ke daerah lainnya, baik perlintasan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi maupun perlintasan antar provinsi. Hal ini tentu juga akan memberi banyak manfaat bagi pengembangan pariwisata di Kota Jambi, terutama bidang perhotelan, restoran, transportasi dan penyelenggaraan aktivitas MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*).

## **2. Janji Politik Kepala Daerah**

1. Peningkatan Implementasi IT Dalam Pengelolaan Perkotaan Dan Pemerintahan
2. Jambi Cerdas
3. Jambi Bugar
4. Kota Layak Anak
5. Kegiatan Khusus Lansia
6. Perluasan Layanan Kesehatan 119
7. Peningkatan Jumlah Dan Kualitas PKM Rawat Inap
8. Pelayanan Prima Perizinan
9. Peningkatan Frekuensi Job Fair
10. Kepastian Hukum
11. Peningkatan SDM Dan Prasarana Bagi Pelaku IKM/UMKM
12. Laporan Keuangan Yang Akuntabel
13. Peningkatan Rekrutmen Guru Agama
14. Peningkatan Akses Dan Responsibilitas Terhadap Keluhan Masyarakat Berbasis IT
15. Peningkatan Destinasi Wisata Serta Prasarananya
16. Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pelayanan Publik
17. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Dan Swasta

Guna mempercepat implementasi dari program pembangunan daerah tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dengan menggunakan pendekatan yang bersifat *holistik-tematik*, *integratif* dan *spasial*. Pendekatan *holistik-tematik*, *integratif* dan *spasial* adalah sebagai berikut:

- Pendekatan *holistik-tematik* dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- Pendekatan *integratif* dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- Pendekatan *spasial* dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

#### **D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan, secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan sebagaimana tabel berikut:

<b>TEMA PEMBANGUNAN</b>				
<b>TAHUN 2019</b>	<b>TAHUN 2020</b>	<b>TAHUN 2021</b>	<b>TAHUN 2022</b>	<b>TAHUN 2023</b>
<b>Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)</b>	<b>Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK</b>	<b>Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah</b>	<b>Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan</b>
<b>ARAH KEBIJAKAN</b>				
Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK
Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN				
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan
Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel
Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK
Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
<b>Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)</b>	<b>Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK</b>	<b>Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah</b>	<b>Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan</b>
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan				
Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol				
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas
Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan
Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
<b>Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)</b>	<b>Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK</b>	<b>Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah</b>	<b>Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan</b>
ARAH KEBIJAKAN				
Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan
Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur
Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang
Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan
Mendorong partisipasi masyarakat untuk pengurangan tingkat pencemaran lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan
Pengendalian dan pengawasan lingkungan				
Peningkatan dan pengelolaan tutupan lahan binaan				
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
Meningkatkan manajemen pengelolaan perpasaran	Meningkatkan manajemen tataniaga	Meningkatkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga
Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
<b>Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)</b>	<b>Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK</b>	<b>Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah</b>	<b>Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan</b>
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan
Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya
Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE ( <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> )	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE ( <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> )	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE ( <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> )	Mendorong aktivitas MICE ( <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> )	Mendorong aktivitas MICE ( <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> )
Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah
Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah
Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja			
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
<b>Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)</b>	<b>Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK</b>	<b>Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah</b>	<b>Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan</b>
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal
Meningkatkan koperasi berkualitas	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Pengembangan Koperasi	Pengembangan Koperasi
Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar
Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas
Menekan angka putus sekolah	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan
	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas
Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan			
Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas
Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan			
Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
<b>Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)</b>	<b>Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK</b>	<b>Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah</b>	<b>Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan</b>
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak
Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
		Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda
Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS
Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS

Sumber: RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

### 1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran - ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah hak seluruh individu Pemerintah wajib menjamin pemenuhannya. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah. Saat ini regulasi turunan UU No. 23 Tahun 2014 terkait dengan penerapan SPM sudah diundangkan. Beberapa di antaranya adalah PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM; Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM; sampai dengan peraturan terkait standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM dari seluruh Kementerian Pengampu SPM, seperti Permenkes No.4 Tahun 2019; Permendikbud No. 32 Tahun 2018; Permen PUPR No. 29 Tahun 2018; Permensos No. 9 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018 dan No. 121 Tahun 2018.

Peraturan kementerian teknis SPM di atas menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun program/ kegiatan/sub kegiatan pelaksanaan SPM di daerahnya masing-masing. Sementara acuan utama daerah dalam menyusun dan mengubah dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra serta Renja Perangkat Daerah) adalah Permendagri No. 86 Tahun 2017. Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dan belanja daerah mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Kalasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka, sesungguhnya merencanakan dan menganggarkan SPM di daerah sebagai dasar dari pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar SPM adalah bagaimana mengintegrasikan kebijakan mengenai SPM menjadi program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator-indikatornya dan kemudian menjadi mata anggaran.

Tahapan penerapan SPM sudah diatur dalam Permendagri No. 100/2018 yang kemudian direvisi menjadi Permendagri No. 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Namun penerapan SPM sendiri sesungguhnya mencakup pelaksanaan beberapa regulasi lain, terutama yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Untuk itu, diperlukan acuan khusus dalam bentuk panduan

bagi daerah yang dapat memberikan penjelasan operasional mengenai bagaimana melaksanakan tahapan demi tahapan penerapan SPM, sampai akhirnya pemerintah daerah dapat mengintegrasikan kebijakan SPM menjadi nomenklatur program dan anggaran sebagai landasan dalam melaksanakan dan mencapai target pemenuhan SPM

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Jambi menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH**

**2.1 Capaian Kinerja Makro**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	79.12	79.58	0.581
2	Angka Kemiskinan	9.02	8.33	- 7.65
3	Angka Pengangguran	10,66	8.95	- 16.041
4	Pertumbuhan Ekonomi	3.94	5.36	36.04
5	Pendapatan Per kapita	52,14	58,34	11,89
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.35	0.36	3.429

**2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN**

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

**2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Pendidikan</b>	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	280	Dinas Pendidikan	
2		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1000	Dinas Pendidikan	
3		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya	-	Dinas Pendidikan	

		pendidikan			
4		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1202	Dinas Pendidikan	
5		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1401	Dinas Pendidikan	
6		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	587	Dinas Pendidikan	
7		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	203	Dinas Pendidikan	
8		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	189	Dinas Pendidikan	
9		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	500	Dinas Pendidikan	
10		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	500	Dinas Pendidikan	
11		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	500	Dinas Pendidikan	
12		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	726	Dinas Pendidikan	
13		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	724	Dinas Pendidikan	
14		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	3143	Dinas Pendidikan	
15		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3081	Dinas Pendidikan	

16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1634	Dinas Pendidikan	
17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	208	Dinas Pendidikan	
18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	73	Dinas Pendidikan	
19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	208	Dinas Pendidikan	
20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	73	Dinas Pendidikan	
21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2789	Dinas Pendidikan	
22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1555	Dinas Pendidikan	
23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	164	Dinas Pendidikan	
24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	49	Dinas Pendidikan	
25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	402	Dinas Pendidikan	
26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	202	Dinas Pendidikan	
27	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	12	Dinas Pendidikan	
28	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	
29	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah	-	Dinas Pendidikan	

		pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
30		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	455	Dinas Pendidikan	
31		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	137	Dinas Pendidikan	
32		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	99	Dinas Pendidikan	
33		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	164	Dinas Pendidikan	
34		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8	Dinas Pendidikan	
<b>Kesehatan</b>					
1		Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	17	Dinas Kesehatan	
2		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	7	Dinas Kesehatan	
3		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10803	-	
4		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	60	-	
5		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9853	-	
6		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	60	-	
7		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9699	-	
8		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	60	-	
9		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	24784	-	
10		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	120	-	
11		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	60254	-	
12		Jumlah SDM kesehatan	140	-	

		untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasarsesuai standar			
13		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	64522	-	
14		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	120	-	
15		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	
16		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	
17		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12764	-	
18		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100	-	
19		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1045	-	
20		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuaistandar	20	-	
21		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6139	-	
22		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	120		
23		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8135		
24		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standa	120		
25		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	40934		
26		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	790	Dinas PUPR	
2		Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangankabupaten/kota (m)	28	Dinas PUPR	
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	Dinas PUPR	
4		Panjang pantai dikawasan permukiman yg rawan	-	Dinas PUPR	

		abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			
5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangkabupaten/kota	-	Dinas PUPR	
6		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-	Dinas PUPR	
7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	4	Dinas PUPR	
8		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	73	Dinas PUPR	
9		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	70	Dinas PUPR	
10		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	-	Dinas PUPR	
11		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	ADA	Dinas PUPR	
12		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	TIDAK	Dinas PUPR	
13		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	ADA	Dinas PUPR	
14		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	-	Dinas PUPR	
15		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	3	Dinas PUPR	
16		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	38934	Dinas PUPR	
17		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	2874	Dinas PUPR	
18		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat	6767	Dinas PUPR	

		dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T			
19		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	1584	Dinas PUPR	
20		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	1590	Dinas PUPR	
21		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1590	Dinas PUPR	
22		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	-	Dinas PUPR	
23		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	1.01	Dinas PUPR	
24		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	1.01	Dinas PUPR	
25		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	2.48	Dinas PUPR	
26		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	10.91	Dinas PUPR	
27		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0.06	Dinas PUPR	
28		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	2.32	Dinas PUPR	
29		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	1.01	Dinas PUPR	
30		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	28.14	Dinas PUPR	
31		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	199	Dinas PUPR	
32		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	ADA	Dinas PUPR	
33		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	TIDAK	Dinas PUPR	
34		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	-	Dinas PUPR	
35		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-	Dinas PUPR	

36		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	384	Dinas PUPR	
37		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	286	Dinas PUPR	
38		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	510452	Dinas PUPR	
39		Panjang jalan yang dibangun	-	Dinas PUPR	
40		Panjang jembatan yang dibangun	-	Dinas PUPR	
41		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	8726	Dinas PUPR	
42		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	22	Dinas PUPR	
43		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	16213	Dinas PUPR	
44		Panjang jembatan yang direhabilitasi	-	Dinas PUPR	
45		Panjang jalan yang dipelihara	4542	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang dipelihara	18		
46		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	9	Dinas PUPR	
47		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	249	Dinas PUPR	
48		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	249	Dinas PUPR	
49		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1	Dinas PUPR	
50		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	-	Dinas PUPR	
51		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-	Dinas PUPR	

52	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-	Dinas PUPR	
53	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	-	Dinas PUPR	
54	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	-	Dinas PUPR	
55	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	10	Dinas PUPR	
56	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	10	Dinas PUPR	
57	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	10	Dinas PUPR	
58	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-	Dinas PUPR	
59	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	153	Dinas PUPR	
60	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	
61	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan	1	Dinas PUPR	

		pengawasannya			
62		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	
63		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	119	Dinas PUPR	
64		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	-	Dinas PUPR	
65		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	100	Dinas PUPR	
66		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	80	Dinas PUPR	
67		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	Dinas PUPR	
68		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	
69		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	
70		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PUPR	
1	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	622	Dinas PRKP	
2		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	607	Dinas PRKP	
3		Jumlah RT, KK dan Jiwakorban yang rumahnya terkena bencana alam	-	Dinas PRKP	
4		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas PRKP	
5		Jumlah unitrumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas PRKP	

6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai rencana aksi	-	Dinas PRKP	
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	-	Dinas PRKP	
8	Jumlah RT, KK dan Jiwakorban bencana yang terfasilitasi	-	Dinas PRKP	
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	-	Dinas PRKP	
10	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PRKP	
11	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PRKP	
12	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PRKP	
13	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PRKP	
14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PRKP	
15	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	-	Dinas PRKP	
16	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	6712	Dinas PRKP	
17	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	90	Dinas PRKP	
18	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur	2826	Dinas PRKP	



		kawasan kumuh			
19		Jumlah rumah di kab/kota	156936	Dinas PRKP	
20		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	90	Dinas PRKP	
21		Jumlah rumah tidak layak huni	6427	Dinas PRKP	
22		Jumlah rumah yang tidak dihuni	-	Dinas PRKP	
23		Rasio rumah dan KK	186732	Dinas PRKP	
24		Jumlah rumah pembangunan baru	986	Dinas PRKP	
25		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	16	Dinas PRKP	
26		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	94156	Dinas PRKP	
27		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	986	Dinas PRKP	
28		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	6817	Dinas PRKP	
29		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	16	Dinas PRKP	
30		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	10800	Dinas PRKP	
31		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	145	Dinas PRKP	
32		Jumlah pengembang yang teregistrasi	145	Dinas PRKP	
33		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	-	Dinas PRKP	
1	<b>Trantimbumlinmas (POLPP)</b>	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	146	Satpol PP	
2		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2108	Satpol PP	
3		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	21	Satpol PP	
4		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas	11	Satpol PP	

		sebagai PPNS			
5		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	19	Satpol PP	
6		Tersedianyasarana prasarana minimal	100	Satpol PP	
1	Trantibumlinmas (DAMKAR)	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	Disdamkar	
2		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	-	Disdamkar	
3		Presentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	-	Disdamkar	
4		Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/legal	-	Disdamkar	
5		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	-	Disdamkar	
6		Presentase warga negara yang ikut pelatihan	-	Disdamkar	
6		presentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	-	Disdamkar	
7		Presentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	-	Disdamkar	
8		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap staus KLB	-	Disdamkar	
9		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jamb untuk setiap status darurat bencana	-	Disdamkar	
10		presentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	-	Disdamkar	
11		presentase jumlah korban berhasil dicari, ditilong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	-	Disdamkar	
12		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	7	Disdamkar	
13		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	5	Disdamkar	
14	Tersedianya aparatur selama24 (jam) yang dilaksanakan secara	75	Disdamkar		

		bergantian (shift) di kantor kecamatan			
15		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tidak ada	Disdamkar	
16		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	656	Disdamkar	
17		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	202	Disdamkar	
18		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	90	Disdamkar	
19		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	135	Disdamkar	
1	<b>(SOSIAL)</b>	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	252	Dinas Sosial	
2		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usiatelantar dangepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1	Dinas Sosial	
3		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	Dinas Sosial	
4		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	348	Dinas Sosial	
3		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	2	Dinas Sosial	
4		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	1		
5		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	-		
6		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			
7	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah				

8		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan			
9		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia			
10		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat			
11		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			
12		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar			
13		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga			
14		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga			
15		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			
16		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan			
17		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang			
19		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki			
20		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan			
21		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial			
22		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia			
1	<b>Ketenagakerjaan</b>	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1	Dinas TKK dan UKM	
2		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam	50	Dinas TKK dan UKM	

		rencana tenaga kerja			
3		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	-	Dinas TTK dan UKM	
4		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0.03%	Dinas TTK dan UKM	
5		presentase instruktur bersertifikat kompetensi	47.41%	Dinas TTK dan UKM	
6		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	116	Dinas TTK dan UKM	
7		Persentase LPK yang memiliki perizinan	0.01%	Dinas TTK dan UKM	
8		Persentase LPK yang memiliki perizinan	63.16%	Dinas TTK dan UKM	
9		Jumlah penggaur yang dilatih	0.64%	Dinas TTK dan UKM	
10		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	0.64%	Dinas TTK dan UKM	
11		Persentase penyerapan lulusan	25%	Dinas TTK dan UKM	
12		Lulusan bersertifikat kompetensi	100%	Dinas TTK dan UKM	
13		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan Pelatihan	0.57%	Dinas TTK dan UKM	
13		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	-	Dinas TTK dan UKM	
14		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	03.16%%	Dinas TTK dan UKM	
15		Data tingkat produktivitas total	22	Dinas TTK dan UKM	
16		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	03.16%	Dinas TTK dan UKM	
17		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	106	Dinas TTK dan UKM	
18		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	163	Dinas TTK dan UKM	
19		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	135	Dinas TTK dan UKM	
20		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%	Dinas TTK dan UKM	



21	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	51%	Dinas TKK dan UKM
22	Jumlah mogok kerja	1	Dinas TKK dan UKM
23	Jumlah penutupan perusahaan	-	Dinas TKK dan UKM
24	Jumlah perselisihan kepentingan	1	Dinas TKK dan UKM
25	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	-	Dinas TKK dan UKM
26	Jumlah perselisihan PHK	49	Dinas TKK dan UKM
27	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	72	Dinas TKK dan UKM
28	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	3	Dinas TKK dan UKM
29	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang Diberdayakan	1	Dinas TKK dan UKM
30	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	64.71	Dinas TKK dan UKM
31	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	669	Dinas TKK dan UKM
32	Jumlah pencari kerjayang terdaftar di kab/kota	1594	Dinas TKK dan UKM
33	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	30	Dinas TKK dan UKM
34	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	21	Dinas TKK dan UKM
36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3	Dinas TKK dan UKM
37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	Dinas TKK dan UKM
38	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	47	Dinas TKK dan UKM
39	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online	7	Dinas TKK dan UKM

		(SISNAKER)			
40		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	57	Dinas TKK dan UKM	
41		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	57	Dinas TKK dan UKM	
42		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulauan	-	Dinas TKK dan UKM	
43		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	57%	Dinas TKK dan UKM	
44		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	-	Dinas TKK dan UKM	
45		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	-	Dinas TKK dan UKM	
1	<b>Koperasi, usaha kecil dan menengah</b>	presentasi fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3.89%	Dinas TKK dan UKM	
2		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	Dinas TKK dan UKM	
3		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	50	Dinas TKK dan UKM	
4		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	67%	Dinas TKK dan UKM	
5		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	106	Dinas TKK dan UKM	
6		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan	477	Dinas TKK dan UKM	

		wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.45		
7		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0.02	Dinas TKK dan UKM	
8		presentasi fasilitasi penerbitan sertifikat nomor induk koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.73	Dinas TKK dan UKM	
9		presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11.36%	Dinas TKK dan UKM	
10		presentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5	Dinas TKK dan UKM	
11		presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	111	Dinas TKK dan UKM	
12		presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.91%	Dinas TKK dan UKM	
13		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	4.56%	Dinas TKK dan UKM	
14		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	42.44%	Dinas TKK dan UKM	
15		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0.28%	Dinas TKK dan UKM	
16		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1.07%	Dinas TKK dan UKM	
17		presentae jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	7651	Dinas TKK dan UKM	
18		rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1.07%	Dinas TKK dan UKM	
19		persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	2.11%	Dinas TKK dan UKM	
1	<b>DPMPPA</b>	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang	24	Dinas PMPA	

		telah dilatih PUG			
2		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	24	Dinas PMPPA	
3		jumlah medai massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas ppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	-	Dinas PMPPA	
4		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0.05	Dinas PMPPA	
5		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	86.67%	Dinas PMPPA	
6		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0.03%	Dinas PMPPA	
7		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	-	Dinas PMPPA	
8		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kotayang mendapatkan pelatihan	39	Dinas PMPPA	
9		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	73	Dinas PMPPA	
10		Jumlah lembaglayanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	12	Dinas PMPPA	
11		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	-	Dinas PMPPA	
12		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinas PMPPA	
13		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindunganhak perempuan yg telah terstandardisasi	3	Dinas PMPPA	
14		Persentase korbankekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas PMPPA	
1	<b>Pertanian</b>	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	100	Dinas Pertanian dan Pangan	

2		Prasarana pertanian yang digunakan	100	Dinas Pertanian dan Pangan	
3		Penerbitan izin usaha pertanian	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
4		Persentase prasarana yang digunakan	100	Dinas Pertanian dan Pangan	
5		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
6		presentse fasilitasi penanggulangan bencana	0.2	Dinas Pertanian dan Pangan	
1	<b>Pangan</b>	tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
2		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
3		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	100	Dinas Pertanian dan Pangan	
4		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergiziseimbang	100	Dinas Pertanian dan Pangan	
5		Tersedianya petaketahanan dan kerentanan pangan	100	Dinas Pertanian dan Pangan	
6		Tertanganinya kerawanan pangan	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
7		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
8		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	100	Dinas Pertanian dan Pangan	
1	<b>Perikanan</b>	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	48	Dinas Pertanian dan Pangan	
2		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100	Dinas Pertanian dan Pangan	
3		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
4		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan	6	Dinas Pertanian dan Pangan	



		dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			
5		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	6596080	Dinas Pertanian dan Pangan	
1	<b>Pertanahan</b>	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	-	Data Nihil	
2		SK walikota tentang penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	-	Data Nihil	
3		SK Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	-	Data Nihil	
4		Dokumen izin membuka tanah	-	Data Nihil	
5		Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	100	Bagian Tata Pemerintahan	
1	<b>Lingkungan hidup</b>	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH)	-	Dinas Lingkungan Hidup	
2		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	Dinas Lingkungan Hidup	
3		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	-	Dinas Lingkungan Hidup	
4		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	2	Dinas Lingkungan Hidup	
5		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	90.63	Dinas Lingkungan Hidup	
6		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	13.79	Dinas Lingkungan Hidup	
7		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	-	Dinas Lingkungan Hidup	
8		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	Dinas Lingkungan Hidup	
9		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan	100	Dinas Lingkungan Hidup	

		PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan			
1	<b>Disdukcapil</b>	Penerbitan akta perkawinan	200	Disdukcapil	
2		Penerbitan akta perceraian	499	Disdukcapil	
3		Penerbitan akta kematian	103.54	Disdukcapil	
4		penyajian data kependudukan	100	Disdukcapil	
1	<b>Keluarga Bencana</b>	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	Dinas PPKB	
2		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22	Dinas PPKB	
3		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17	Dinas PPKB	
4		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100	Dinas PPKB	
5		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	7	Dinas PPKB	
6		presentasi fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	Dinas PPKB	
7		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	63.03	Dinas PPKB	
8		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	12	Dinas PPKB	
9		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	47.47%	Dinas PPKB	
10		persentase kesertaan KB ibupaten dan kota dengan kesertaan rendah	1	Dinas PPKB	
11		Persentase kesertaan KB Penerima Bantuan Iuran (PBI)	22.83%	Dinas PPKB	
1	<b>Perhubungan</b>	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100	Dinas Perhubungan	
2		Terlaksananya pelayanan uji berkala	74.07%	Dinas Perhubungan	
3		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan	100	Dinas Perhubungan	

		pedesaan kelas ekonomi			
4		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	24.87%	Dinas Perhubungan	
1	<b>Penanaman Modal</b>	Perda mengenai pemberian fasilitasi/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	-	DPMPTSP	
2		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	DPMPTSP	
3		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	DPMPTSP	
4		Kegiatan semunar bisnis, forum, one on one meeting	14	DPMPTSP	
5		Kegiatan pameran penanaman modal	3	DPMPTSP	
6		Kegiatan penerimaan misipenanaman modal	-	DPMPTSP	
7		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	17	DPMPTSP	
8		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	5427	DPMPTSP	
9		Laporan realisasi penanaman modal	744785075000	DPMPTSP	
10		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	267	DPMPTSP	
11		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	571	DPMPTSP	
12		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	67	DPMPTSP	
1	<b>Pemuda dan olahraga</b>	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	100	DISPORA	
2		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	64	DISPORA	
3		Jumlah pemuda mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	450	DISPORA	
4		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	100	DISPORA	
5		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	14	DISPORA	
6		Jumlah penyelenggaraan	-	DISPORA	

		event OR prestasi tingkat daerah			
1	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	Presentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	56.31	DISKOMINFO	
2		presentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang di sediakan dinas kominfo	56.31	DISKOMINFO	
3		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100	DISKOMINFO	
4		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	-	DISKOMINFO	
5		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	DISKOMINFO	
6		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	DISKOMINFO	
7		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	DISKOMINFO	
8		presentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	DISKOMINFO	
9		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan undang-undang	100	DISKOMINFO	
10		presentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan	21.52	DISKOMINFO	

		pemerintah			
11		presentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	DISKOMINFO	
12		Persentase perangkat daerah yang menyimpandata di pusat data pemerintah	100	DISKOMINFO	
13		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	DISKOMINFO	
14		Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	DISKOMINFO	
15		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	DISKOMINFO	
16		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	37.84	DISKOMINFO	
17		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	0.84	DISKOMINFO	
18		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100	DISKOMINFO	
19		presentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	144.57	DISKOMINFO	
20		Presentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanaka sesuai dengan strtegi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah di tetapkan	100	DISKOMINFO	
1	<b>Persandian</b>	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	DISKOMINFO	
2		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip- prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	91.43	DISKOMINFO	
3		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan	100	DISKOMINFO	



		resiko kategori rendah			
4		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100	DISKOMINFO	
1	<b>Statistik</b>	Tersedianya buku profil daerah	16	DISKOMINFO	
2		Jumlah survey statistic sektoral yang dilakukan	-	DISKOMINFO	
3		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-	DISKOMINFO	
4		Jumlah survey statistic sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	-	DISKOMINFO	
5		Jumlah kompilasi statistic sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	-	DISKOMINFO	
6		presentase kelengkapan meta data kegiatan statistik sektoral	29.27%	DISKOMINFO	
7		presentase kelengkapan metadata variable sektoral	-	DISKOMINFO	
1	<b>Pariwisata</b>	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	26	Dinas Pariwisata	
2		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	26	Dinas Pariwisata	
3		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	100	Dinas Pariwisata	
4		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1738	Dinas Pariwisata	
5		Jumlah promosievent daerah yang terlaksana di dalam negeri	8	Dinas Pariwisata	
6		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	Dinas Pariwisata	
7		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	93	Dinas Pariwisata	
8		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	34	Dinas Pariwisata	
9		presentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	95.44	Dinas Pariwisata	
10		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha	13	Dinas Pariwisata	

		masyarakat			
1	<b>Kebudayaan</b>	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (investasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	4	Dinas Pariwisata	
2		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (enyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	-	Dinas Pariwisata	
3		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	2	Dinas Pariwisata	
4		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	607	Dinas Pariwisata	
5		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	1	Dinas Pariwisata	
6		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	-	Dinas Pariwisata	
7		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-	Dinas Pariwisata	
8		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	-	Dinas Pariwisata	
9		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	1	Dinas Pariwisata	
10		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	Dinas Pariwisata	
11		peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan -sarana dan -praasarana -museum	-	Dinas Pariwisata	
12		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	Dinas Pariwisata	

13		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	-	Dinas Pariwisata	
14		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	-	Dinas Pariwisata	
15		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	-	Dinas Pariwisata	
16		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	-	Dinas Pariwisata	
17		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	-	Dinas Pariwisata	
18		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	-	Dinas Pariwisata	
19		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	-	Dinas Pariwisata	
1	<b>Kearsipan</b>	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
2		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
3		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	27.62	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
4		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	5.34	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
5		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	17668	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
6		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
7		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	2506	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
8		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	520	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
9		Pencarian arsipstatis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
10			Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga	800	Dinas Kearsipan dan perpustakaan

		kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK			
1	<b>Perpustakaan</b>	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	121.51	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
2		Presentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	9.02	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
3		rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	250	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
4		persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2.79	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
5		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	13	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
6		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	-	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	83	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	
1	<b>Perindustrian</b>	Presentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3		presentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (Iu) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4		presentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
5		presentase data perusahaan industri di Kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	0.42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
1	<b>Perdagangan</b>	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2		presentasi penerbitan TDG	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3		presentase gudang yang tidak mempunyai TDG	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

4		presentase penerbitan STPW yang tepat waktu	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
5		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
6		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
7		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	193	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
8		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
9		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
10		presentase alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dalam tahun berjalan	68.59	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
11		presentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

### 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Pendidikan</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	45,63%	Dinas Pendidikan	
2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	82.37%	Dinas Pendidikan	
3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	71.04%	Dinas Pendidikan	
4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0.91%	Dinas Pendidikan	
1	<b>Kesehatan</b>	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,26%	Dinas Kesehatan	
2		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	94.11%	Dinas Kesehatan	
3		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	87.14%	Dinas Kesehatan	

4		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	89.21%	Dinas Kesehatan	
5		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	87.82%	Dinas Kesehatan	
6		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	87.55%	Dinas Kesehatan	
7		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89.89%	Dinas Kesehatan	
8		Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80.65%	Dinas Kesehatan	
9		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80.39%	Dinas Kesehatan	
10		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75.08%	Dinas Kesehatan	
11		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	0.95%	Dinas Kesehatan	
12		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	68.02%	Dinas Kesehatan	
13		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	48.87%	Dinas Kesehatan	
14		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95.90%	Dinas Kesehatan	
1	<b>Pekerjaan Umum</b>	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	8.62%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	54.94%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	95.17%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	19.75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6		Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

7		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	88.29%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
8		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	55.33%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
9		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	62.79%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
<b>Perumahan Rakyat</b>					
1	<b>Perumahan Rakyat</b>	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	42.10%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	4.09%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0.62%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
<b>Trantibumlinmas (POL PP)</b>					
1	<b>Trantibumlinmas (POL PP)</b>	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP	
2		persentase perda dan perkara yang ditegakan	91.30%	Satpol PP	
<b>Trantibumlinmas (DAMKAR)</b>					
1	<b>Trantibumlinmas (DAMKAR)</b>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	Damkar	
2		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	Damkar	
3		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	Damkar	
4		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Damkar	
5		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	59090	Damkar	
<b>Trantibumlinmas (SOSIAL)</b>					
1	<b>Trantibumlinmas (SOSIAL)</b>	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	Dinas Sosial	
2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	Dinas Sosial	

		pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
1	<b>Ketenagakerjaan</b>	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
2		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18.30%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
3		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	7428645348.985	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
4		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	24.26%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
5		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	41.53%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
1	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	33.63%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
2		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	44.05%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM	
1	<b>Perlindungan perempuan dan perlindungan anak</b>	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3.19%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0.03%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14.88%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	<b>Pertanian</b>	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	541.153	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	130.282	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
1	<b>Pangan</b>	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	22.92%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
1	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan	66.55%	Dinas Pertanian dan Ketahanan	



		Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP		Pangan	
1	<b>Pertanahan</b>	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
2		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	
3		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	-	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
4		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
6		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
1	<b>Lingkungan Hidup</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	59	Dinas Lingkungan Hidup	
2		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	74.98	Dinas Lingkungan Hidup	
3		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	95.09	Dinas Lingkungan Hidup	
1	<b>Disdukcapil</b>	Perekaman KTP Elektronik	100.036%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	55.90%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3		Kepemilikan akta kelahiran	97.08%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	57.89%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	

		perjanjian kerja sama		Sipil	
1	<b>Keluarga Bencana</b>	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,08 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	
2		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	58.70%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	
3		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	22.23%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	
1	<b>Perhubungan</b>	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0.73	Dinas Perhubungan	
2		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.35	Dinas Perhubungan	
1	<b>Penanaman Modal</b>	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	78.25%	Dinas Penanamam Modal	
1	<b>Pemuda dan Olahraga</b>	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.81%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.17%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
3		Peningkatan Prestasi Olahraga	69	Dinas Pemuda dan Olahraga	
1	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	56.31%	Dinas Komunikasi dan Informasi	
2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	93.67%	Dinas Komunikasi dan Informasi	
3		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.65%	Dinas Komunikasi dan Informasi	
1	<b>Persandian</b>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	75.86 %	Dinas Komunikasi dan Informasi	
1	<b>Statistik</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informasi	

2		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informasi	
1	<b>Pariwisata</b>	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	- 44.57%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	40.43%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3		Tingkat Hunian Akomodasi	54.35%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
4		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2.45	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Di lampirkan surat keterangan
5		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	22.40	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
1	<b>Kebudayaan</b>	Terlestarikannya Cagar Budaya	16.88%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
1	<b>Kearsipan</b>	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban pasal 40 dan pasal 29 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	59%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	15%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
1	<b>Perpustakaan</b>	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	66	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	37.25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
1	<b>Perindustrian</b>	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	- 0.25%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	100%	Dinas Perindustrian dan	

		Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Perdagangan	
4		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
5		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data tidak ada, dilampirkan surat keterangan
6		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	65	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
1	<b>Perdagangan</b>	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2		Persentase kinerja realisasi pupuk	32.86%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	68.59%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Perencanaan keuangan</b>	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	29.34 %	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
2		Rasio PAD	93.77 %	Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah	
3		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP:	Inspektorat Kota Jambi	
4		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh	Inspektorat Kota Jambi	

			BPKP:		
5		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	73.52%	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
7		Opini Laporan Keuangan	10	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
1	<b>Keuangan</b>	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	10.48%	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
2		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	8.82%	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
3		Assets Management	4	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
4		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	10.79%	Badan Pengeloah Keuangan Daerah	
1	<b>Pengadaan</b>	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0.25%	Unit Pelayanan Pengadaan	
2		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	1.80%	Unit Pelayanan Pengadaan	
3		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	99.16 %	Unit Pelayanan Pengadaan	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	9.83	Unit Pelayanan Pengadaan	
1	<b>Kepegawaian</b>	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	75.78%	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
2		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20.33%	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
3		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	43.56%	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	

## 2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

### a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja Pemerintah Kota Jambi dilakukan secara berkala secara tahunan dengan sistem desk timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 dengan menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Jambi tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

### b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Jambi pada Tahun 2022 yang diperbandingkan dengan target Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta target akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Tahun 2022 tercantum dalam tabel berikut ini:



### c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Jambi dilakukan secara berkala secara tahunan dengan sistem desk timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 dengan menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun

PENILAIAN	Bobot	NILAI							
		2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	BB	B	BB	B	BB	B
Nilai	100		65,02		66,01		66,6		Belum di release

2019 sampai tahun 2022 dapat dilihat dari tabel Perolehan Nilai SAKIP berikut:

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi tahun 2019 s/d 2021 menunjukkan trend nilai yang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan komitmen positif dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi. Sedangkan untuk 2022, meskipun Nilai SAKIP belum di release, namun Pemerintah Kota Jambi kembali memperoleh penghargaan dengan kategori penilaian tingkat akuntabilitas kinerja Baik (B) yang telah diumumkan oleh KemenPAN-RB pada tanggal 6 Desember 2022.

Interprestasi dari nilai B (Baik) ini menggambarkan bahwa baru 1/3 unit kerja memiliki AKIP yang sudah baik, khususnya pada unit kerja utama. Dengan demikian, masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Setiap komponen penilaian memiliki Sub Komponen dengan beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan Sub Komponen tersebut. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan “judgement” dari evaluator dan terkait kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yangtelah ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) atas Implementasi SAKIP.

Berdasarkan kriteria sub komponen penilaian pada LKE, maka leading sector untuk komponen penilaian Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja adalah Bappeda Kota Jambi. Perolehan nilai komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja sebagai pembentuk nilai SAKIP Pemerintah Kota

Jambi 2019 s/d 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI					
			2019		2020		2021	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	21,85	<b>21,85</b>	22,01	<b>22,23</b>	22,30	<b>22,36</b>
2	Pengukuran Kinerja	25	15,75	<b>15,75</b>	15,90	<b>16,04</b>	16,00	<b>16,10</b>

#### d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Berdasarkan pada Tabel dibawah dapat di sampaikan bahwa semua indikator Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Jambi pada Tahun 2022 yang diperbandingkan dengan target Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta target akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Tahun 2022 tercantum dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		2022			Target Akhir RPJMD 2024
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	2,81	93,66%	3,2
		2.	Nilai SAKIP	B	B	100	BB
		3.	Indeks Pelayanan Publik	3,99 (B)	4,205 (A-)	105,38%	4,05 (B)
2.	Menurunkan Tingkat Pelanggaran Terhadap PERDA dan PERWAL	4.	Persentase PERDA Dan PERWAL Yang Ditegakkan	84%	91,30%	108,69	88%
3.	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	5.	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	63.31%	63,77%	100,73%	70,99%
4.	Meningkatnya Kualitas Air	6.	Indeks Kualitas Air	39.9	42,50	106,52%	40,2
5.	Meningkatnya Kualitas Udara	7.	Indeks Kualitas Udara	80.76	88,09	109,08%	80,8
6.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	8.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.87	49,92	111,25%	44,92
7.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	9.	Indeks Ketahanan Pangan	80	77,50*	96,87	84
8.	Meningkatkan	10.	Persentase	9%	12,85%	142,77	9%

	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
9.	Meningkatkan Realisasi Investasi	11.	Realisasi Investasi	498.35 M	744,785 M	149,45	575,70 M
10.	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,6	8,95	106,77	8,98
11.	Meningkatkan Derajat Kesehatan	13.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.81	72,99	100,24%	72,97
12.	Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	14.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.38	15,38	100	15,40
13.	Meningkatkan Kesetaraan Gender	15.	Indeks Pemberdayaan Gender	68,4	67,88 (2021)	99,24	69.95
14.	Meningkatkan Prestasi Dan Kreativitas Kepemudaan	16.	Indeks Pembangunan Pemuda	57.90	57,96	100,1%	58,5
<b>CAPAIAN KINERJA RATA-RATA PEMERINTAH KOTA JAMBI</b>				<b>108,17%</b>		<b>SANGAT TINGGI</b>	

**e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai**

Realisasi Kinerja dan Anggaran Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Jambi	Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran
108,17 %	89,52%	18,65%

Analisis efektifitas anggaran dan kinerja dapat dilihat dari perbandingan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran. Dari table di atas, diketahui bahwa kinerja fisik sasaran daerah secara umum sudah tercapai melebihi 100%, dan untuk realisasi anggaran mencapai 89,52%, artinya anggaran yang ada sudah digunakan secara optimal untuk mencapai target sasaran. Efisiensi disebabkan oleh sisa anggaran lelang, sisa pengadaan barang/jasa lainnya serta penyesuaian kebutuhan anggaran aparatur yang bersifat rutin maupun anggaran antisipasi seperti klaim asuransi kesehatan, perjalanan dinas, bahan bakar kendaraan serta alat tulis kantor.

#### f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah. Penyelenggaraan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pemerintah Kota Jambi dianggarkan melalui APBD Perubahan Kota Jambi Tahun anggaran 2022 dengan total sebesar Rp. 1.812.932.658.629,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.622.847.922.178,57 dengan serapan mencapai sebesar 89,52%, uraian realisasi keuangan program dapat dilihat sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	313.490.031.893,00	263.151.956.266,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	158.763.917.938,00	151.471.237.190,00
3	Program Pengembangan Kurikulum	28.919.870,00	24.031.750,00
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	79.392.800,00	49.588.000,00
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	132.326.207,00	120.044.515,00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	214.296.204.113,00	198.382.870.014,96
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75.631.791.662,00	64.511.461.425,00
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.652.278.165,00	1.509.927.692,00
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	685.384.826,00	624.508.753,00
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	742.599.364,00	576.032.212,00
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.357.093.343,00	15.376.693.469,00
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	31.052.932.890,00	30.567.379.351,00
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.959.483.620,00	9.822.101.940,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.776.842.025,00	1.775.798.025,00
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.099.334.849,00	9.665.534.620,00
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.358.967.500,00	1.355.292.900,00
17	Program Pengembangan Permukiman	47.165.247.879,00	47.058.643.940,00
18	Program Penataan Bangunan Gedung	148.069.062.057,00	122.327.031.512,00
19	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	5.658.407.221,00	5.605.574.335,00
20	Program Penyelenggaraan Jalan	56.708.919.400,00	56.346.737.556,00
21	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.950.513.029,00	1.789.293.195,00
22	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.661.413.300,00	1.400.414.213,00
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.470.995.868,00	6.463.880.747,00
24	Program Pengembangan Perumahan	1.070.703.191,00	938.427.933,00
25	Program Kawasan Permukiman	5.812.315.558,00	2.516.483.028,00
26	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	29.389.501.042,00	28.577.782.776,00
27	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	22.619.495,00	4.987.000,00
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.140.851.793,00	8.728.088.006,00
29	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.202.807.820,00	7.119.087.398,00
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.931.015.360,00	7.515.272.434,00
31	Program Penanggulangan Bencana	696.420.693,00	542.308.414,00
32	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.587.076.469,00	4.430.386.045,00
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.098.601.978,00	6.690.737.048,00
34	Program Pemberdayaan Sosial	1.660.545.670,00	1.627.323.974,00
35	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	85.208.310,00	43.515.593,00
36	Program Rehabilitasi Sosial	1.291.283.581,00	1.197.671.265,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
37	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8.126.175.808,00	1.600.487.191,00
38	Program Penanganan Bencana	737.859.710,00	693.637.640,00
39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.815.862.516,00	5.561.545.554,00
40	Program Perencanaan Tenaga Kerja	105.605.512,00	61.397.712,00
41	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.424.947.159,00	419.867.093,00
42	Program Penempatan Tenaga Kerja	204.630.599,00	189.371.383,00
43	Program Hubungan Industrial	376.189.361,00	367.979.512,00
44	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	765.422.308,00	753.898.119,00
45	Program Perlindungan Perempuan	365.119.900,00	274.858.684,00
46	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	173.310.200,00	168.585.200,00
47	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	262.520.254,00	253.079.639,00
48	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	338.626.759,00	338.571.350,00
49	Program Perlindungan Khusus Anak	604.606.251,00	481.668.386,00
50	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	442.726.150,00	438.372.093,00
51	Program Penanganan Kerawanan Pangan	98.996.110,00	96.687.852,00
52	Program Pengawasan Keamanan Pangan	493.154.756,00	489.393.158,00
53	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.736.817.156,00	11.161.845.463,00
54	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	14.776.080,00	13.710.778,00
55	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.828.778.165,00	1.755.960.427,49
56	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	7.783.655.760,00	7.654.792.957,00
57	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100.130.521,00	85.004.250,00
58	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	375.281.111,00	342.281.142,00
59	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	166.530.405,00	166.338.500,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
60	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	123.154.601,00	116.336.360,00
61	Program Pengelolaan Persampahan	32.101.551.442,00	31.586.863.517,00
62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.171.722.929,00	6.193.691.588,00
63	Program Pendaftaran Penduduk	273.673.290,00	266.384.690,00
64	Program Pencatatan Sipil	339.557.215,00	332.148.319,00
65	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.213.547.694,00	2.132.935.927,00
66	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	32.574.960,00	32.574.960,00
67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.875.031.975,00	5.696.857.314,00
68	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.655.201.552,00	4.634.234.621,00
69	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.398.661.456,00	5.163.074.683,00
70	Program Pengendalian Penduduk	250.971.951,00	250.857.599,00
71	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	3.697.299.991,00	3.289.446.775,00
72	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.825.447.106,00	1.181.378.858,00
73	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.675.873.466,00	11.168.607.989,00
74	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	11.990.483.959,00	11.607.362.119,00
75	Program Pengelolaan Pelayaran	156.305.400,00	152.370.900,00
76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.199.463.343,00	5.964.487.412,00
77	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4.842.432.286,00	4.826.901.019,00
78	Program Aplikasi Informatika	3.695.591.990,00	3.663.143.460,00
79	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	33.443.984,00	31.235.440,00
80	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	592.859.498,00	591.645.951,00
81	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	148.033.430,00	140.771.530,00
82	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	3.319.837.164,00	620.379.189,00
83	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.159.765.737,00	8.376.949.645,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
84	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	71.323.400,00	69.653.400,00
85	Program Promosi Penanaman Modal	233.758.660,00	221.947.348,00
86	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.143.968.349,00	1.019.866.298,00
87	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	659.549.441,00	625.763.525,00
88	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	47.222.759,00	47.203.568,00
89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.125.760.200,00	4.734.542.363,00
90	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.494.830.000,00	1.484.439.390,00
91	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.568.074.180,00	6.202.602.732,00
92	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.139.930.616,00	1.134.117.615,00
93	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	85.317.516,00	83.531.260,00
94	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	60.800.300,00	59.108.109,00
95	Program Pengembangan Kebudayaan	949.199.222,00	821.838.112,00
96	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	97.296.190,00	96.535.190,00
97	Program Pembinaan Sejarah	121.404.970,00	72.146.914,00
98	Program Pembinaan Perpustakaan	820.320.613,00	811.837.766,00
99	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	109.413.515,00	109.319.515,00
100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.653.390.978,00	7.146.772.242,00
101	Program Pengelolaan Arsip	736.843.362,00	714.266.086,00
102	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	265.435.828,00	252.739.654,00
103	Program Perizinan Penggunaan Arsip	7.482.679,00	7.482.679,00
104	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	73.255.200,00	73.105.200,00
105	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	439.175.881,00	434.693.661,00
106	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	97.214.413,00	95.784.221,00
107	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.158.035.410,00	4.890.750.065,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
108	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	988.777.564,00	804.800.790,00
109	Program Pemasaran Pariwisata	1.185.940.647,00	1.124.742.200,00
110	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.038.998.820,00	1.008.632.161,00
111	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.566.059.712,00	13.178.678.220,00
112	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.966.977.449,00	1.251.749.792,00
113	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	70.000.000,00	69.597.000,00
114	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	930.057.165,00	857.843.634,00
115	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	104.232.560,00	102.973.498,00
116	Program Penyuluhan Pertanian	413.336.845,00	389.310.193,00
117	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.647.271.847,00	8.877.297.289,00
118	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	89.524.300,00	75.727.400,00
119	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.561.135.229,00	1.530.979.350,00
120	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.017.773.446,00	955.819.050,00
121	Program Pengembangan Ekspor	79.347.196,00	78.632.569,00
122	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	117.554.090,00	114.407.925,00
123	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	989.779.458,00	925.135.127,00
124	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.479.327.215,00	1.472.897.387,00
125	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	63.744.234,00	63.171.340,00
126	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	48.642.985,00	47.969.030,00
127	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.816.816.728,00	37.233.135.520,00
128	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	26.511.730.716,00	25.809.319.312,00
129	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.941.259.344,00	1.890.588.335,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
130	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.453.209.450,00	40.711.600.524,00
131	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	37.349.313.539,00	28.398.122.002,00
132	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.342.161.253,00	7.732.639.645,00
133	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.121.299.264,00	945.473.911,00
134	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.211.019.387,00	1.021.530.948,00
135	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.246.364.997,00	8.073.243.765,00
136	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.538.905.228,00	14.075.612.543,00
137	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.180.555.039,00	1.159.474.621,00
138	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.659.284.219,00	21.099.944.533,00
139	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.472.225.738,00	4.728.981.146,36
140	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.272.733.062,00	8.577.279.339,00
141	Program Kepegawaian Daerah	2.259.913.048,00	1.444.331.384,00
142	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.294.131.175,00	2.529.157.624,00
143	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	683.358.616,00	630.557.656,00
144	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.209.047.866,00	9.059.612.615,00
145	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.227.345.000,00	810.425.000,00
146	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.126.175.000,00	636.000.000,00
147	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.939.737.978,00	6.745.551.095,00
148	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	333.717.315,00	328.292.830,00
149	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.216.007.137,00	4.136.900.736,00
150	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	463.900.450,00	426.578.950,00
151	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	526.264.450,00	511.272.300,00
152	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.277.776.772,00	7.099.606.229,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
153	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.994.331.129,00	1.987.718.012,00
154	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.926.121.740,00	3.861.967.752,00
155	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	227.608.377,00	188.450.577,00
156	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	643.972.533,00	626.609.333,00
157	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.306.421.286,00	8.175.005.929,00
158	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	217.213.870,00	216.807.133,00
159	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.743.826.088,00	4.688.986.558,00
160	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	525.085.150,00	448.575.550,00
161	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	368.032.580,00	367.957.490,00
162	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.501.165.103,00	5.319.368.075,00
163	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	313.651.000,00	299.917.400,00
164	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.665.335.270,00	1.522.438.664,00
165	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	582.387.635,00	540.725.850,00
166	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	460.157.301,00	433.668.500,00
167	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.842.041.770,00	6.624.654.972,00
168	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.324.853.111,00	2.284.696.571,00
169	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.410.106.592,00	3.395.818.008,00
170	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	499.671.800,00	464.727.800,00
171	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	211.252.500,00	211.132.500,00
172	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.691.195.226,00	9.401.406.369,00
173	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	627.851.500,00	618.576.100,00
174	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.989.726.850,00	4.730.510.696,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
175	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	694.050.900,00	632.855.800,00
176	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.288.711.700,00	1.273.516.950,00
177	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.949.023.879,00	5.723.407.404,00
178	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	211.423.140,00	208.437.940,00
179	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.095.742.054,00	2.038.596.852,00
180	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	364.884.998,00	332.074.998,00
181	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	339.971.499,00	321.783.999,00
182	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.137.512.507,00	6.900.883.065,00
183	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	147.758.735,00	146.983.235,00
184	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.963.385.022,00	1.804.738.090,00
185	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	449.649.700,00	398.532.900,00
186	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	264.413.500,00	257.013.500,00
187	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.937.564.648,00	8.775.905.063,00
188	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	691.880.276,00	691.408.462,00
189	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.304.408.497,00	4.255.282.164,00
190	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	430.189.000,00	393.483.300,00
191	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	351.895.300,00	351.816.700,00
192	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.741.567.172,00	6.173.127.772,00
193	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	420.678.810,00	403.618.410,00
194	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.592.715.446,00	3.417.892.263,76
195	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	433.035.800,00	397.585.300,00
196	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	289.121.450,00	285.181.750,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
197	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.325.739.801,00	7.175.114.890,00
198	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	128.761.090,00	119.622.550,00
199	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.798.437.387,00	4.738.819.543,00
200	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	449.228.550,00	412.169.550,00
201	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	463.234.099,00	462.491.599,00
202	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.606.084.228,00	4.270.627.709,00
203	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	315.403.000,00	295.537.000,00
204	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.487.851.066,00	1.478.852.066,00
205	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	716.650.000,00	707.762.500,00
206	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	248.069.000,00	208.045.600,00
207	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	134.651.000,00	131.311.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.812.932.658.629,00</b>	<b>1.622.847.922.178,57</b>

## BAB III

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah.

Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Sebagai Konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing – masing kementerian Lembaga, Departemen, Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan (Bendahara Umum Negara) berupa daftar isina Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada satuan kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Jambi tidak mendapatkan dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jambi.

## BAB IV

# PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### 4.1 URUSAN PENDIDIKAN

#### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, untuk urusan bidang Pendidikan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima pelayanan dasar adalah peserta didik yang berusia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini.

b. Pendidikan Dasar

Penerima pelayanan dasar adalah peserta didik yang berusia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 tahun sampai 18 tahun. Dimana jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

#### 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu dalam rangka melaksanakan sasaran strategis jangka menengah.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Elemen Data	Target Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD Jumlah penduduk usia 5-6 tahun	100 %

2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar <hr/> Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	100 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan <hr/> Jumlah penduduk usia 7-18 tahun	100 %

#### 4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Berikut realisasi program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian SPM urusan pendidikan tahun 2022:

**Tabel**  
**Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022**

NO.	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MADYA			86.61%
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN DASAR USIA DINI</b>				
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>85.00%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	10,107	8,152	1,955	81%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				
		<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>100%</b>
	1 . Buku gambar	10,107	7,000	3,107	69.26%
	2 . Alat mewarnai	10,107	1,000	9,107	9.89%
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	0	0	0	0%
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	351	209	142	59.54%
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	940	587	353	62.45%
	<b>JUMLAH</b>	<b>21,505</b>	<b>8,796</b>	<b>12,709</b>	<b>201.14%</b>
<b>2</b>	<b>PENDIDIKAN DASAR</b>				<b>98.48%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	28,476	28,476	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>18.48%</b>
		<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>92.41%</b>
	1 . Buku teks pelajaran	28,476	28,476	0	100.00%
	2 . Perlengkapan belajar	28,476	28,476	0	100.00%
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	279	187	92	67.03%
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	175	150	25	85.71%
	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2,361	2,331	30	98.73%
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	1,648	1,474	174	89.44%
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	4,857	4,776	81	98.33%
	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	279	279	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>66,551</b>	<b>66,149</b>	<b>402</b>	<b>739.24%</b>

<b>3</b>	<b>PENDIDIKAN KESETARAAN</b>				<b>88.77%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>75.53%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	<b>1,609</b>	<b>1,519</b>	<b>90</b>	<b>94%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>13.24%</b>
		<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>66.21%</b>
	1 . Modul belajar	1,519	1,519	0	100.00%
	2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	75	51	24	68.00%
	3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	0	0	0	0%
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	107	66	41	61.68%
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	13	13	0	100.00%
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	13	13	0	100.00%
	7 . Perlengkapan belajar	300	0	300	0%
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	13	13	0	100.00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,040</b>	<b>1,675</b>	<b>365</b>	<b>529.68%</b>

Tabel  
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI			
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PENDIDIKAN	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>MENINGKATNYA INDEK REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>B NILAI</b>	<b>313,490,031,893</b>	<b>B NILAI</b>	<b>263,151,956,266</b>	<b>83.94</b>	
		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai AKIP (A)</b>	<b>NILAI AKIP (A)</b>	<b>411,710,620</b>	<b>NILAI AKIP (A)</b>	<b>369,100,022</b>	<b>89.65</b>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	308,306,322	12 Dokumen	266,413,072	86.41	100.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	103,404,298	4 Laporan	102,686,950	99.31	100.00
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>309,397,375,180</b>	<b>100%</b>	<b>259,558,184,469</b>	<b>83.89</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2207 orang	308,432,319,780	2207 orang	258,785,963,669	83.90	100.00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85 Dokumen	943,120,400	85 Dokumen	761,765,800	80.77	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	21,935,000	1 Dokumen	10,455,000	47.66	100.00
		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>915,076,440</b>	<b>100%</b>	<b>799,671,800</b>	<b>87.39</b>	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	40,238,040	1 Dokumen	32,508,000	80.79	100.00
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	21,900,000	1 Laporan	14,400,000	65.75	100.00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	852,938,400	12 Laporan	752,763,800	88.26	100.00
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>205,450,000</b>	<b>100%</b>	<b>182,719,647</b>	<b>88.94</b>	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	169 Paket	125,250,000	159 Paket	109,246,200	87.22	100.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	80,200,000	8 Orang	73,473,447	91.61	100.00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI			
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>1,236,410,072</b>	<b>100%</b>	<b>1,180,216,012</b>	<b>95.46</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	11,595,000	50 Paket	11,375,000	98.10	100.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	190,948,898	15 Unit	177,180,000	92.79	100.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	57 Paket	119,644,188	57 Paket	119,170,000	99.60	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	73,521,986	5 Paket	53,938,550	73.36	100.00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	17,250,000	1 Laporan	7,237,500	41.96	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	823,450,000	3 Laporan	811,314,962	98.53	100.00
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>552,945,400</b>	<b>100%</b>	<b>500,973,045</b>	<b>90.60</b>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	232,000,000	3 Laporan	196,797,845	84.83	100.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	320,945,400	3 Laporan	304,175,200	94.77	100.00
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>771,064,181</b>	<b>100%</b>	<b>561,091,271</b>	<b>72.77</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48,000,000	1 Unit	23,238,128	48.41	100.00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	107 Unit	664,808,181	107 Unit	505,833,143	76.09	100.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	41,756,000	41 Unit	15,620,000	37.41	100.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	16,500,000	1 Unit	16,400,000	99.39	100.00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI			
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD</b>	<b>99.49 Persen</b>	<b>158,763,917,938</b>	<b>99.49 Persen</b>	<b>151,471,237,190</b>	<b>95.41</b>	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Sekolah Dasar yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	90%	97,494,772,552	90%	95,583,597,846	98.04	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	533,824,712	5 Ruang	532,686,883	99.79	100.00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12 Unit	1,659,326,594	12 Unit	1,648,741,134	99.36	100.00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	33 Unit	6,188,974,106	33 Unit	6,050,673,855	97.77	100.00
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	54 Paket	2,925,400,023	54 Paket	2,921,039,000	99.85	100.00
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6 Unit	107,341,700	6 Unit	106,947,000	99.63	100.00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	umlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	886 Peserta Didik	1,123,253,900	722 Peserta Didik	838,231,000	74.63	100.00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	48 Paket	6,103,268,839	48 Paket	6,082,941,799	99.67	100.00
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	204 Satuan Pendidikan	48,782,000	204 Satuan Pendidikan	45,282,000	92.83	100.00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	389 Peserta Didik	792,196,084	389 Peserta Didik	741,904,290	93.65	100.00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1678 Orang	25,235,589,700	1678 Orang	24,659,341,500	97.72	100.00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	388,862,220	150 Orang	343,090,528	88.23	100.00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI			
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	204 Satuan Pendidikan	217,170,600	204 Satuan Pendidikan	209,712,000	96.57	100.00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	204 Satuan Pendidikan	52,135,035,274	204 Satuan Pendidikan	51,367,301,857	98.53	100.00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	204 Orang	35,746,800	204 Orang	35,705,000	99.88	100.00
		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Meningkatnya Sekolah Menengah Pertama yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)</b>	<b>85%</b>	<b>49,853,966,012</b>	<b>85%</b>	<b>45,415,001,444</b>	<b>91.10</b>	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	429,349,619	5 Unit	428,143,350	99.72	100.00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1,900,044,543	5 Ruang	1,887,784,307	99.35	100.00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	3,062,950,440	8 Unit	3,033,700,987	99.05	100.00
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	1,240,963,029	10 Paket	1,220,965,000	98.39	100.00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	762 Peserta Didik	1,446,234,900	724 Peserta Didik	1,334,338,400	92.26	100.00
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	98,568,000	5 Paket	97,550,000	98.97	100.00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	950,116,446	10 Paket	853,446,446	89.83	100.00
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	18898 Peserta Didik	59,650,400	18898 Peserta Didik	56,746,700	95.13	100.00
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	26 Satuan Pendidikan	207,729,100	26 Satuan Pendidikan	207,059,500	99.68	100.00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI			
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	669 Peserta Didik	450,333,300	669 Peserta Didik	376,729,800	83.66	100.00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	469 Orang	7,743,153,800	469 Orang	7,556,357,800	97.59	100.00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	66 Orang	103,665,750	66 Orang	84,502,050	81.51	100.00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	72 Satuan Pendidikan	113,022,109	72 Satuan Pendidikan	96,132,108	85.06	100.00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	72 Satuan Pendidikan	31,950,764,726	72 Satuan Pendidikan	28,094,959,296	87.93	100.00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	72 Orang	97,419,850	72 Orang	86,585,700	88.88	100.00
		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Meningkatnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)</b>	<b>65%</b>	<b>8,448,173,527</b>	<b>65%</b>	<b>7,702,588,530</b>	<b>91.17</b>	
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1000 Paket	120,001,134	1000 Paket	119,819,670	99.85	100.00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	20 Paket	518,991,000	20 Paket	452,658,680	87.22	100.00
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	8152 Peserta Didik	46,722,400	8152 Peserta Didik	46,236,500	98.96	100.00
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	40 Satuan Pendidikan	22,107,250	40 Satuan Pendidikan	21,847,500	98.83	100.00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	300 Orang	794,992,400	300 Orang	788,748,000	99.21	100.00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI			
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	227 Orang	220,598,681	227 Orang	217,482,845	98.59	100.00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	345 Satuan Pendidikan	124,096,900	345 Satuan Pendidikan	117,341,500	94.56	100.00
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	345 Satuan Pendidikan	6,537,000,000	345 Satuan Pendidikan	5,877,527,735	89.91	100.00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	345 Orang	63,663,762	345 Orang	60,926,100	95.70	100.00
		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Meningkatnya Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)</b>	<b>72.90 persen</b>	<b>2,967,005,847</b>	<b>72.90 persen</b>	<b>2,770,049,370</b>	<b>93.36</b>	
		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	100 Paket	34,390,947	100 Paket	34,252,970	99.60	100.00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1609 Peserta Didik	17,040,830	1609 Peserta Didik	16,855,300	98.91	100.00
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	10 Satuan Pendidikan	56,251,410	10 Satuan Pendidikan	54,123,100	96.22	100.00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	16 Orang	87,591,460	16 Orang	83,726,600	95.59	100.00
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	2,672,100,000	14 Satuan Pendidikan	2,487,700,000	93.10	100.00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/Kesetaraan	14 Orang	99,631,200	14 Orang	93,391,400	93.74	100.00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI			
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>MENINGKATNYA KOMPETENSI PESERTA DIDIK TERHADAP KEARIFAN LOKAL</b>	75 Persen	28,919,870	75 Persen	24,031,750	83.10	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan Dasar	86%	15,940,750	86%	11,367,050	71.31	
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	15,940,750	1 Dokumen	11,367,050	71.31	100.00
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal	70%	12,979,120	70%	12,664,700	97.58	
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	12,979,120	1 Dokumen	12,664,700	97.58	100.00
		<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>MENINGKATNYA KINERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	100 Persen	79,392,800	100 Persen	49,588,000	62.46	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru dan Peserta Didik Sesuai SNP	56%	79,392,800	56%	49,588,000	62.46	
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	48,851,800	1 Dokumen	45,088,000	92.30	100.00
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	30,541,000	1 Dokumen	4,500,000	14.73	100.00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI			
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>TERTIB PENGELOLAAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	5 Persen	132,326,207	5 Persen	120,044,515	90.72	
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%	66,577,687	100%	64,069,315	96.23	
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25 Dokumen	66,577,687	25 Dokumen	64,069,315	96.23	100.00
		Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%	65,748,520	100%	55,975,200	85.14	
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	70 Dokumen	65,748,520	70 Dokumen	55,975,200	85.14	100.00
<b>JUMLAH</b>					<b>472,494,588,708</b>		<b>414,816,857,721</b>	<b>87.79</b>	

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja operasi dan belanja modal ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 472,494,588,708,-** yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp. 430,468,634,010,-** dan Belanja Modal **Rp. 42,025,954,698,-** Jika dibanding dengan jumlah anggaran belanja tahun 2021 sebesar **Rp. 479,280,326,714,-** maka tahun 2022 ini belanja mengalami *penurunan* sebesar **Rp. 6,785,738,006,-** atau sebesar **1,42%**.

Realisasi dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel**  
**Komposisi Belanja OPD Dinas Pendidikan Kota Jambi**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	430,468,634,010,-	373,084,525,663,-	86,67
2	Belanja Modal	42,025,954,698,-	41,732,332,058,-	99,30
	<b>Total Anggaran</b>	<b>472,494,588,708,-</b>	<b>414,816,857,721,-</b>	<b>87,79</b>

***Komposisi Belanja Operasi :***

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	309.965.288.180,-	260.058.358.469,-	83,90
2	Belanja Barang & Jasa	84.563.035.725,-	82.719.028.804,-	97,82
3	Belanja Hibah	33.505.510.105,-	28.268.538.390,-	84,37
4	Belanja Bantuan Sosial	2.434.800.000,-	2.038.600.000,-	83,73
	<b>Total Anggaran</b>	<b>430,468,634,010,-</b>	<b>373,084,525,663,-</b>	<b>86,67</b>

**Komposisi Belanja Modal :**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.341.240.648,-	17.189.670.570,-	99,13
2	Belanja Modal Gedung & Bangunan	12.692.759.363,-	12.612.327.905,-	99,37
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.991.954.687,-	11.930.333.583,-	99,49
<b>Total Anggaran</b>		<b>42,025,954,698,-</b>	<b>41,732,332,058,-</b>	<b>99,30</b>

**4.1.5 Dukungan Personil**

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik langsung maupun tidak langsung yang terdiri dari Personil Inti Pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tahun 2022, dapat digambarkan pada tabel berikut :

No.	Unit Kerja	ASN		
		PNS	NON PNS	Jumlah
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Sekretariat	17	36	53
4	Bidang PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan	7	6	13
5	Bidang Pembinaan SD	8	5	13
6	Bidang Pembinaan SMP	9	4	13
7	Bidang PTK dan Kurikulum Mulok	10	7	17
<b>Jumlah</b>		<b>53</b>	<b>58</b>	<b>111</b>
8	Pengawas TK	4		4
9	Pengawas SD	8		8
10	Pengawas SMP	10		10
11	Penilik	16		16
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>		<b>38</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>91</b>	<b>58</b>	<b>149</b>

NO.	JENIS KEPEGAWAIAN	JENJANG PENDIDIKAN								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	S1	S2	
1	ASN			8			1	29	15	53
2	NON ASN	2		15		1	2	37	1	58
3	PENGAWAS TK							2	2	4
4	PENGAWAS SD							3	5	8
5	PENGAWAS SMP							4	6	10
6	PENILIK							15	1	16
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>		<b>23</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>90</b>	<b>30</b>	<b>149</b>

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal serta langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Permasalahan utama, yaitu:

##### 1. Permasalahan

- Belum tersedianya bank data (*Data Base*) terpusat sebagai sumber data utama Dinas Pendidikan dalam menentukan kebijakan dan merencanakan program kegiatan yang tepat sasaran.
- Belum optimalnya pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, putus sekolah serta peserta didik miskin (tidak mampu) Lingkup Pemerintah Kota Jambi.
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan. Rasio ketersediaan jumlah guru berstatus PNS masih belum ideal, ditambah dengan berkurangnya tenaga pendidik dan kependidikan karena pensiun.
- Tenaga pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan belum 100% berkualifikasi S1/D4.
- Sarana dan prasarana semua jenjang yang belum memadai, masih terdapatnya kekurangan ruang kelas, masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak sedang, dan sarana prasarana pendukung lainnya yang belum sesuai dengan kebutuhan.

##### 2. Solusi

- Dibutuhkan komitmen dan dukungan dalam Penerapan SPM sejak dari tahapan: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- Ketersediaan system bank data (*Data Base*) terpusat pada Dinas Pendidikan Kota Jambi.
- Meningkatkan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan dengan pengangkatan Guru PNS dan P3K serta penyediaan tenaga guru honorer yang terampil.

- Mengoptimalkan pemenuhan sarana prasarana dari Dana Alokasi Khusus dan yang bersumber dari APBD serta melalui Pokok-Pokok Pikiran Dewan.
- Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait untuk lebih fokus terkait dengan pendataan dan verifikasi Anak tidak sekolah, putus sekolah serta peserta didik miskin (tidak mampu) dengan melibatkan instansi/OPD terkait seperti BPS, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### 4.1.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kota Jambi yang bersumber dari berbagai sumber anggaran adalah sebagai berikut :

##### 1. Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD

###### a. Pengadaan Perlengkapan Siswa

Merupakan program pemberian bantuan perlengkapan sekolah yang diberikan kepada peserta didik tidak/kurang mampu, yaitu :

- **Jenjang PAUD**

Bantuan perlengkapan kepada 1.000 peserta didik PAUD terdiri dari buku tulis dan crayon dengan anggaran sebesar Rp. 114.330.000,00.

- **Jenjang PNF**

Bantuan perlengkapan kepada 100 peserta didik Kesetaraan terdiri dari buku tulis, pena, penggaris, pensil dan tipe-ex dengan anggaran sebesar Rp. 28.649.100,00.

- **Jenjang SD**

Bantuan perlengkapan kepada 1.000 peserta didik Sekolah Dasar terdiri dari buku tulis, pena, penggaris, pensil, penghapus pensil/pena dan peruncing pensil dengan anggaran sebesar Rp. 97.680.000,00.

- **Jenjang SMP**

Bantuan perlengkapan kepada 1.000 peserta didik Sekolah Dasar terdiri dari buku tulis, pena, penggaris, pensil, penghapus pensil/pena dan peruncing pensil dengan anggaran sebesar Rp. 98.568.000,00.

###### b. Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui Tenaga Honor BOSDA

Pemenuhan kebutuhan kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan melalui TKK/Honor BOSDA dengan anggaran sebesar Rp. 33.544.525.600,00 terdiri dari :

- Gaji Honor TTK Pendidik dan Kependidikan SD sebanyak 1.474 orang sebesar Rp. 21.012.795.200,00.
  - Gaji Honor TTK Pendidik dan Kependidikan SMP sebanyak 469 orang sebesar Rp. 7.694.031.200,00.
  - Gaji Honor Guru Tahfidz sebanyak 204 orang sebesar Rp. 4.117.699.200,00.
  - Insentif/Honor PAUD/PKBM sebanyak 300 orang sebesar Rp. 720.000.000,00.
- c. Kartu Jambi Cerdas (KJC)
- Merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan persentase masyarakat tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan pendidikan. Diberikan kepada siswa tidak mampu yang bersekolah di satuan pendidikan swasta/yayasan jenjang SD dan SMP, yaitu :
- Jenjang SD, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.063.200.000,00 dengan sasaran sebanyak 886 siswa tidak mampu.
  - Jenjang SMP, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.371.600.000,00 dengan sasaran sebanyak 762 siswa tidak mampu.

## 2. Program yang bersumber dari Dana APBN

### a. BOP PAUD

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana kepada pemerintahan Kota Jambi tahun 2022 untuk BOP PAUD sebesar 6.537.000.000,00. Anggaran ini digunakan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Jambi

### b. BOP Kesetaraan

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana kepada pemerintahan Kota Jambi tahun 2022 untuk BOP PAUD sebesar 2.672.100.000,00. Anggaran ini digunakan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Jambi.

### c. BOS SD

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana kepada pemerintahan Kota Jambi tahun 2022 untuk BOS SD sebesar 52.135.035.274,00. Anggaran ini digunakan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar yang ada di Kota Jambi.

#### d. BOS SMP

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana kepada pemerintahan Kota Jambi tahun 2022 untuk BOS SD sebesar 31.950.764.726,00. Anggaran ini digunakan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Jambi.

## 4.2 URUSAN KESEHATAN

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

### 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

Indikator dan Nilai SPM

NO	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100		2022	Dinkes Kota Jambi
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100		2022	Dinkes Kota Jambi
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100		2022	Dinkes Kota Jambi
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100		2022	Dinkes Kota Jambi
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100		2022	Dinkes Kota Jambi
6	Pelayan Kesehatan pada Usia Produktif	100		2022	Dinkes Kota Jambi
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100		2022	Dinkes Kota Jambi
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100		2022	Dinkes Kota Jambi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	100		2022	Dinkes Kota Jambi
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100		2022	Dinkes Kota Jambi
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100		2022	Dinkes Kota Jambi
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh	100		2022	Dinkes Kota Jambi

#### 4.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kota Jambi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel  
Realisasi

No	INDIKATOR	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL				
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	11.571	100	11.393	98,46
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				

	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	11.044	100	9.658	87,45
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	11.044	100	10.024	90,76
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				
	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	28.306	100	24.784	88
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR				
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	67.025	100	60.254	90
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF				
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	80.000	100	64.522	81
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT				
	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	42.680	100	40.934	96
8	PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HYPERTENSI				
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	37.000	100	29.745	80
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MILITUS				
	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	17.000	100	12.764	75

10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT				
	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.100	100	1.045	95
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB				
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	9.025	100	6.139	68
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV				
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	16.645	100	8.135	49

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2022 di Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Jambi berjumlah Rp. 201.002.615.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1) APBD Kota Jambi	: Rp. 174.485.455.000,-
2) DAK (DAK FISIK) Bidang Kesehatan	: Rp. 16.511.088.000,-
3) APBD Provinsi Jambi	: -
4) APBN (DAK Non Fisik)	:
BOK	: Rp. 12.412.815.000,-
JAMPERSAL	: Rp. 159.859.000,-
DAK BADAN POM	: Rp. 565.615.000,-

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2022 sebanyak 101 orang dengan perincian pendidikan formal sebagai berikut :

a. PNS / CPNS	= 76 orang
b. PTT Pusat & Provinsi	= -
c. PTT Kabupaten (daerah)	= -
d. Sukwan kategori II	= -

Jumlah PNS/ CPNS sebanyak 76 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :

a) S2	=	17 orang
b) S1	=	42 orang
c) D4	=	orang
d) D3	=	16 orang
e) D2	=	-
f) D1	=	orang
g) SLTA, SMF, SMAK, SPRG, SPK, SPAG	=	26 orang
h) SLTP	=	-
i) SD	=	-

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Jambi dengan target 100% tiap tahunnya, SPM ini ada 12 indikator, dari 12 indikator ini hanya ada 2 indikator yang hampir memenuhi SPM. Dengan persentase capaian 96%. Ini terlihat di tabel realisasi capaian SPM. Untuk 10 indikator yang tidak memenuhi capaian SPM beserta permasalahan dan solusinya adalah sebagai berikut :

##### 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan jika dilihat lebih lanjut, dari 10 standar pelayanan ANC yang harus dilakukan ada beberapa pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan gula darah termasuk dengan integrasi program yaitu pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA), Sipilis, pencegahan malaria dalam kehamilan (PMDK), TB Paru, kecacangan, pencegahan IMS, pencegahan Hepatitis B yang tidak dilakukan pada sebagian ibu hamil oleh petugas kesehatan sehingga kualitas dari pelayanan ANC pada ibu hamil tidak optimal.

Solusi :

Upaya tindak lanjut untuk mencapai target yang akan datang adalah :

- Melaksanakan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di setiap kelurahan.
- Melaksanakan kelas ibu hamil di setiap kelurahan dan puskesmas.
- Supervisi fasilitatif pelayanan kesehatan ibu terintegrasi dengan program lain.
- Pemenuhan buku KIA bagi setiap ibu hamil.

- Pemenuhan Alat Deteksi Risiko Kehamilan (ADRK).
- Pemenuhan pencatatan dan pelaporan (kohort) di puskesmas dan jejaringnya.
- Pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi bagi semua calon pengantin.
- Peningkatan kompetensi petugas melalui orientasi ANC terpadu dan terstandar.
- Penguatan pelaksanaan Pencegahan Penularan dari ibu ke Anak/Bayi (PPIA).
- Pertemuan dan penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP) surveilans dan respon.
- Pelaksanaan Maternal Death Notification (MDN) dalam Surveilans kematian ibu.

## 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM ini mungkin disebabkan kurangnya koordinasi antara puskesmas dengan bidan praktek swasta, dokter praktek swasta klinik dan rumah sakit pemerintah maupun swasta terkait laporan

Solusi :

Upaya tidak lanjut yang akan dilakukan adalah :

- Pemenuhan sarana prasarana di puskesmas dan jejaringnya sesuai standar untuk meningkatkan cakupan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Peningkatan kompetensi petugas dalam pelayanan Post Natal Care (PNC).
- Orientasi dan magang bagi Tim Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar (PONED) di Puskesmas PONED (rawat inap).
- Optimalisasi pemanfaatan dana Jampersal bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
- Orientasi penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal bagi petugas puskesmas.
- Pertemuan dan penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP) surveilans dan respon.
- Pelaksanaan Maternal Death Notification (MDN) dalam Surveilans Kematian.

## 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM ini disebabkan beberapa hal yaitu masih terdapat persalinan yang pelayanan bayi baru lahirnya tidak sesuai standar (minimal 3 kali) sampai usia 28 hari, dan meningkatnya jumlah kematian neonatus dibandingkan tahun sebelumnya.

Solusi :

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang akan datang adalah :

- Penguatan Pelayanan Bayi Baru Lahir (BBL), termasuk Skrining HipotiroidKogenital (SHK).
- Orientasi pelayanan kesehatan neonatal essensial.

- Pemenuhan obat, bahan habis pakai dan alat-alat kesehatan di puskesmas dan jejaringnya.
  - Optimalisasi pelaksanaan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).
  - Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan manajemen asfiksia bayi baru lahir dan BBLR.
  - Pelaksanaan orientasi kegawatdaruratan maternal neonatal.
  - Orientasi kader posyandu sebagai motivator ASI.
4. Pelayanan kesehatan balita

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM ini mungkin disebabkan kurangnya frekuensi penimbangan pada anak balita usia 12-59 bulan dan pelaksanaan SDIDTK, selain itu telah selesai imunisasi dasar lengkap anak balita sudah mulai jarang dibawa ke Posyandu. Pada tahun 2020 juga terjadi pandemic Covid-19 anak-anak diharapkan tidak keluar rumah sementara waktu sehingga menyebabkan menurunnya kehadiran balita ke Posyandu. Namun upaya tetap dilakukan baik oleh petugas kesehatan maupun kader posyandu untuk melakukan kunjungan rumah agar pertumbuhan balita tetap terpantau.

Solusi :

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang akan datang adalah :

- Orientasi SDIDTK dan sosialisasi kelas ibu balita bagi kader kesehatan, guru PAUD/TK/RA.
- Orientasi dan pendampingan kalakarya Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).
- Koordinasi penguatan penggunaan buku KIA.
- Pemantaupemanfaatan Kohor Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah.
- Updating pelayanan kesehatan balita bagi bidan/nakes di desa.
- Pemenuhan vitamin A, suplemen gizi balita, dan makanan tambahan bagi balita baik untuk penyuluhan maupun pemulihan.
- Pemenuhan sarana prasarana pemantauan pertumbuhan di posyandu melalui partisipasi dana desa.
- Peningkatan kompetensi kader posyandu dalam membantu pemantauan pertumbuhan balita di posyandu.
- Peningkatan pengetahuan dan kompetensi kader melalui orientasi Pemberian Makan bagi Bayi dan Anak (PMBA).
- Peningkatan pengetahuan dan kompetensi kader posyandu dalam penyusunan menu makanan tambahan melalui orientasi penyusunan menu makanan tambahan balita berbahan dasar pangan lokal.

5. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan :

- Belum memasyarakatnya program “CERDIK”
- Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang penyakit tidak menular
- Tidak adanya dukungan lintas sektor tentang pelaksanaan skrining faktor resiko penyakit tidak menular
- Masyarakat beranggapan kalau pemeriksaan itu hanya untuk orang yang sakit bukan untuk orang yang sehat
- Pelaksanaan skrining FR PTM bertepatan dengan aktifitas masyarakat
- Angka estimasi terlalu tinggi
- Kurangnya kapasitas petugas
- Kurangnya minat masyarakat tentang program pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Kurangnya pembiayaan untuk kegiatan pelayanan kesehatan pada usia produktif

Solusi :

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang akan datang adalah :

- Penambahan kapasitas petugas kabupaten dan Puskesmas
- Penambahan biaya untuk transportasi petugas kab. Monitoring kegiatan
- Penambahan biaya untuk sosialisasi dan transportasi
- Penambahan biaya pengadaan bahan habis pakai
- Penambahan biaya sosialisasi program CERDIK

6. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM antara lain disebabkan belum semua kelurahan mempunyai Posyandu para lansia tidak semua mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Selain itu masih banyak lansia yang dalam kegiatan sehari-harinya harus ditolong sepenuhnya (tingkat kemandirian A) sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan posyandu lansia. Dari semua puskesmas baru 5 (lima) puskesmas yang dapat melaksanakan home care sehingga tidak semua lansia yang tidak hadir di posyandu lansia tidak dilakukan kunjungan rumah untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Solusi :

Upaya untuk mencapai target yang akan datang, dilakukan beberapa kegiatan :

- Pembentukan posyandu lansia di semua kelurahan.
- Peningkatan kemampuan puskesmas untuk dapat melaksanakan pelayanan

kesehatan santun lansia.

- Peningkatan kapasitas petugas puskesmas untuk dapat melakukan home care melalui pelatihan/orientasi caregiver bagi lanjut usia.
- Advokasi ke pemerintahan desa untuk membentuk dan melatih kader posyandu lansia serta pemberian insentifnya dengan menggunakan dana desa.

7. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan :

- Tingkat pengetahuan, gaya hidup, pola makan dan budaya di tengah masyarakat tidak bisa diubah
- Angka estimasi terlalu tinggi
- Kurangnya kapasitas petugas
- Kurangnya minat masyarakat tentang program pelayanan penderita hipertensi
- Kurangnya pembiayaan untuk kegiatan pelayanan penderita hipertensi

Solusi :

Upaya untuk mencapai target yang akan datang :

- Penambahan kapasitas petugas kabupaten dan puskesmas
- Penambahan biaya untuk transportasi petugas kab. Monitoring kegiatan
- Penambahan biaya untuk sosialisasi dan transportasi
- Penambahan biaya pengadaan bahan habis pakai
- Penambahan biaya sosialisasi program CERDIK

8. Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan :

- Masyarakat kalau tidak diperiksa GDS dan diberi obat mereka tidak mau diskriming FR PTM
- Terbatasnya posbindu kit untuk pemeriksaan FR PTM

Solusi :

Upaya untuk mencapai target yang akan datang adalah :

- Penambahan kapasitas petugas kabupaten dan puskesmas
- Penambahan biaya untuk transportasi petugas kab. Monitoring kegiatan
- Penambahan biaya pengadaan bahan habis pakai
- Penambahan biaya sosialisasi program CERDIK

9. Pelayanan kesehatan orang dengan TB

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan :

- Belum optimalnya kegiatan kontak tracing terhadap pasien positif TBC.
- Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan khususnya di TB 06.

Solusi :

Upaya untuk mencapai target yang akan datang yaitu :

- Mengoptimalkan kegiatan kontak tracing terhadap keluarga pasien dan tetangga disekitar pasien.
- Melakukan sosialisasi dan bintek kepada petugas laboratorium puskesmas dan rumah sakit tentang pencatatan dan pelaporan TB 06.

10. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Masalah :

Tidak tercapainya target SPM dikarenakan :

- Belum optimalnya kegiatan kontak tracing terhadap pasien positif HIV.
- Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan khususnya di TB 06.

Solusi :

Upaya untuk mencapai target yang akan datang yaitu :

- Mengoptimalkan kegiatan kontak tracing terhadap keluarga pasien dan tetangga disekitar pasien.
- Melakukan sosialisasi dan bintek kepada petugas laboratorium puskesmas dan rumah sakit tentang pencatatan dan pelaporan TB 06.

#### 4.2.7 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, program dan kegiatan yang tercakup adalah sebagai berikut :

**A. Program peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan,** dengan kegiatan :

- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar
- Kemitraan asuransi kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat
- Penyuluhan dan pengembangan media promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
- Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, anak, remaja, lansia dan keluarga berencana

- Peningkatan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga
- Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- Pengendalian penyakit tidak menular dan pelayanan kesehatan jiwa
- Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) serta Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
- Pengadaan sarana prasarana puskesmas / puskesmas pembantu
- Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)
- Dukungan pelayanan BLUD

### 4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi adalah sebagai berikut:

#### Jenis Pelayanan Dasar Dinas PUPR Kota Jambi Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar Kabupaten/Kota	Penerima Pelayanan Dasar
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	setiap Warga Negara
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	setiap Warga Negara

#### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi dalam mencapai selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi pada tahun 2022.

#### Target Pencapaian SPM Dinas PUPR Kota Jambi Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok	Jumlah Warga Negara Yang	100 %	2022

2	air minum sehari-hari	Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari			
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100 %	2022	

#### 4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi selama 1 Tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi, yang bersangkutan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

#### Realisasi Pencapaian SPM Dinas PUPR Kota Jambi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)			(4)
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>	<b>BELUM TUNTAS</b>			<b>64,55%</b>
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				91,35%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	76,14%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	123.911	117.930	5.981	95,17%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				15,21%
		<b>Jumlah yang harus dilayani (1)</b>	<b>Jumlah yang terlayani (2)</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani (3)</b>	76,05%
	1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	150	110	40	73,33%
	2. Kualitas air (keruh, berwarna, berbau, berbusa, berbau)	100	75	25	75,00%
	3. Jaringan perpipaan	123.911	94.006	29.905	75,87%
	4. Jaringan bukan perpipaan	29.905	23.924	5.981	80,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>154.065</b>	<b>118.115</b>	<b>35.951</b>	<b>304,20%</b>
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				37,75%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah yang harus</b>	<b>Jumlah yang terlayani (2)</b>	<b>Jumlah yang belum</b>	21,84%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)			(4)
		dilayani (1)		terlayani (3)	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	123.911	33.835	90.076	27,31%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>15,91%</b>
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	79,55%
	1. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	123.911	33.835	90.076	27,31%
	2. Kualitas pelayanan air limbah domestik	100	100	-	100%
	3. Sub-Sistem pengolahan setempat	800	800	-	100%
	4. Sub-sistem pengangkutan	12	6	6	50%
	5. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1	1	-	100%
	6. Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	1	1	-	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>124.825</b>	<b>34.743</b>	<b>90.082</b>	<b>477,31%</b>

Sumber Data : Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi, Desember 2022

#### Jumlah Penduduk di Kota Jambi tahun 2022

No	Tahun	Penduduk (Population)	
		Jumlah Penduduk	Rumah Tangga
1	2020	606.200	121.240
2	2021	612.162	122.432
3	2022	619.553	123.911

Sumber: BPS Kota Jambi 2022

### Jumlah pelanggan per-bulan per-kecamatan di Kota Jambi tahun 2022

NO	Bulan	Telanaipura	Kota Baru	Jelutung	Pasar	Jambi Timur	Selatan Jambi	Danau Teluk	Pelayangan	Danau Sipin	Alam Barajo	Pall Merah	Total
1	Januari	9230	15440	11891	3532	10505	7236	1995	2084	8032	14328	5379	89.652
2	Februari	9249	15716	11894	3528	10521	7258	2005	2088	8054	14381	5414	90.108
3	Maret	9263	15821	11897	3527	10522	7261	2005	2091	8058	14467	5461	90.373
4	April	9285	15912	11894	3529	10530	7273	2005	2096	8063	14541	5497	90.625
5	Mei	9281	16022	11913	3531	10534	7284	2005	2097	8057	14577	5517	90.818
6	Juni	9309	16187	11931	3537	10544	7318	2013	2097	8071	14671	5571	91.249
7	Juli	9325	16324	11956	3535	10539	7337	2016	2098	8076	14780	5628	91.614
8	Agustus	9351	16501	11973	3529	10550	7351	2014	2096	8071	14877	5700	92.013
9	September	9393	16623	11974	3534	10550	7373	2018	2102	8077	15118	5783	92.545
10	Oktober	9418	16720	11977	3530	10549	7418	2021	2114	8082	15393	5845	93.067
11	November	9465	16919	11994	3531	10563	7433	2015	2117	8079	15603	5988	93.707
12	Desember	9483	17043	11995	3529	10569	7431	2021	2121	8089	15720	6005	<b>94.006</b>

Sumber: PERUMDA Tirta Mayang Kota Jambi 2022

- Jumlah warga negara yang terlayani Jaringan Perpipaan = Jumlah SR Air Minum x Jumlah KK = 94.006 x 5 = 470.030 Warga

**Penjelasan;**

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

**Perhitungan ;**

Mengukur persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari

**Rumah Tangga Terlayani Air Minum**

No	Terlayani JP	Terlayani BJP	Terlayani (JP+BJP)	Rumah Tangga di Kab-Kota	Persentase	Keterangan
1	90.373	26.830	117.203	123.911	94,59%	Triwulan I
2	91.249	23.993	115.242	123.911	93,00%	Triwulan II
3	92.545	25.092	117.637	123.911	94,94%	Triwulan III
4	94.006	23.924	117.930	123.911	95,17%	Triwulan IV

*Sumber: Data Terlayani, Des 2022 PERUMDA Tirta Mayang Kota Jambi*

**Keterangan;**

- \*\* Data Terlayani JP, Des 2022 Perumda Tirta Mayang Kota Jambi
- \*\* Data Belum Terlayani BJP, Asumsi Target Th. 2022 - Terlayani JP x 80% dari JP (Dikarenakan Data Belum Tersedia)
- \*\* Data Belum Terlayani, Asumsi Target Th. 2022 - Terlayani JP x 20% dari JP (Dikarenakan Data Belum Tersedia)
- \*\* Data Penduduk Masih Memakai Data BPS Th. 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di Kab-Kota}} \times 100\%$$

**Keterangan ;**

Target pelayanan air bersih belum bisa mencapai target 100% dikarenakan jumlah penduduk yang selalu bertambah. Selain itu, terdapat beberapa kendala di lapangan berupa terganggunya lalu lintas masyarakat, akibat tanah bekas galian tanah, umur pipa pada Jaringan Distribusi Utama yang relatif berumur tua, kemudian tingkat kehilangan air yang tergolong tinggi, keterbatasan pemasangan jaringan perpipaan distribusi ke pelanggan, serta adanya keterbatasan lahan baru untuk pembangunan *Booster Pump* yang bertujuan untuk menambah tekanan jaringan. Kendala-kendala tersebut menyebabkan hingga saat ini pelayanan air bersih di Kota Jambi belum optimal.

### Tindak Lanjut Air Bersih:

- Pengaturan lalu lintas, pemasangan rambu pengaman
- Perluasan jaringan perpipaan
- Pergantian jaringan perpipaan yang berumur tua untuk menekan angka kehilangan air
- Penambahan pembangunan *Booster Pump* untuk wilayah sulit air/wilayah yang belum di layani

### Penjelasan;

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

### Perhitungan

Mengukur persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

#### Rumah Tangga Terlayani Air Limbah domestik

No	Rumah Tangga Terlayani	Rumah Tangga di Kab-Kota	Persentase	Keterangan
1	29.835	123.911	24,08%	Triwulan I
2	29.835	123.911	24,08%	Triwulan II
3	30.645	123.911	24,73%	Triwulan III
4	33.835	123.911	27,31%	Triwulan IV

Sumber: Data Terlayani, Des 2022 Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018.

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di Kab-Kota}} \times 100\%$$

- Jumlah warga negara yang terlayani di wilayah pengembangan SPALD-T= Jumlah SR Air Limbah x Jumlah KK = 2874 x 5 = 14.370 Warga
- Jumlah warga negara yang terlayani di wilayah pengembangan SPALD-S = Jumlah SR Air Limbah x Jumlah KK = 3893 x 5 = 19.465 Warga
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestic = **3.28%**

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi tahun 2022 terdapat didalam Program sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

No	Uraian	Alokasi Anggaran	Sumber Dana
	<b>PUPR KOTA JAMBI</b>	<b>15.592.340.000</b>	<b>APBD dan DAK</b>
		7.223.840.000	APBD
		8.368.500.000	DAK
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.542.340.000	APBD dan DAK
1.1	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	9.542.340.000	APBD dan DAK
1.1.1	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	9.542.340.000	APBD dan DAK
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.050.000.000	APBD dan DAK
2.1	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	6.050.000.000	APBD dan DAK
2.1.1	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.650.000.000	APBD dan DAK
2.1.2	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	400.000.000	DAK

**Sumber Data : Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR Kota Jambi, Desember 2022**

Alokasi anggaran untuk pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 bersumber dari APBD Kota Jambi yang terdiri sumber DAK sebesar Rp.8.368.500.000,- dan Non DAK sebesar Rp.7.223.840.000,- dengan total Anggaran Rp.15.592.340.000,-.

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Kondisi sumber daya manusia yang menangani urusan air minum dan air limbah di bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi untuk mendorong pencapaian standar pelayanan minimal tahun 2022 sebagai berikut :

##### Jumlah Personil keseluruhan

No	Bidang Cipta Karya	Golongan			Staf	Jumlah
		II	III	IV		
1	Kepala Bidang Cipta Karya			1		1
2	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Air Minum)		1			1
3	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (PLP/P)		1			1
4	Pelaksana Seksi Air Minum	1	1		5	7
5	Pelaksana Seksi PLP/P	3	5		8	16
<b>J u m l a h</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>26</b>

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi 2022

##### Jumlah Personil berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1	Kepala Bidang Cipta Karya	IV/a	1
2	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Air Minum)	III/d	1
3	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (PLP/P)	III/c	1
4	Pelaksana Seksi Air Minum	III/b	1
		II/c	1
	Pelaksana Seksi Air Minum (staf PTT)	-	5
5	Pelaksana Seksi PLP/P	III/c	1
		III/a	4
		II/c	3
	Pelaksana Seksi PLP/P (Staf PTT)	-	8
<b>J u m l a h</b>			<b>26</b>

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi 2022

##### Jumlah Personil berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1	Kepala Bidang Cipta Karya	IV/a	1
2	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Air Minum)	III/d	1
3	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (PLP/P)	III/c	1
4	Pelaksana Seksi Air Minum	III/b	1

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
5		II/c	1
	Pelaksana Seksi Air Minum (staf PTT)	-	5
	Pelaksana Seksi PLP/P	III/c	1
		III/a	4
		II/c	3
	Pelaksana Seksi PLP/P (Staf PTT)	-	8
<b>J u m l a h</b>			<b>26</b>

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi 2022

#### Jumlah Personil berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Teknik	Non Teknik	Jumlah
1	S2		2	2
2	S1	7	8	15
3	D3	5	1	6
4	SMK	1		1
5	STM	1		1
6	SMA		1	1
<b>J u m l a h</b>		<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi 2022

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi selaku Dinas Teknis untuk membantu Walikota, didalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan telah mempunyai personil yang secara kuantitas telah mencukupi, namun secara kualitas masih belum memadai. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga teknis sebanyak 45% dan tenaga non teknis sebanyak 55%, perbandingan jumlah tenaga teknis dan non teknis ini terbalik dengan kebutuhan yang ideal.

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi beserta solusi terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

##### Permasalahan :

- Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan
- karena terbatas anggaran / APBD;
- Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan keg
- iatan;
- Belum sinerginya upaya implementasi SPM

##### Solusi

- a) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan aplikasi realisasi pelaksanaan di sektor SPM
- b) Akan lebih diupayakan koordinasi dan sinkronisasi dalam mencari sumber-sumber dana yang lainnya terutama dana tugas perbantuan
- c) Meningkatkan kompetensi SDM yang sudah ada agar meningkat keterampilan teknis yang mumpuni
- d) Koordinasi dan Sinkronisasi validasi pendataan di sektor SPM dengan OPD terkait

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada OPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

#### **4.3.7 Program dan Kegiatan**

Program kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Target		Realisasi		Sisa Pagu	Sumber Dana
		Rp.	K	Rp.	%		
	<b>PUPR KOTA JAMBI</b>	<b>15.592.340.000</b>		<b>15.445.542.000</b>	<b>99,06%</b>	<b>146.798.000</b>	<b>APBD dan DAK</b>
		7.223.840.000		7.183.067.000	99,44%	40.773.000	APBD
		8.368.500.000		8.262.475.000	98,73%	106.025.000	DAK
<b>I</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	<b>9.542.340.000</b>		<b>9.409.258.000</b>	<b>98,61%</b>	<b>133.082.000</b>	<b>APBD dan DAK</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.542.340.000</b>		<b>9.409.258.000</b>	<b>98,61%</b>	<b>133.082.000</b>	<b>APBD dan DAK</b>
	<b>Sub Kegiatan Perluasan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan</b>	<b>9.542.340.000</b>	<b>300 SR</b>	<b>9.409.258.000</b>	<b>98,61%</b>	<b>133.082.000</b>	<b>APBD dan DAK</b>
1	Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Distribusi HDPE Jl. Kolonel Abunjani - Mayang	3.866.500.000		3.844.783.000	99,44%	21.717.000	APBD
2	Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Distribusi HDPE Kec. Paal Merah	857.340.000		852.000.000	99,38%	5.340.000	APBD
3	Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah Kecamatan Alam Barajo, Desa Bagan Pete (DAK)	4.818.500.000		4.712.475.000	97,80%	106.025.000	DAK
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>6.050.000.000</b>		<b>6.036.284.000</b>	<b>99,77%</b>	<b>13.716.000</b>	<b>APBD dan DAK</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>6.050.000.000</b>		<b>6.036.284.000</b>	<b>99,77%</b>	<b>13.716.000</b>	<b>APBD dan DAK</b>

No	Uraian	Target		Realisasi		Sisa Pagu	Sumber Dana	
		Rp.	K	Rp.	%			
	<b>Sub Kegiatan Sub Sistem Pengolahan Setempat</b>	<b>5.650.000.000</b>	<b>330 Rumah Tangga</b>	<b>750 Rumah Tangga</b>	<b>5.636.284.000</b>	<b>99,76%</b>	<b>13.716.000</b>	<b>APBD dan DAK</b>
1	Pembangunan Tangki Septik Hibah Air Limbah Setempat	2.500.000.000		300 Rumah Tangga	2.486.284.000	99,45%	13.716.000	APBD
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Bagan Pete (DAK) (Swakelola)	350.000.000		50 Rumah Tangga	350.000.000	100%	-	DAK
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Lebak Bandung (DAK) (Swakelola)	700.000.000		100 Rumah Tangga	700.000.000	100%	-	DAK
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Olak Kemang (DAK) (Swakelola)	350.000.000		50 Rumah Tangga	350.000.000	100%	-	DAK
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Pasir Panjang (DAK) (Swakelola)	350.000.000		50 Rumah Tangga	350.000.000	100%	-	DAK
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Pasir Putih (DAK) (Swakelola)	350.000.000		50 Rumah Tangga	350.000.000	100%	-	DAK
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Tahtul Yaman (DAK) (Swakelola)	350.000.000		50 Rumah Tangga	350.000.000	100%	-	DAK
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kel. Tambak Sari (DAK) (Swakelola)	700.000.000		100 Rumah Tangga	700.000.000	100%	-	DAK

No	Uraian	Target		Realisasi		Sisa Pagu	Sumber Dana	
		Rp.	K	Rp.	%			
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	400.000.000	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	400.000.000	100%	-	DAK
9	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kel. Jelutung (DAK) (Swakelola)	400.000.000		50 Rumah Tangga	400.000.000	100%	-	DAK

## 4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sesuai Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM DPRKP 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Penerima Pelayanan Dasar
1	<p>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Koban Bencana atau Relokasi Pogran Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.</li> <li>• Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Perumahan.</li> </ul>	<p>Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Lokasi Rawan Bencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Bencana dan Lokasi yang Berpotensi terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.</li> </ol>	

Sumber: Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

### 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dalam mencapai selama kurun waktu tertentu. Berikut adalah tabel target pencapaian standar pelayanan minimal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Capaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Perumahan.</li> </ul>				

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun 2022 menganggarkan untuk kegiatan SPM Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Koban Bencana atau Relokasi Pogram Kabupaten/Kota sebesar Rp.533.521.254,- untuk 2 Dokumen terdiri dari Dokumen Data Rumah di Lokasi Bencana dan Lokasi yang Berpotensi terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp. 255.908.002 dan Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Rp. 277.613.252 .

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi sebagai berikut : Yang terdiri dari :

NO	STATUS	PRIA	WANITA	JUMLAH
	KEPEGAWAIAN			
1	2	3	4	5
1	Pegawai Negeri Sipil	25	14	39
2	Calon pegawai Negeri Sipil	-	-	-
3	Honor Daerah	1	-	1
4	Pegawai Kontrak (TKK,PTT)	21	20	41
5	Pekerja Harian Lepas	38	2	40
	Jumlah	85	36	121

PNS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menurut Jenis  
Kelamin dan Golongan Ruang

NO	GOLONGAN RUANG	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>25</b>	<b>14</b>	<b>39</b>
2	I/a	-	-	-
3	I/b	-	-	-
4	I/c	-	-	-
5	I/d	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6	II/a	1	-	1
7	II/b	1	-	1
8	II/c	1	-	-
9	II/d	4	1	5
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
10	III/a	-	1	1
11	III/b	2	1	3
12	III/c	2	2	4
13	III/d	10	6	16
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
14	IV/a	3	2	5
15	IV/b	1	1	2
16	IV/c	-	-	-
17	IV/d	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi beserta solusi terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

Permasalahan :

Terbatasnya anggaran/APBD

Terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan SPM

Solusi :

Mengupayakan koordinasi dan sinkronisasi dalam mencari sumber dana agar pelaksanaan SPM dapat terwujud

Membentuk dan meningkatkan kompetensi SDM yang mumpuni

Koordinasi dan Sinkronisasi validasi pendataan di sektor SPM dengan OPD terkait

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada OPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

#### **4.4.7 Program dan Kegiatan**

### **4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **A. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

##### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis layanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Untuk melaksanakan jenis layanan dasar pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi maka diperlukan dasar hukum.

Adapun dasar hukum penetapan jenis layanan dasar mengacu pada

1. Perda nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Perwal nomor 63 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi;
3. RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi tahun 2018 s/d 2023;

4. RENJA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi tahun 2022;

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi 2018-2023 ditetapkan suatu kebijaksanaan yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan Arah Kebijakan adalah *Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran*, Oleh karna itu dalam pelaksanaan Standar Pelayanan minimum yang mengacu pada permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota.

Maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi melaksanakan 5 jenis layanan Dasar yaitu :

1. Layanan respon cepat (response time) penanggulangan kejadian kebakaran;
2. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
3. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
4. Layanan dan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
5. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran;

Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan dengan segera, untuk menanggulangi kejadian kebakaran, saat menerima laporan dari warga sesuai dengan tingkat waktu tanggap pada saat kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran.

Layanan Pelaksanaan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat kejadian kebakaran baik skala kecil maupun skala besar yang meliputi kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran, sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman dan pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas

masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat non kebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*), dan lain-lain.

Layanan Dan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah penyelenggaraan urusan kebakaran. Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis, kepadatan pemukiman, keterbatasan akses jalan, serta masih banyaknya bangunan semi permanen dalam wilayah Kota Jambi. Sebagai salah satu upaya mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran telah melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di 4 Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Arab Melayu;
2. Kelurahan Tanjung Pasir;
3. Kelurahan Olak Kemang; dan
4. Kelurahan Beringin;

Serta telah dibentuk Relawan Rebakaran di 3 kelurahan dalam Kota Jambi, yaitu :

1. Kelurahan Paal 5;
2. Kelurahan Paal Merah;
3. Kelurahan Ekajaya;

Dimana seluruh relawan yang dibentuk didaftarkan dan diregistrasi oleh Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, dengan dibekali pelatihan dan pemberian tanda pengenalan Relawan Kebakaran.

Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran merupakan tugas yang dilakukan oleh tim khusus dari Dinas Pemadam

Kebakaran Dan Penyelamatan setelah kebakaran berhasil dipadamkan oleh anggota pemadam kebakaran maupun relawan, untuk melakukan pendataan jumlah korban yang terdampak kebakaran dan non kebakaran yang menghasilkan data korban dan kerugian harta benda, serta melakukan inspeksi dan investigasi untuk memperoleh data awal penyebab kebakaran.

#### **4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Target capaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah 100% hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga Negara. Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya. Perangkat daerah yang belum mencapai target 100% wajib untuk terus meningkatkan upaya pencapaian dengan pemenuhan langkah-langkah kegiatan dan upaya-upaya sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri ini. Daerah yang telah mencapai target 100% wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun ke tahun.

##### **a. Langkah Kegiatan**

#### **1. Layanan respon cepat (Respon Time) penanggulangan kejadian kebakaran**

Kegiatan Layanan respon cepat (response time) penanggulangan kejadian kebakaran terdiri dari :

- Pengadaan Alat Komunikasi

#### **2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran**

Kegiatan Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran terdiri dari :

- a. Penyediaan mobil damkar/kapal damkar/ unit operasional damkar lainnya;
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran;
- c. Penyediaan tandon air/ air/ foam untuk pemadaman;
- d. Kesiapan petugas pemadam kebakaran;

#### **3. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi**

Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi mencakup kegiatan :

- a. Penyediaan Mobil Penyelamatan (Rescue);
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan;
- c. Kesiapan petugas penyelamatan (Rescue)

#### 4. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran

Kegiatan layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran terdiri dari:

- a. Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran
- b. Pelatihan/ simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran
- c. Pembentukan system ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL)

#### 5. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran

Kegiatan layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran terdiri dari :

- a. Pendataan
- b. Inspeksi
- c. Investigasi pasca kebakaran

### 4.5.3 Realisasi

Teknis penghitungan capaian SPM sub urusan kebakaran dilihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan SPM dan indikator penunjang layanan capaian SPM. Secara kuantitatif teknis perhitungan dituliskan:

- **Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

No.	Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi	30	16	Mobil	53.33
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	16	16	SOP	100
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	194	55	Jenis	28.35
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/ sumber daya manusia	540	204	Orang	37.78

• **Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran**

- a) Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun 2022 dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

X 100%

Jumlah kejadian kebakaran di Kota Jambi pada Tahun 2022

- b) Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

Rumus

Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun 2022 dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

x 100 %

Jumlah kejadian kebakaran di kota Jambi pada Tahun 2022

- c) Capaian SPM adalah (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan). Ditambah (Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan/atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah).

1) Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM

- a) Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

Rumus

Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota Jambi dalam tahun X.

• **Perhitungan**

Selama Tahun 2022, pada Kota Jambi terjadi 66 (enam puluh enam) kali kebakaran pemukiman/ perumahan dan lahan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi memberikan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam rentang waktu tanggap (*response time*) sebagai berikut :

1.	2 Menit	4 Kali Kejadian
2.	3 Menit	8 Kali Kejadian
3.	4 Menit	3 Kali Kejadian
4.	5 Menit	23 Kali Kejadian
5.	6 Menit	7 Kali Kejadian
6.	7 Menit	3 Kali Kejadian
7.	8 Menit	9 Kali Kejadian
8.	9 Menit	1 Kali Kejadian
9.	10 Menit	5 Kali Kejadian
10.	17 Menit	1 Kali Kejadian
11.	20 Menit	1 Kali Kejadian

Berdasarkan analisa dari kejadian kebakaran (*assessment*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, diperoleh data taksiran kerugian harta benda akibat kebakaran adalah Rp. 2.864.000.000,- (Dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).

Selain kejadian kebakaran, selama Tahun 2022, Operasin Darurat Non Kebakaran Sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) kali, terdiri dari penanganan bencana banjir 3 (tiga) kali, penanganan rumah roboh 0 (nol) kali, angin puting beliung 2 (dua) kali, evakuasi korban meninggal tenggelam 7 (tujuh) kali, evakuasi korban meninggal kebakaran 1 (satu) kali, evakuasi dari binatang berbahaya 243 (dua ratus empat puluh tiga) kali, penyelamatan warga dari pohon tumbang 1 (satu) kali dan Penyelamatan Orang lainnya 61 (enam puluh satu) kali.

Cara menghitung capaian SPM Sub Urusan Kebakaran di Kota Jambi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Jumlah kejadian kebakaran di Kota Jambi = 66 (enam puluh enam) kejadian.

- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dalam waktu tanggap = 66 (enam puluh enam) kejadian.
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemda dalam waktu tanggap = 0 (Nol) Kejadian.
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani diluar waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan/atau relawan kebakaran = 0 (nol) kejadian.
- Jumlah kejadian yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 318 (tiga ratus delapan belas) kali, terdiri dari penanganan bencana banjir 3 (tiga) kali, penanganan rumah roboh 0 (nol) kali, angin puting beliung 2 (dua) kali, evakuasi korban meninggal tenggelam 7 (tujuh) kali, evakuasi korban meninggal kebakaran 1 (satu) kali, evakuasi dari binatang berbahaya 243 (dua ratus empat puluh tiga) kali, penyelamatan warga dari pohon tumbang 1 (satu) kali dan Penyelamatan Orang lainnya 61 (enam puluh satu) kali.

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Rencana dan Program merupakan salah satu langka implementasi tugas pelayanan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada tahun 2022 dengan merencanakan 3 (tiga) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan beserta pendanaan indikatif dari masing-masing program dan kegiatan dan telah di input pada Aplikasi E-Planing Bappeda Kota Jambi. Adapun program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi tersebut adalah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Program Penanggulangan Bencana
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Adapun program yang tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan yang merupakan rencana kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada tahun 2022, adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- h. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- i. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Adapun Kegiatan yang tersebut diatas diuraikan dalam bentuk subkegiatan yang merupakan rencana kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
3. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian Verifikasi Keunagan Skpd
4. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd
5. Pengadaan Pakaian Dinas Atribut Kelengkapannya
6. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor
8. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga
10. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
11. Fasilitas Kunjungan Tamu
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
16. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
17. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
18. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota
19. Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota

20. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
21. Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota
22. Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten /Kota
23. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri
24. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
25. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi

**Anggaran Program dan Kegiatan  
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota  
Tahun 2022**

PROGRAM//KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>13.214.512.522</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>7.931.015.360</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.525.410</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.525.410
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.434.023.145</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.288.357.691
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	259.814.108
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.499.828
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>357.122.700</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	343.282.500
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	13.840.200
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>543.102.936</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	19.999.265

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.211.080
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	14.994.100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.991
Fasilitas Kunjungan Tamu	14.998.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.900.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>244.600.000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	251.440.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>219.440.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.624.453
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.730.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.798.180
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>696.420.693</b>
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>644.458.783</b>
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	127.300.421
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	517.158.362
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>51.961.910</b>
Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	51.961.910
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>4.587.076.469</b>
<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.448.662.699</b>
Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	57.990.304
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	3.859.325.077

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	531.347.318
<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>30.761.970</b>
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	30.761.970
<b>Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</b>	<b>107.651.800</b>
Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	107.651.800

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Jumlah personil di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi sebanyak 203 orang yang terdiri 64 orang PNS dan 139 orang tenaga kerja kontrak. Dari jumlah personil sebanyak 203 orang tersebut, 13 orang adalah pejabat struktural, 14 Orang Jabatan Fungsional yang meliputi Kategori Analis kebakaran 3 Orang, Kategori Keterampilan terdiri dari 1 orang Mahir, dan 7 orang Kategori Keahlian, kategori Keahlian terdiri dari 2 orang Pertama, Serta 1 orang Arsiparis 24 orang pelaksana administrasi dan 13 orang anggota pemadam kebakaran. Selain pegawai juga terdapat Tenaga Kerja Kontrak (TKK) satuan tugas penanggulangan bencana yang berjumlah 139 orang.

#### Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

No	PEGAWAI	JUMLAH ( ORANG)	%
1.	PNS	66	32 %
2.	Tenaga Kerja Kontrak	139	68 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>205</b>	<b>100 %</b>

Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi merupakan salah satu organisasi publik yang melayani masyarakat selama 1x24 jam sama halnya seperti TNI-POLRI dan Pelayanan Rumah Sakit. Bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi tidak mengenal hari libur, baik hari minggu, libur nasional , ataupun hari besar keagamaan, seperti hari raya idul

fitri, idul adha, dan hari natal. Guna untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas maka diwajibkan kepada seluruh anggota pemadam kebakaran di Indonesia termasuk di Kota Jambi (Petugas Teknis Lapangan khususnya Bidang Operasional Pemadaman Kebakaran) agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab. Jam kerja 1 x 24 jam ini merupakan sebuah konsekuensi logis apabila seseorang memutuskan untuk menjadi seorang Ksatria Biru atau pasukan Yudha Brama Jaya atau yang lebih populer dengan anggota pemadam kebakaran.

Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi jam kerja dibagi menjadi 3 regu yaitu regu 1, regu 2 dan regu 3 dengan sitim piket. Masing-masing regu jam kerjanya 24 jam, dimulai dari jam 07.15 wib s.d. 07.15 wib, kemudian dilanjutkan dengan regu yang berikutnya.

#### **Pembagian Jam Kerja Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi**

No.	Uraian	Jam Kerja
1	2	3
1	Regu 1	24 Jam (07.15 Wib – 07.15 Wib)
2	Regu 2	24 Jam (07.15 Wib – 07.15 Wib)
3	Regu 3	24 Jam (07.15 Wib – 07.15 Wib)

Selama 30 Hari atau setiap bulannya dilakukan pergantian piket setiap 1 hari kerja yaitu 1 x 24 jam. Pergantian piket ini dilakukan secara otomatis setiap 1 x 24 jam hari kerja dalam setiap bulannya.

#### a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang

a) Berikut ini Kantor dan Pos Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi serta ketersediaan aparatur selama 24 (dua puluh empat) jam yang dilaksanakan secara bergantian (*shift*);

##### a. Markas Komando

Jl. Hos Cokroaminoto No.113

##### b. UPT Jambi Selatan (Pos Jambi Selatan)

Jl. Sultan Hasanudin

##### c. UPT Danau Teluk & Pelayangan (Pos Jamkose)

Jl. KH. M. Saleh

- d. UPT Jambi Timur ( Pos Jam Tim )  
Jl. Prabu Siliwangi
  - e. UPT Kota Baru ( Pos Kota Baru)  
Jl.Lingkar Selatan
  - f. UPT Alam Barajo  
Jl. Syailendra
- b) Setiap Pos yang ada diisi dengan 6 Petugas Pemadam sedangkan di Markas Komando ada sekitar 21 petugas pemadam kebakaran yang siaga; dan
- c) Dilengkapi sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.
- b. Jumlah dan Kualitas Aparatur/Sumber Daya Manusia
- a. Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
  - b. Setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasikan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu) orang sebagai Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur;
  - c. Masyarakat dan relawan kebakaran dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran, antara lain Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) atau sebutan lainnya; dan Setiap aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan wajib memiliki kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik pelatihan maupun bentuk lainnya.

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik eksternal maupun internal serta Solusi penanganannya sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum berjalan optimal, hal ini dapat terlihat dengan belum tercapainya target yang telah ditetapkan. Ketidak optimalan ini dapat terjadi karena belum terpenuhinya jumlah Pos Pelayanan Kebakaran disetiap kecamatan, hal ini

- dapat diminimalisir dengan cara pembangunan Pos Pelayanan Kebakaran disetiap Kecamatan yang belum memiliki Pos Pemadam Kebakaran.
2. Indikator SPM yang kedua yaitu Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 16 menit. Untuk mencapai target Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) tahun 2022 yaitu 15 menit, untuk itu diperlukan pembangunan Posyankar disetiap kecamatan dan armada pemadam kebakaran dalam kondisi siap di operasikan.
  3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar merupakan penunjang utama dalam kelancaran operasionalisasi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, dalam hal ini Indikator ini belum mencapai target yang ditentukan karena belum meratanya pengetahuan dan kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran. Langkah yang harus dilakukan yaitu dengan memaksimalkan atau bahkan menambah Bimbingan Teknis dan Diklat Pemadam, serta dengan mengirim lebih banyak pasukan untuk peningkatan kompetensi dengan cara mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur yang diselenggarakan oleh Kemendagri atau Pemadam Provinsi DKI Jakarta.
  4. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter, tahun 2022 penambahan mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 0 unit.

#### 4.5.7 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut

URUSAN PEMERINTAH	JENIS PELAYANAN DASAR	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
				KINERJA	KEUANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100,00%	7.931.015.360
		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100,00%	15.525.410

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat	6 Dokumen	15.525.410
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.550.671.681</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 ASN	6.288.357.691
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	259.814.108
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dokumen	2.499.882
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>357.122.700</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	205 Paket	343.282.500
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang-	2.499.882
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>543.102.936</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.999.265
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Paket	239.211.080

			Kantor yang Disediakan		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.994.100
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.999.991
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	14.998.500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	224.900.000
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>254.440.000</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	251.440.000
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>163.918.180,00</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa KJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	126.624.453

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	17.730.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.798.180
<b>1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Penurunan Angka Kejadian Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>696.420.693</b>
<b>2. Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>				
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Penurunan Angka Kejadian Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>644.458.783</b>
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	675 Orang	127.300.421
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	517.158.362
	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Penurunan Angka Kejadian Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>51.961.910</b>
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Informasi	100%	51.961.910

Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Penurunan Angka Kejadian Kebakaran	100%	4.587.076.469
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Angka Kejadian Kebakaran	100%	4.448.662.699
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	57.990.304
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	3.859.325.077
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	13 Unit	531.347.318
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penurunan Angka Kejadian Kebakaran	100%	30.761.970

		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	30.761.970
		<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Penurunan Angka Kejadian Kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>107.651.800</b>
		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	7 Unit	107.651.800

## B. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yaitu dengan jenis pelayanan dasar Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum indikator pencapaian Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, adalah **“Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum”**.

Cakupan pelayanan dasar yang menjadi indikator SPM Satpol PP Kota Jambi berdasarkan amanat Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, maka seiring dengan terbitnya produk legislasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan turunannya dalam produk legislasi Kota

Jambi yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta tata kerjanya, telah menyebabkan perubahan dalam cakupan indikator SPM Satpol PP yaitu **Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**.

Program pembangunan daerah dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Satpol PP Kota Jambi 2019-2023 dalam cakupan-cakupan yang menjadi indikator SPM Satpol PP sebagaimana dijelaskan diatas. Cakupan indikator kelembagaannya pada tahun 2022 yaitu Program dan Kegiatan Satpol PP Berbasis Indikator SPM Satpol PP Kota Jambi (s/d bulan Desember 2022).

Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yaitu dengan jenis pelayanan dasar Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat dengan indikator jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada.

Pada Tahun Anggaran 2022 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan 1 (satu) Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yaitu Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum 1 (satu) indikator SPM.

#### 4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian yang ditetapkan Pemerintah Kota Jambi dalam pencapaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Target Pencapaian SPM urusan Tramtibumlinmas**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target	Target
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum Perda dan Perkada	100%	100%

Anggaran yang dipersiapkan untuk **mendukung SPM** urusan Tramtibum linmas yaitu Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 2 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 633.857.162,-
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sebesar Rp. 41.778.800,-

#### 4.5.3 Realisasi

##### Realisasi Pencapaian SPM Urusan Tramtibumlinmas Tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian	KET
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	

Capaian indikator SPM Urusan Tramtibumlinmas Kota Jambi Tahun 2022 terhadap target secara umum sudah mencapai target .

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM urusan Tramtibumlinmas Kota Jambi Tahun 2022 merupakan jumlah anggaran yang berada pada anggaran belanja langsung atau pada belanja program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Program/Kegiatan	APBD	APBN	JUMLAH	%
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Tramtibumlinmas		-	-	100%

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Sampai awal tahun 2022 ini jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi adalah sebanyak 277 Orang dengan 210 personil laki-laki dan 66 orang personil perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

JENIS KELAMIN (Orang)	STATUS KEPEGAWAIAN (Orang)	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN (Orang)	PANGKAT & GOLONGAN RUANG (Orang)	Pejabat Struktural (Orang)
1	2	3	4	5
<b>PNS</b>		<b>PNS</b>	<b>PNS</b>	
<u>Laki – Laki</u> 45	<u>PNS</u> 51 <u>PPNS</u> 11	S2 7 S1 18	IV/c 1 IV/b 1 IV/a 3	Eselon IIb 1 Eselon IIIa 1 Eselon IIIb 4 Eselon IVa 15
<u>Perempuan</u> 7		D III/D II/D I 3 SMA 23	III/d 7 III/c 10 III/b 6 III/a 3 II/d 17 II/c 4	
<b>Jumlah</b> 52		<b>Jumlah</b> 52	<b>Jumlah</b> 52	<b>Jumlah</b> 21
<b>PTT/Banpol PP</b>	<b><u>PTT/Banpol PP</u></b> 226	<b>PTT/Banpol PP</b>	<b>Jumlah</b> 52	
<u>Laki-laki</u> 167	<b>Jumlah</b> 251	S2 2 S1 57 D III/DII/DI 5 SMA 162	<b>PTT/Banpol PP</b> = 226	
<u>Perempuan</u> 59				
<b>Jumlah</b> 226		<b>Jumlah</b> 226		
Total : 276 Org	Total : 276 Org	Total : 276 Org	Total : 276 Org	Total : 21 org

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Hambatan	Solusi	Ket
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum Perda dan Perkada	<p>Tidak adanya efek jera terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran, Peraturan Daerah Kota Jambi.</p> <p>Belum ada penataan / Alokasi tempat untuk berjualan yang jelas.</p> <p>Masih banyaknya kegiatan sosial masyarakat yang tidak melihat peraturan yang berlaku dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dan perlunya peningkatan kinerja pelayanan kantrantibmas</p>	<p>Perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dalam menegakan/memaksimalkan sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, dan diterapkannya peraturan daerah</p> <p>Bekerja sama dengan OPD terkait untuk menyelesaikan penataan tempat/lokasi berdagang bagi Pedagang Kaki Lima</p> <p>Penyuluhan/sosialisasi perda terhadap masyarakat serta kerjasama dengan aparat lain yang berkepentingan</p>	

#### 4.5.7 Program dan Kegiatan

- 1. Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selain itu, program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu.
- 2. Kegiatan** adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.338.571.620,-	Rp 6.259.552.378,-	98,75%
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 417.788.000,-	Rp 415.837.988,-	99,53%

## 4.6 URUSAN SOSIAL

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantardiluar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyaagelandangan dan pengemus diluar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelahtanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota jambi

### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Target	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai (%)		
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	1351	2022
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang direunifikasi dengan keluarga	100	1351	2022
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	15	2022
		Persentase anak terlantar yang direunifikasi			

		dengan keluarga	100	15	2022
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	791	2022
		Persentase lanjut usia terlantar yang direunifikasi dengan keluarga	100	791	2022
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	250	2022
		Persentase gelandangan pengemis yang	100	250	2022
		direunifikasi dengan keluarga			
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	896	2022

#### 4.6.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal				Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai (%)	target	capaian	
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	75%	1351	1009	2022
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang direunifikasi dengan keluarga	75%	1351	1009	2022
	Rehabilitasi sosial dasar anak	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan	100%	15	15	2022
	terlantar di luar panti sosial;	dasarnya di luar panti				
		Persentase anak terlantar yang direunifikasi dengan keluarga	100%	15	15	2022
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar	215%	791	1699	2022

		panti				
		Persentase lanjut usia terlantar yang direunifikasi dengan keluarga	215%	791	1699	2022
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	101%	250	252	2022
		Persentase gelandangan pengemis yang direunifikasi dengan keluarga	101%	250	252	2022
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	100%	886	886	2022
	tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.	dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota				

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2022, Dinas Sosial Kota Jambi memiliki anggaran sebesar Rp. 2.029.143.291 ( Dua Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu
<b>1</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>1.291.283.581</b>
1.1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	576.07892
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	156.490.130
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	100.809.482
1.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	127.047.000
1.1.4	Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	191.732.180
1.2	Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	715.204.789
	Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	
1.2.1	Sub Kegiatan Layanan Kedaruratan	490.015.100
1.2.2	Sub Kegiatan Perumahan	225.189.689
<b>2</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>737.859.710</b>
2.1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Jambi	328.865.550
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	141.264.900
2.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	68.634.050
2.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	38.069.650
2.1.4	Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	13.940.380
2.1.5	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	66.956.570

2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota Jambi	408.994.160
2.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	107.524.960
2.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	301.469.200
	Jumlah	2.029.143.291

Berdasarkan hasil realisasi anggaran sampai dengan bulan desember 2022, maka diperoleh data sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>1.291.283.581</b>	<b>1.197.671.265</b>	<b>92,75</b>
1.1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	576.078.792	531.443.225	92,25
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	156.490.130	140.767.725	89,95
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	100.809.482	78.469.900	77,84
1.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	127.047.000	124.008.600	97,61
1.1.4	Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	191.732.180	188.197.000	98,16
1.2	Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	715.204.789	666.228.040	93,15
1.2.1	Sub Kegiatan Layanan Kedaruratan	490.015.100	458.306.690	93,53
1.2.2	Sub Kegiatan Permakanan	225.189.689	207.921.350	92,33

<b>2</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>737.859.710</b>	<b>693.637.640</b>	<b>94,01</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Jambi</b>	<b>328.865.550</b>	<b>289.598.480</b>	<b>88,06</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Makanan</b>	<b>141.264.900</b>	<b>103.835.100</b>	<b>73,50</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Sandang</b>	<b>68.634.050</b>	<b>67.117.050</b>	<b>97,76</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</b>	<b>38.069.650</b>	<b>38.040.650</b>	<b>99,92</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan</b>	<b>13.940.380</b>	<b>13.940.380</b>	<b>100</b>
<b>2.1.5</b>	<b>Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial</b>	<b>66.956.570</b>	<b>66.665.300</b>	<b>99,56</b>
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota Jambi</b>	<b>408.994.160</b>	<b>404.039.160</b>	<b>98,79</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana</b>	<b>107.524.960</b>	<b>102.644.960</b>	<b>95,46</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</b>	<b>301.469.200</b>	<b>301.394.200</b>	<b>99,98</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>2.029.143.291</b>	<b>1.891.308.905</b>	<b>93</b>

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Sosial Kota Jambi didukung 79 orang, terdiri 35 orang PNS, 44 orang PTT. Keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel - tabel berikut

NO	BIDANG TUGAS	JML
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariats	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Sub Bagian	1
6	Fungsional Penyuluh	12
7	Fungsional Pekerja Sosial	2
8	Fungsional Arsiparis	2
9	Staf Pelaksana	10
10	Pegawai Tenaga Kontrak	44
11	Tagana	50
12	TKSK	11
13	PKH	75
14	PSM	62
15	SAKTI PEKSOS	2
<b>JUMLAH</b>		<b>277</b>

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Masalah yang dihadapi selama tahun 2022 antara lain adalah, besarnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang mengakibatkan tingginya angka kemiskinan di Kota Jambi dan Kurangnya pendanaan serta Sarana dan Prasarana Pembinaan.

Adapun upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menangani PMKS terlantar diluar panti.

#### 4.6.7 Program dan Kegiatan

##### 1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

## 2. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kotas
- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

## BAB V PENUTUP

Dari seluruh kewenangan wajib dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada daerah, Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, agar terpadu dan terarah Pemerintah Kota Jambi, menjabarkannya kedalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan (RPJM), Rencana Strategis ( Renstra ) dan kebijakan umum Pemerintah Kota Jambi dan selanjutnya dijabarkan lagi didalam Renstra dari masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi ( SKPD ) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Selanjutnya untuk implementasi dari Dokumen Perencanaan yang telah disepakati bersama, maka semua program yang ada di masing – masing SKPD dihimpun dan dibahas secara bersama – sama dan selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ).

Untuk merealisasi kegiatan yang telah disusun haruslah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun sumber dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan berasal dari Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan lainnya yang sah.

Untuk menjaga agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, berbagai unsur tetap melakukan pengawasan dan memantau kegiatan dimaksud, baik dari lembaga pengawas intern maupun pengawas ekstern seperti BPK, Badan Pengawas Kota, DPRD, LSM, masyarakat maupun organisasi lainnya.